

**KIPRAH PEDAGANG PRIBUMI
PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DI ACEH
(1945 - 1949)**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
BANDA ACEH**

estarian
lisional

8

959.8
ZUL
K.

**KIPRAH PEDAGANG PRIBUMI
PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DI ACEH
(1945 - 1949)**

Peneliti : Zulfan

Editor : Rusdi Sufi

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

ISBN : 979-95312-7-6


9/7-98
IRFANI DEWI WANTI

**Penerbit : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
1998**

KATA PENGANTAR

Kelompok pedagang pribumi telah muncul sejak zaman Kesultanan, dan merupakan salah satu golongan dalam stratifikasi masyarakat Aceh. Dalam kedudukannya mereka mempunyai status tersendiri sesuai dengan fungsinya yang dapat meningkatkan ekonomi kerajaan.

Kelompok ini berkembang secara kontinyu sehingga antara satu periode dengan periode lainnya tidak pernah terputus. Pada masa pemerintah Kolonial Belanda mereka tetap melakukan aktivitasnya sebagai pedagang, dengan tujuan untuk membiayai Perang Sabil yang digerakkan oleh rakyat Aceh pada umumnya. Bahkan pada masa ini mereka mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berusaha baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang pertanian. Hal ini sesuai dengan politik pasifikasi yang diterapkan untuk mengamankan daerah Aceh.

Pada masa pendudukan militer Jepang kegiatan perdagangan terhenti sama sekali. Para pedagang pribumi semuanya direkrut sebagai tenaga yang menangani dan merealisasi kebijakan-kebijakan ekonomi untuk kepentingan militer Jepang. Namun demikian mereka masih tetap berada dalam lingkungan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah ekonomi.

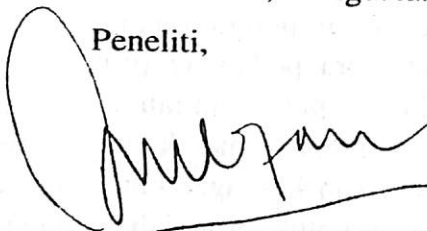
Berdasarkan pengalaman seperti di atas, maka pada awal kemerdekaan para pedagang pribumi tampil sebagai pelaku-pelaku ekonomi dalam perdagangan nasional dan internasional. Untuk mengetahui bagaimana mereka bisa tampil dan berkembang sehingga dapat memberikan berbagai kontribusi berharga kepada pemerintah. Salah satu usaha untuk itu adalah dengan meneliti tentang latar belakang kehidupan para pedagang, etika bisnis yang dianut, dan kebijakan pemerintah tentang ekonomi, serta potensi daerah. Melalui penelitian ini kita akan mengetahui berbagai unsur yang menyebabkan para pedagang pribumi sangat berhasil merealisasikan ekonomi revolusi di Aceh.

Oleh karena itu peneliti menyusun karya tulis ini terdiri dari lima Bab. Bab I Pendahuluan (latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber yang digunakan, dan kerangka pemikiran teoritis); Bab II membicarakan Potensi dan Kegiatan Ekonomi Sebelum Perang Kemerdekaan (stratifikasi sosial, ekonomi keuangan, pengusaha Aceh); Bab III tentang Situasi Pemerintahan dan Pedagang Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (pembentukan pemerintahan, keadaan sosial ekonomi, perkembangan pengusaha Aceh, profil pengusaha Aceh, dan perdagangan luar negeri); Bab IV yang membahas tentang Kontribusi Kelompok Pedagang Dalam Revolusi Kemerdekaan (dukungan ekonomi untuk revolusi di Aceh, dukungan ekonomi untuk perang Medan Area, dan dukungan ekonomi untuk membiayai Pemerintah Pusat); Bab V Kesimpulan (jawaban masalah).

Namun demikian karya ini tidak akan terselesaikan dengan sempurna tanpa bantuan semua pihak. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada informan baik yang berada di daerah Aceh maupun di luar daerah Aceh, atas segala bantuan, perhatian, dan rasa kekeluargaan yang diberikan oleh mereka. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya sampaikan kepada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, atas semua bantuannya sehingga memungkinkan dilaksanakan penelitian ini.

Banda Aceh, 22 Agustus 1998

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zulfan', with a large loop at the beginning and a horizontal line underneath.

(Zulfan)

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Indonesia adalah sebuah negara multi etnik yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman tersebut merupakan sebuah kekayaan yang perlu mendapat perhatian khusus. Kekayaan ini mencakup wujud-wujud kebudayaan yang didukung oleh masyarakatnya. Setiap suku bangsa itu memiliki nilai-nilai budaya yang khas, yang membedakan jati diri mereka daripada suku bangsa lain. Perbedaan ini akan nyata dalam gagasan-gagasan dan hasil-hasil karya yang akhirnya dituangkan lewat interaksi antarindividu, antarkelompok, dengan alam raya di sekitarnya.

Keadaan di atas dapat menjadi sebuah "bencana" karena dapat memecah persatuan kesatuan bangsa atau dapat mendatangkan berkah karena pemasukan devisa dari turis yang ingin melihat keanekaragaman suku dan budaya tersebut. Berangkat dari kondisi diatas, maka perlu diupayakan pembinaan, pengkajian dan penelitian nilai-nilai budaya dari setiap suku bangsa/daerah. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila guna tercapainya ketahanan nasional di bidang sosial budaya.

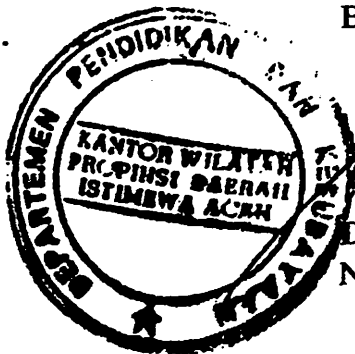
Karenanya, saya dengan senang hati menyambut baik terbitnya naskah *Kiprah Pedagang Pribumi Pada Masa Revolusi di Aceh (1945-1949)* hasil kegiatan penelitian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, dalam rangka menginformasikannya kepada masyarakat tentang masalah-masalah kesejarahan dan nilai tradisional.

Tentunya hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut pada masa yang akan datang. Namun saya mengharapkan buku ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan dan acuan guna memperluas cakrawala pembaca serta bahan penelitian lebih lanjut.

Selain itu, dengan hadirnya buku semacam ini masyarakat Indonesia yang majemuk dapat saling memahami sejarah dan kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian, akan dapat memahami dan mengerti tentang berbagai budaya yang melandasi kesatuan dan persatuan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian dan penyelesaian buku ini.

Banda Aceh, 22 Agustus 1998



Drs. H. A. Malik Raden, MM
NIP. 130 336 793

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian dan Sumber yang Digunakan	8
D. Kerangka Pemikiran Teoritis	9
BAB II POTENSI DAN KEGIATAN EKONOMI SEBELUM REVOLUSI KEMERDEKAAN	
A. Stratifikasi Sosial	11
B. Ekonomi Keuangan	13
C. Pedagang Aceh	26
BAB III SITUASI PEMERINTAHAN DAN PEDAGANG ACEH PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN	
A. Pembentukan Pemerintahan	33
B. Keadaan Sosial Ekonomi	44
C. Perkembangan Pedagang Aceh	48
D. Profil Pedagang Aceh	55
E. Perdagangan Luar Negeri	77

**BAB IV KONTRIBUSI KELOMPOK PEDAGANG
DALAM REVOLUSI KEMERDEKAAN**

A. Dukungan Ekonomi Untuk Revolusi Di Aceh	85
B. Dukungan Ekonomi Untuk Perang Medan Area	86
C. Dukungan Ekonomi Untuk Membiayai Pemerintah Pusat	87

BAB V KESIMPULAN	92
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR INFORMAN	103
DAFTAR SINGKATAN	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Para pengusaha adalah orang yang bertugas untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan dalam bidang ekonomi (Gerschenkron, 1986 : 168 - 170). Kelas pengusaha seperti ini telah ada dalam stratifikasi sosial masyarakat Aceh sejak masa kesultanan. Golongan ini hampir tidak mempunyai hubungan politik dengan sultan, akan tetapi mempunyai status sosial tertentu karena potensinya yang dapat meningkatkan pendapatan kerajaan. Dengan demikian boleh dikatakan menonjol dalam sistem pelapisan sosial pada masa itu sebagai akibat dari peranannya dalam bidang ekonomi pada umumnya dan dalam bidang perdagangan pada khususnya, mereka berada pada puncak jenjang sosial yang mempunyai hak-hak istimewa, golongan ini dapat diwakili oleh para Orang Kaya (OK). Golongan bangsawan dan pedagang ini dalam stratifikasi sosial pada masa itu berada diantara elit politik dan agama dengan golongan rakyat biasa (Lombard, 1991 : 74).

Pada masa kesultanan, usaha-usaha perdagangan sepenuhnya dikuasai oleh Sultan sendiri, sedangkan para Uleebalang (pemimpin negeri) dan para pedagang lainnya hanya diizinkan berdagang sebagai pedagang perantara, antara sultan dengan pedagang asing. Hubungan antara Sultan dengan para Uleebalang mulai dipererat baik dalam bidang politik maupun ekonomi pada tahun 1520, yaitu setelah Sultan Ali Muhyatsyah mendirikan kerajaan Aceh Darussalam (Lombard, 1991 : 41)

Sultan sebagai penguasa pemerintahan menjalankan sistem monopoli perdagangan, sehingga terjadi pembatasan terhadap aktivitas perdagangan para kelompok pedagang yang berkedudukan pada tingkat kenegerian, yang pada umumnya didominasi oleh para Uleebalang. Para Uleebalang sebagai pemimpin negeri dan juga sekaligus sebagai pedagang dalam kerajaan Aceh tidak memperoleh kebebasan untuk mengadakan

perdagangan secara langsung dengan pedagang asing. Para pedagang diwajibkan untuk memasukkan semua komoditi ekspor kepusat kesultanan, setelah itu komoditi tersebut baru diekspor keluar negeri.

Dengan demikian para pedagang pada tingkat kenegerian tidak dapat berkembang secara optimal. Hal ini pula yang menyebabkan para Uleebalang dan kelompok pedagang pada tingkat kenegerian berusaha menentang kekuasaan Sultan pada waktu-waktu yang memungkinkan. Sultan Aceh mendominasi usaha perdagangan secara intensif pada akhir abad ke 16 dan pada permulaan abad ke 17, yaitu pada pemerintahan Alkahar dan Iskandar Muda. Mengenai dominasi Sultan Iskandar Muda dalam bidang perdagangan, Anthony Reid mengemukakan bahwa kebesarannya dalam bidang politik dan militer sebenarnya didasari oleh keberhasilannya dalam bidang ekonomi, melakukan monopoli perdagangan dalam negeri. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menghancurkan kekuasaan pedagang bebas atau "orang kaya". Seluruh kegiatan perdagangan baik didalam negeri maupun yang berhubungan dengan pedagang asing berada dibawah kontrolnya. Dengan demikian ia merupakan "Raja Pedagang" yang sesungguhnya seperti yang dikenal dalam sejarah Asia Tenggara pada umumnya (Reid, 1975 : 51).

Seperti diketahui bahwa Banda Aceh Darussalam sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Aceh adalah salah satu bandar perdagangan yang ramai sejak abad ke-16. Berbeda dengan Malaka pada periode sebelumnya yang hanya mengambil keuntungan dari fungsinya sebagai pelabuhan transit saja, Bandar Aceh justru menggabungkan kedua unsur yang menonjol, baik sebagai pelabuhan transit maupun daerah agraris penghasil berbagai hasil bumi yang berasal dari daerah pedalaman.

Berbagai hasil bumi daerah pedalaman yang terletak diluar pusat kerajaan dan bahkan dari daerah-daerah Uleebalang yang jauh, pada waktu pemerintahan pusat cukup kuat harus diangkut terlebih dahulu ke pusat pemerintahan Bandar Aceh Darussalam. Pedagang asing yang melakukan perdagangan dengan daerah ini, harus melalui Pemerintah Pusat. Pada waktu Pemerintahan Pusat dalam keadaan lemah, berbagai pelabuhan kecil disepanjang pantai barat dan utara langsung melakukan

transaksi perdagangan dengan pedagang asing tanpa mengindahkan kekuasaan Sultan.

Dalam perkembangan Kerajaan Aceh sejak awal abad ke-16, jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara perdagangan dengan kekuasaan negara, bahkan perdagangan itu sendiri merupakan basis kekuasaan politik. Apabila kekuasaan pusat berhasil melakukan monopoli perdagangan berarti pula ia berhasil menguasai kekuasaan politik yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan ekonomi (Reid, 1975:53). Dengan demikian keadaan politik dalam negeri sangat menentukan bagi perkembangan perdagangan.

Penguasaan perdagangan dalam negeri terutama ditujukan untuk dapat menguasai berbagai hasil produksi pertanian yang amat bernilai untuk komoditi ekspor.

Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menduduki kesultanan Aceh pada 5 Januari 1874, penguasa ekonomi beralih dari kekuasaan sultan kepada pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan kondisi yang sama di seluruh Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi penguasa ekonomi pada masa itu adalah pemerintah Hindia Belanda, kemudian disusul oleh pengusaha-pengusaha swasta Belanda dan asing lainnya. Mereka pada umumnya bergerak dalam perusahaan berskala besar, sedangkan perusahaan menengah dan kecil pada umumnya didominasi oleh pengusaha Tionghoa dan sedikit berada ditangan pedagang pribumi (Admosudirdjo, 1984 : 19 - 20).

Dengan demikian penetrasi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda ke Aceh mengakibatkan hancurnya kekuasaan kesultanan baik dalam bidang ekonomi maupun politik.

Semenjak itu pula para pedagang pada tingkat kenegarian yang telah dikuasai diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada umumnya mereka dipaksa baik secara militer maupun dengan menerapkan kekuatan strategis, seperti memblokir jalur perdagangan dan menguasai pelabuhan-pelabuhan ekspor. Tindakan itu ternyata sangat efektif, sehingga para Uleebalang untuk mempertahankan

ekonomi kenegeriannya terpaksa harus mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (Ismail, 1991: 106-111).

Kemudian pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda membuka daerah Aceh untuk penanaman modal swasta Barat. Karena itu muncullah perusahaan-perusahaan swasta Barat yang berskala besar, dan bergerak dalam bidang perkebunan, pertambangan serta dalam bidang ekspor impor.

Pada tahap permulaan pelaksanaan perusahaan-perusahaan swasta Barat di daerah Aceh, para Uleebalang memperoleh keuntungan yang seimbang. Hal itu dikarenakan semua uang masuk dari berbagai sektor didalam suatu negeri secara otomatis menjadi hak pribadi Uleebalang, dia sendirilah yang menentukan prioritas dan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan untuk kepentingan masing-masing kenegerian. Kemudian setelah didirikan Landschapskas (lembaga keuangan atau kas) pada tahun 1890 pendapatan para Uleebalang mulai menurun, karena para Uleebalang hanya berhak menikmati sebagian kecil saja dari pendapatan yang masuk ke dalam Landschapskas, berupa gaji yang diterima secara tetap setiap bulan.

Landschapskas adalah suatu lembaga keuangan atau kas, pada tingkat onderafdeeling atau gabungan beberapa kenegerian pada tingkat afdeeling, kedalam mana semua pemasukan yang diperoleh setiap kenegerian disetorkan dan dari kas itu pula berbagai kebutuhan pemerintah pada tiap-tiap kenegerian dibiayai (Kreemer, 1932 : 155).

Tujuan utama pembentukan landschapkas oleh pemerintah Hindia Belanda ialah untuk membuat suatu pemisahan yang jelas antara pendapatan pribadi para Uleebalang dengan pendapatan kenegerian (Kreemer, 1932 : 156).

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa perkembangan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda baik dalam bidang ekonomi maupun politik semakin lama semakin kuat, sehingga kedudukan para Uleebalang sebagai penguasa ekonomi ataupun sebagai pedagang besar beralih kepada perusahaan-perusahaan swasta Barat. Namun demikian

pemerintah Hindia Belanda masih memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk menjalankan usaha perdagangan, baik sebagai pedagang perantara maupun sebagai pedagang yang berhubungan langsung dengan perusahaan ekspor impor Belanda. Kesempatan ini dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat Aceh, sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya lebih memilih berperang melawan Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat pedagang ini menjadi cikal bakal pengusaha di Aceh pada awal kemerdekaan 1945 - 1949.

Setelah Jepang menduduki Aceh pada tahun 1942, kekuasaan ekonomi beralih dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Pendudukan Jepang. Jepang mempergunakan perekonomian daerah Aceh sepenuhnya untuk kepentingan perang. Oleh karena itu selama tahun 1942 hingga 1945 kehidupan perekonomian sama sekali tidak berkembang.

Tujuan Jepang yang semula, menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah di Sumatera sebagai sumber bahan mentah dan lapangan pasar untuk produk industrinya tidak tercapai, dikarenakan ketiadaan kapal-kapal pengangkut pada pertengahan tahun 1943. Semua kapal yang masih ada dipergunakan untuk kepentingan militer (Reid, 1987 : 204).

Politik ekonomi Jepang terpaksa mengadakan perubahan pasar yang menyeluruh pada tahun 1943 kearah swasembada. Perkebunan-perkebunan yang luas yang menjadi tujuan peperangan ini, sama sekali tidak ada gunanya, penderesan karet terhenti pada bulan Juni 1943, dan mengalihkan kepada usaha tanaman yang menghasilkan bahan makanan untuk menghidupkan tenaga kerja.

Untuk menjamin bahan pangan militer Jepang, hukum pasar semakin ditinggalkan, ditundukkan kepada pengawasan pemerintah yang keras dan wajib setor serta pemerasan tenaga rakyat secara besar-besaran. Kondisi ini berlangsung hingga bulan Oktober 1945 (Reid, 1987 : 205).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Aceh sama sekali bebas dari pendudukan kembali Belanda baik pada agresi pertama maupun agresi

kedua. Keadaan ini memungkinkan Pemerintah Daerah Aceh menjalankan aktivitas pemerintahan dalam berbagai sektor dengan baik. Salah satunya yang paling penting adalah sektor ekonomi, karena selama revolusi kemerdekaan 1945 - 1949 Pemerintah Pusat belum mampu mengontrol dan memberi bantuan kepada pemerintah daerah Aceh. Dengan demikian daerah Aceh harus berusaha sendiri menyelesaikan masalah-masalah perbelanjaan negara yang sangat dibutuhkan pada waktu itu, baik untuk menjalankan pemerintahan maupun untuk mendukung perjuangan kemerdekaan yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia.

Dalam bidang perbelanjaan negara, pemerintah berusaha mempergunakan potensi-potensi ekonomi daerah yang ada dan membuat peraturan-peraturan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah mengambil alih dan memproduksi kembali perkebunan-perkebunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, serta membuka hubungan perdagangan dengan Pulau Penang, Malaya dan Singapura. Pada masa itu pemerintah dengan mudah dapat memperoleh komoditi ekspor dalam jumlah besar dari hasil perkebunan, karena selama pendudukan Jepang produksi perkebunan semuanya digudangkan dan belum sempat diekspor. Oleh karena itu karet dan minyak kelapa sawit menjadi komoditi ekspor utama, disamping hasil pertanian rakyat lainnya (Polim, 1972: 32). Untuk menunjang program tersebut pemerintah memberi kredit barang-barang perkebunan kepada pedagang dan mempermudah syarat-syarat untuk mendirikan perseroan berbadan hukum, baik yang dikelola oleh organisasi tertentu maupun oleh pemerintah sendiri.

Sehubungan dengan kebijakan di atas, maka pada awal kemerdekaan berkembanglah pengusaha-pengusaha pribumi sebagai pelaku dalam bidang perniagaan internasional yang menggantikan posisi-posisi yang ditinggalkan oleh kapitalis-kapitalis Eropa. Mereka ini pada Umumnya terdiri dari orang-orang yang dahulunya bekerja sama dengan Belanda, Cina, Arab dan India dan telah memiliki pengalaman dalam berusaha (berdagang). Oleh karena itu mereka dapat menjalankan perdagangan

ekspor impor antara daerah Aceh dengan Pulau Penang dengan lancar, sehingga sebagian besar kebutuhan daerah Aceh dapat dipenuhi baik untuk kepentingan sipil maupun kepentingan militer.

Dalam rangka mengumpulkan dana untuk perjuangan dalam arti yang seluas-luasnya telah didirikan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA). Secara organisatoris baru pada saat ini lah para pedagang Aceh memiliki suatu organisasi yang tangguh dengan bentuk belum bersifat komersil-murni (*pure-commercial*), masih sedikit bersifat politis guna mendukung perjuangan bangsa pada umumnya.

Sehubungan dengan eksistensi para pengusaha Aceh pada awal kemerdekaan, Irchami Sulaiman mengemukakan, bahwa pada awal kemerdekaan berdiri sejumlah perusahaan yang dirintis oleh para pedagang Aceh yang bergerak baik dalam perdagangan lokal maupun dalam bidang ekspor impor. Pada akhir tahun 1940-an dan 1950-an perdagangan dibidang ekspor impor sebagian besar berada ditangan pedagang Aceh. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara pengusaha dan penguasa melalui kebijakan lisensi pemerintah dalam rangka melindungi dan pengembangan pengusaha pribumi diawal masa pertumbuhannya. Keadaan tersebut berlangsung hingga akhir tahun 1960. Kemudian semenjak awal tahun 1970-an posisi pedagang pribumi beralih kepengusaha Tionghoa (Sulaiman dalam Koncoro Jakti, 1988 : 25).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : **Pertama**, siapa sajakah yang menjadi pedagang di Aceh pada awal kemerdekaan ?. **Kedua**, mengapa pedagang-pedagang pribumi dapat berkembang di Aceh pada awal kemerdekaan ?. **Ketiga**, bagaimana kontribusi para pedagang dalam perang kemerdekaan di Aceh (1945 -1949) ?. Masalah-masalah seperti itu merupakan persoalan pokok dalam penelitian ini, sehingga uraian dan jawaban yang akan diberikan pada bab-bab selanjutnya lebih berfokus pada masalah tersebut.

2. Tujuan Penelitian.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis persoalan-persoalan yang menyangkut pengusaha-pengusaha di Aceh pada awal kemerdekaan (1945 - 1949).

Secara terperinci tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: **Pertama**, untuk mengetahui siapa sajakah orang-orang yang berkembang sebagai kelompok pedagang pada awal kemerdekaan di Aceh. **Kedua**, untuk menganalisis mengapa pedagang peribumi dapat muncul di Aceh pada awal kemerdekaan. **Ketiga**, untuk menganalisis bagaimana kontribusi pedagang dalam Perang Kemerdekaan di Aceh.

3. Metode Penelitian dan Sumber yang digunakan.

Kajian dalam studi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang bersifat deskriptif dan analitis. Artinya studi ini berusaha untuk mendeskripsikan gejala, peristiwa dan fakta-fakta sejarah yang terjadi pada masa lalu, kemudian dianalisis berdasarkan hubungan sebab akibat sehingga bisa melahirkan sebuah rekonstruksi sejarah yang logis dan rasional. Adapun langkah-langkah metodologinya dilakukan sebagaimana biasanya dalam penelitian sejarah, yang meliputi (1) **Heuristik**, yaitu usaha mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, (2) **Kritik**, yaitu kegiatan menilai sumber sejarah dan menganalisa keterangan dari sumber itu, (3) **Interpretasi**, yaitu menafsirkan keterangan sumber-sumber dan mensintesis hasil penafsiran itu dalam kerangka pemikiran yang logis dan rasional, serta (4) **Historiografi**, yaitu usaha merekonstruksikan pemikiran berdasarkan fakta-fakta dan sumber-sumber data kedalam bentuk penulisan sejarah yang objektif serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selanjutnya, untuk mengumpulkan sumber penulis melaksanakan Library Research dan Field Research. Sesuai dengan kegiatan tersebut penulis mempergunakan 2 teknik dalam penelitian ini, Pertama, teknik penelitian di perpustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dari bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Kedua, teknik penelitian di lapangan,

dalam hal ini penulis mempergunakan pendekatan Life History yang bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber primer lisan melalui wawancara dengan tokoh-tokoh pengusaha ataupun pewaris perusahaan dagang yang berkembang pada awal kemerdekaan.

Adapun sumber-sumber sejarah yang dipergunakan dalam studi ini, terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Oleh karena itu kajian dalam studi ini merujuk pada bahan-bahan seperti : Dokumen, Arsip, Tulisan-tulisan sejaman. Hasil wawancara dengan pelaku-pelaku sejarah (Sejarah Lisan); dan buku-buku, Jurnal Ilmiah, Makalah. Majalah yang dianggap relevan dengan fokus kajian dan permasalahan.

4. Kerangka Pemikiran Teoretis.

Kelas pedagang merupakan salah satu golongan dalam stratifikasi sosial masyarakat Aceh seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah di atas.

Weber mengemukakan bahwa kelas pedagang mencakup orang-orang yang mampu mendapatkan monopoli manajemen usaha bagi para anggota dan kepentingan bisnis serta sanggup menjaga kepentingan mereka dengan mempengaruhi kebijaksanaan ekonomi dalam organisasi politik dan organisasi lain. Kelas pedagang ini masing-masing dikelompokkan lagi kedalam kelas privelese dan kelas menengah serta kelas tanpa privelese (Colijn, 1975:63)

Sementara S.N. Eisenstadt mengemukakan dalam hasil penelitiannya : "Beberapa Studi tentang Kasus Perbandingan mengenai akibat-akibat Revolusi", bahwa pertumbuhan golongan pengusaha didorong oleh perubahan yang sedang terjadi secara meluas dalam basis hierakhi sosial, seperti penghapusan hak-hak istimewa ekonomi dan hukum dari golongan aristokrasi, dalam pembenahan kriteria kedudukan ekonomi serta penataan kembali terhadap akses-akses formal dan informal untuk memperoleh sumber-sumber baru dan penggunaannya (Esenstadt, 1986:85).

Kemudian Clifford Geertz mengemukakan, bahwa kehidupan ekonomi pasar akan memunculkan kaum pengusaha. Kondisi ini akan berlangsung pada kota-kota pusat perdagangan; berpenduduk padat, daerah subur dan kehidupan ekonominya sangat ditentukan oleh sektor pertanian, serta adanya proses sosial, politik dan ekonomi yang mendasar.

Golongan pengusaha tersebut pada umumnya muncul dalam lingkungan golongan masyarakat yang homogen dan mempunyai ciri-ciri khas yang membedakan dari golongan-golongan lain dalam masyarakat. Mereka ini merupakan hasil dari kristalisasi golongan masyarakat yang lebih besar, yang memiliki sejarah yang lama sebagai golongan luar yang memiliki pola orientasi daerah yang lebih luas. Selain dari itu mereka sedang terlibat dalam suatu proses perubahan yang drastis dalam hubungan-hubungannya dengan masyarakat dimana mereka berada (Geertz, 189 : 1).

Sehubungan dengan kemajuan sektor pertanian yang mengacu kepada berkembangnya golongan pengusaha seperti yang tersebut di atas, Dr. Muhammad Gade Ismail mengemukakan bahwa dengan masuknya modal-modal swasta Barat ke Aceh pada pergantian abad yang lalu, kegiatan ekonomi menjadi semakin kompleks. Disatu sisi aktivitas ekonomi, penanaman lada maupun penanaman tanaman baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda seperti karet dan kopi berlangsung terus. Sementara pada sisi lain penanaman swasta Barat mulai berlangsung dengan modal dan tenaga kerja yang lebih intensif. Dengan demikian sejak awal abad ke-20 dapat dikatakan bahwa di Aceh terdapat dua sektor ekonomi yaitu, sektor setempat (domestik) dan asing (foreign).

Modal swasta Barat yang mengembangkan daerah Aceh sebagai penghasil komoditi ekspor untuk pasar internasional, mendapat respon yang negatif dari penduduk setempat, sehingga sektor setempat dengan sektor asing berjalan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu penanaman modal swasta Barat di Aceh tidak berpengaruh secara langsung terhadap penduduk, mereka lebih condong membuka lahan pertanian sendiri dari pada menerima tawaran kerja pada perusahaan swasta Barat (Ismail, 1994:15).

BAB II

POTENSI DAN KEGIATAN EKONOMI SEBELUM REVOLUSI KEMERDEKAAN

A. Stratifikasi Sosial

Dalam suatu masyarakat akan terdapat golongan paling atas yang disebut dengan lapisan elit, dan lapisan bawah yang disebut dengan lapisan biasa atau orang kebanyakan. Dalam masyarakat Aceh yang kompleks terutama pada masa Sultan Iskandar Muda terdapat sistem pelapisan sosial sebagai berikut.

1. Elit politik dan agama.

Golongan masyarakat yang termasuk dalam elit politik dan agama ini mempunyai kedudukan relatif sama dalam tata pemerintahan atau pun dalam tata kehidupan sosial kesultanan Aceh. Golongan ini dapat diwakili oleh para ulama dan para teknokrat seperti para menteri dan pejabat kerajaan, yang secara hierarkis mempunyai kedudukan vertikal dari tingkat pusat sampai tingkat daerah kekuasaan diwilayah teritorial Aceh Darussalam (Rusdi Sufi, 1981 : 72 - 74).

2. Golongan uleebalang dan pedagang

Golongan ini sebagai wakil raja untuk daerah-daerah kerajaan kecil, yang mempunyai status sosial tertentu karena potensinya yang dapat meningkatkan pendapatan kerajaan. Karena itu golongan masyarakat tersebut berada pada tingkat kedudukan yang istimewa dalam sistem pelapisan sosial pada masa itu sebagai akibat dari peranannya dalam bidang ekonomi perdagangan. Golongan ini dapat diwakili oleh Orang Kaya (OK) atau yang setaraf dengan itu (Lombard, 1991 : 74).

3. Golongan rakyat biasa.

Golongan masyarakat ini merupakan lapisan masyarakat merdeka dalam arti dapat memenuhi tuntutan hidup berdasarkan ukuran-ukuran yang dianggap sesuai dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh pada

waktu itu. Setidaknya syarat-syarat tradisional seperti terhindar dari pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kasar atau bukan tenaga kerja rendahan, melainkan hidupnya tanpa mempunyai ketergantungan yang berlebihan dari golongan lainnya. Dengan keahliannya mereka diakui sebagai tenaga terampil dalam bidang-bidang tertentu, seperti tukang, nelayan, dan petani (Lombard, 1991 : 76-77).

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa golongan pedagang pada umumnya didominasi oleh golongan *Uleebalang*, atau pun dapat dikatakan golongan *Uleebalang* sekaligus merangkap sebagai pedagang. Dengan demikian pertumbuhan golongan pedagang hanya berkisar dalam lingkungan keluarga *Uleebalang*, sehingga usaha perdagangan sangat sulit beralih kepada golongan masyarakat biasa.

Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, stratifikasi sosial masyarakat Aceh sudah mulai berubah. Khususnya mengenai golongan pedagang tidak lagi seluruhnya berasal dari keluarga *Uleebalang*, tetapi sudah ada yang berasal dari golongan rakyat biasa. Hal tersebut berkembang dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Kolonial Belanda untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh dalam rangka menjalankan politik pasifikasi (penaklukan secara damai) untuk menguasai Aceh secara intensif. Adapun kebijakan pemerintah yang mendorong munculnya golongan pedagang dari masyarakat biasa pada masa itu adalah didirikan *Volkscredietbank* (bank pinjaman rakyat), dan memberikan kredit tanpa bunga kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh. Kesempatan ini dipergunakan oleh sebagian masyarakat Aceh untuk menanam modalnya dalam usaha pertanian komoditi ekspor. Berdasarkan kemajuan yang berhasil diperoleh dari usaha pertanian tersebut mereka sebagian muncul sebagai pedagang (Langhout, 1923 : 21).

Pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang golongan pedagang masih tetap bertahan dalam stratifikasi masyarakat Aceh. Golongan ini direkrut oleh Jepang sebagai pegawai badan *Shukaikai* atau pun Bagi Dan Kumpul (BDK). Badan tersebut bertugas untuk menangani kebutuhan rakyat baik sandang maupun pangan. Oleh karena itu usaha perdagangan

sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, sehingga golongan pedagang pada masa itu tidak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha perdagangan.

B. Ekonomi Keuangan.

Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ekonomi telah memperkuat kekuatannya baik dalam bidang politik maupun dalam bidang militer. Kemajuan dalam bidang ekonomi diperoleh dengan cara melakukan monopoli perdagangan dalam negeri. Pada masa pemerintahannya ia berhasil menghancurkan kekuatan pedagang bebas atau "Orang Kaya", seluruh kegiatan perdagangan baik dalam negeri maupun yang berhubungan dengan pedagang asing berada di bawah kontrolnya (Reid, tanpa angka tahun : 45 - 56). Keadaan itu juga dikemukakan oleh Tome Pires, pejabat Portugis yang pernah lebih dua tahun bermukim di Malaka setelah kedatangan Portugis 1511, bahwa Sultan ikut aktif dalam perniagaan dengan memiliki kapal (lanchara) sebanyak 140 buah. Komoditi yang diperdagangkan adalah berupa bahan makanan, beras dan rempah-rempah (Pires, 1944 : 139). Dengan demikian ia merupakan "Raja Pedagang" yang sesungguhnya seperti yang dikenal dalam sejarah Asia Tenggara pada umumnya.

Sesuai dengan politik Kesultanan, Banda Aceh Darussalam sebagai pusat pemerintahan kerajaan Aceh, dijadikan sebagai salah satu bandar perdagangan yang ramai sejak abad ke-16. Berbeda dengan Malaka pada periode sebelumnya yang hanya mengambil keuntungan dengan fungsinya sebagai pelabuhan transit saja. Bandar Aceh Darussalam justru menggabungkan kedua unsur yang menonjol, baik sebagai pelabuhan transit maupun daerah agraris penghasil berbagai hasil bumi yang berasal dari daerah-daerah pedalaman. Penggabungan kedua unsur tersebut dapat dijalankan karena Sultan berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan otonom yang telah ada di kedua sisi pantai Sumatera (Daya, Singkel, Barus, Tiku, Pariaman, Lamuri, Pidie, Pasei, Peureulak, Aru, Siak dan malah Johor atau Penang).

Daerah-daerah tersebut mempunyai potensi ekonominya yang cukup akan persediaan komoditi pertanian/hutan, seperti lada, pinang, beras, dan kapur barus atau pun bahan-bahan mineral seperti emas, belerang, minyak tanah, merupakan sumber pemasukan dan pembiayaan istana, karena potensi Ibu Kota mempunyai potensi pedalaman terbatas. Karena itu Sultan memperlakukan kebijaksanaan yang bersifat pembatasan daerah takluk dengan dunia luar dan sekaligus memaksakan kapal-kapal asing untuk berhubungan dengan Ibu Kota (Anderson, 1970:22) Dalam perkembangan kerajaan Aceh sejak awal abad ke-16, jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara perdagangan dengan kekuasaan negara, bahkan kekuasaan perdagangan merupakan basis kekuatan politik. Apabila kekuasaan pusat berhasil melakukan monopoli perdagangan berarti pula ia berhasil menguasai kekuasaan politik yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan ekonomi (Reid, tanpa angka tahun : 57) Dengan demikian politik dalam negeri amat menentukan bagi perkembangan perdagangan. Penguasaan perdagangan dalam negeri terutama ditujukan untuk dapat menguasai berbagai hasil produksi pertanian yang amat bernilai untuk komoditi ekspor. Berdasarkan dari kebijakan di atas Bandar Aceh Darussalam tumbuh menjadi kota perniagaan yang ramai. Dalam lalu lintas perdagangan internasional itu, posisi kota Bandar Aceh Darussalam lebih bersifat interport dari pada komoditi ekspor. Situasi demikian berkaitan erat dengan kondisi dan potensi sekitar daerah Ibu Kota yang tidak begitu banyak memproduksi bahan ekspor (Lombard, 1986:88).

Di samping mengambil posisi sebagai interport dari komoditi ekspor, kota Bandar Aceh Darussalam memerlukan berbagai komoditi impor yang dibutuhkan bagi keperluan penduduk. Mata perdagangan yang diperdagangkan ke Bandar Aceh Darussalam itu terdiri dari antara lain beras, tembakau, opium, kain, dan bahan tembikar (Lombard, 1986:89). Adapun pelaku yang terlibat dalam perdagangan internasional itu terdiri dari pedagang keliling dan pedagang lokal. Pedagang keliling umumnya berasal dari pendatang bangsa asing yang mengunjungi pelabuhan Aceh untuk memuat dan membongkar barang-barang

dagangan.

Mereka terdiri dari bangsa Eropa (Portugis, Inggris, Perancis, dan Belanda), bangsa Amerika Serikat, bangsa India (Keling, Malabar Gujarat), bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Persia, bangsa Birma (Pegu), bangsa Cina dan pedagang dari Nusantara (Malaka dan Jawa). Pedagang lokal pada umumnya terdiri atas kaum bangsawan atau orang kaya.

Pasar yang terdapat di dalam kota Bandar Aceh Darussalam lebih bersifat konkret, artinya produsen dan konsumen melakukan transaksi di tempat-tempat itu. Keuntungan pertama yang diperoleh para Sultan dalam pemusatan perniagaan di ibu kota adalah penarikan bea cukai terhadap barang niaga yang keluar masuk pelabuhan.

Sejak bagian kedua abad ke-17, posisi ibu kota Bandar Aceh Darussalam semakin berkurang. Hal ini bersamaan dengan kemerosotan Kesultanan di pantai Barat Aceh dan pantai Utara Aceh muncul sebagai daerah penghasil lada yang cukup besar. Sultan tidak dapat berbuat banyak terhadap kota-kota pelabuhan baru, seperti Idi, Susoh, Kuala Batu, Lhokseumawe yang bermunculan sebagai akibat dari penanaman lada dan pinang. Kondisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang pejabat Inggris yang lama sekali tinggal di Bengkulu sejak 1770, bahwa pedagang-pedagang asing berhubungan langsung dengan pelabuhan yang terdapat di pantai Barat dan Utara untuk memuat dan membongkar barang-barang niaga (Marsden, 1975:397). Kondisi ini berlangsung hingga abad ke-19. Oleh karena itu banyak pengusaha lokal di daerah pelabuhan seperti Leube Dappa di Susoh dan Kuala Batu, dan Tuanku Pakeh di Pidie, Tuanku Muda Nyak Malem di Simpang Ulim dan Teuku Paya di Lambada, muncul sebagai pengusaha kaya dari hasil kegiatan dagang yang mereka lakukan.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa sebab utama kemerosotan posisi pusat Kesultanan Aceh dalam perniagaan internasional adalah kemerosotan kekuasaan Sultan untuk mengontrol jalur perdagangan tersebut. Kemerosotan itu bersumber bukan hanya pada pergulatan

dengan imprealis Barat yang telah berada di kawasan barat Indonesia, akan tetapi juga pada pergulatan internal dalam istana antara para pewaris tahta sebagai mana terlihat pada suatu perang suksesi sejak akhir abad ke-17. Karena itu Sultan telah memberi konsesi perdagangan kepada bawahannya yang telah mendukung untuk menduduki jabatan Kesultanan (Langen, 1926:426-434).

Setelah Belanda berhasil merebut kota Bandar Aceh Darussalam dari tangan Kesultanan pada tahun 1874, pemerintah Kolonial mulai mengambil alih kegiatan perdagangan dengan menerima penanaman modal dari perusahaan-perusahaan asing dan perusahaan Belanda sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Hindia Belanda menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk menghidupkan kembali sarana perdagangan internasional. Langkah pertama adalah pembangunan pelabuhan sebagai pintu gerbang kota Kutaraja, pembangunan jalan raya dan jaringan rel kereta api pada tahun 1876, sehingga memperlancar angkutan barang dan orang antara pelabuhan Uleelheu dengan kota Kutaraja.

Pembangunan sarana transportasi dan komunikasi yang menunjang kegiatan administrasi Kolonial dan perdagangan mendapat perhatian pula, demikian juga struktur fisik ditata kembali untuk menunjang kegiatan administrasi kolonial dan perniagaan.

Pembangunan infrastruktur ekonomi yang dibarengi oleh stabilitas keamanan telah mengundang perhatian kapitalis untuk membuka usaha di Kutaraja. Pemilik NV. Deli Courant di Medan, pada tahun 1900 membuka sebuah percetakan di Kutaraja bernama NV. *Atjeh Drukkerij. Nederlandsche Handel Maatschappij* membuka cabangnya pada tahun 1902.

Demikian juga *Padang Hendel Maatscheppij* membuka cabangnya di Kutaraja dan Sabang. Kemudian berdiri sendiri dengan nama NV. *Atjehsche Handel Maatschappij* berfungsi sebagai perusahaan ekspor dan impor dengan cabang-cabangnya di Tapak Tuan, Sigli, Sabang dan Langsa. Di samping perusahaan yang telah disebut di atas, Residen Jongejans, mengemukakan bahwa pada tahun 1938 terdapat dua buah

perusahaan lain yaitu *Fa. J. Boon Jzn* dan *NV. Borsumij* yang dapat digolongkan sebagai perusahaan besar di Kutaraja. Perusahaan menengah atau kecil berada di tangan pedagang Cina dan sebagian kecil berada di tangan pribumi (Jongejans, 1937:224).

Sesuai dengan politik pasifikasi yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda, maka pada awal abad ke 20 telah cukup banyak wilayah-wilayah *Uleebalang* yang mengakui kekuasaan Belanda. Berhubung daerah ini cukup potensial dalam bidang pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian daerah Aceh. Untuk daerah ini pemerintah menempuh beberapa cara, diantaranya dengan memberi bantuan modal kepada rakyat dan *Uleebalang* yang tidak lagi melawan Belanda. Dalam hubungan ini pemerintah mendirikan bank seperti di wilayah Aceh Besar yang diberi nama *de Groot Atjehsche Afdeeling Bank*. Rakyat yang menginginkan kredit untuk memperluas kebun-kebun dan sawah-sawah mereka dapat meminjam modal dari bank tersebut tanpa dikenakan bunga (Rusdi Sufi, 1991 : 109).

Selain yang tersebut di atas Pemerintah Hindia Belanda memberi pula kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan perkebunan swasta Eropa (*ondeneminge*) menanam modalnya dalam usaha perkebunannya di Aceh, dan melakukan perbaikan dalam sistem pertanian tradisional. Pemerintah juga memperkenalkan varietas bibit yang lebih baik yang cocok untuk daerah Aceh, membangun irigasi modern, serta membentuk sebuah badan *Landbouw Voorlichtingsdienst* (dinas penyuluhan pertanian) (Rusdi Sufi, 1991 : 110).

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memperbaharui dan meningkatkan pertanian cukup berhasil terutama sekali di Aceh Utara dan Aceh Timur. Menurut catatan dari *Landbouw Voorlichtingsdienst* (dinas penyuluhan pertanian) jumlah persawahan di Aceh pada tahun 1928 adalah 130.000 Ha; Pada tahun 1932 meningkat lagi menjadi 132.000 Ha (Memorie van Overgave van Atjeh en Ondehorigheden van A.H. Philips, 31 Mei 1932 : 4647). Kemudian dalam tahun 1936 meningkat lagi menjadi 140.000 Ha (Rusdi

Sufi, 1991 : 110). Oleh karena itu daerah Aceh pada tahun 1932 telah surplus beras, dan oleh pemerintah telah diusahakan untuk diekspor ke daerah Sumatera Timur untuk konsumsi karyawan-karyawan perkebunan yang berada di sana (Deli Courant, 12 - 6 - 1933 : 2). Dalam tahun 1939 daerah Aceh telah surplus beras sebanyak 5.600 ton, sebagian besar diekspor ke Sumatera Timur. Tahun 1940 dan 1941 surplus beras ini naik lagi menjadi 24.000 dan 36.000 ton; Sedangkan pada tahun 1942 daerah Aceh telah mengekspor beras ke daerah Sumatera Timur dan Sumatera Barat sebanyak 45.000 ton (Ismail, 1994:17).

Selain berusaha meningkatkan hasil produksi bersawah yang merupakan penghasilan rakyat yang utama, pemerintah juga mengusahakan perbaikan pada usaha-usaha pertanian rakyat lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut semenjak awal abad ke-20 pemerintah telah menganjurkan kepada rakyat agar mengusahakan kembali dan meremajakan pohon-pohon kelapa, pinang dan lada pada perkebunan-perkebunan mereka. Untuk menunjang usaha ini pemerintah juga memberikan pinjaman modal kepada rakyat yang menginginkannya tanpa dikenakan bunga. Sama juga seperti halnya pada tanaman padi rakyat, untuk meningkatkan produksi lada juga diusahakan untuk memasukkan berbagai varietas bibit yang baik dari Bangka dan Lampung (Longhout, 1923:171). Pemerintah juga memberikan bantuan kredit tanpa bunga kepada rakyat yang memerlukan melalui bank-bank kecil yang khusus didirikan untuk menunjang pertanian rakyat. Di wilayah Aceh Besar dalam tahun 1916 telah didirikan 5 unit bank kecil, sedangkan di Aceh Utara (Lhokseumawe) dan Aceh Timur (Langsa) sejak tahun 1913 juga telah didirikan masing-masing satu unit. Dalam tahun 1918 jumlah bank yang didirikan telah meningkat menjadi 29 unit (Rusdi Sufi, 1991 : 111).

Usaha pemerintah untuk penanaman lada kembali cukup berhasil. Karena pada tahun 1913, 1930 dan 1924 daerah Aceh telah dapat memproduksi lada masing-masing sebanyak 3.770 ton, 2.648 ton, dan 2.754 ton (Ismail, 1994 : 19).

Dengan merosotnya harga lada di pasaran internasional, Pemerintah

Hindia Belanda berusaha meningkatkan penanaman pinang pada beberapa wilayah (Aceh Besar, Aceh Timur, dan Aceh Utara), kebun-kebun pinang semakin bertambah. Ekspor pinang Aceh dipasarkan pada pusat-pusat pemasaran pinang terkenal, Penang dan Calcutta (India). Dalam tahun 1937 eksportnya berjumlah 27.000 ton (Langhopt, 1923 : 127). Sedangkan pada tahun 1939 sekitar 25.000 ton dengan harga jual f 5 per 100 kg. Penanaman kelapa juga mendapat perhatian pemerintah. Sehubungan dengan hal ini pada awal abad ke-20, pemerintah telah menganjurkan kepada penduduk untuk meremajakan pohon-pohon kelapa pada kebun-kebun mereka. Untuk menggalakkan tanaman ini, pemerintah juga memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada mereka yang membutuhkan. Daerah yang banyak menarik perhatian untuk menanam kelapa pada mulanya daerah Aceh Besar dan Pulau Weh. Kemudian berkembang ke daerah-daerah wilayah pantai Barat Aceh, seperti Calang, Meulaboh, dan Singkel. Di tempat-tempat ini penanam kelapa dilakukan secara besar-besaran. Keseluruhan areal perkebunan kelapa di daerah Aceh meliputi 1000 Ha (Rusdi Sufi, 1991 : 112).

Kelapa setelah dijadikan kopra kebanyakan diekspor ke Penang Semenanjung Melayu dan Eropa. Ekspor kopra Aceh pada tahun 1919 berjumlah 6000 ton dan pada tahun 1920 turun menjadi 4000 ton (Langhout, 1923 : 120). Turunnya ekspor kopra ini berkaitan dengan situasi harga pada waktu itu, yang sedang mengalami kemerosotan. Dalam tahun 1939 ekspor kopra Aceh hanya mencapai 12.150 ton, dengan harga jual f 3,5 per 100 kg.

Selain mengusahakan peningkatan hasil produksi pertanian rakyat, Pemerintah Hindia Belanda juga menginginkan usaha dari pertanian budidaya. Dalam hubungan ini pemerintah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada perkebunan-perkebunan swasta Eropa yang disebut *ondernemingslandbouw*, untuk menanam modalnya dalam usaha perkebunan di Aceh. Untuk memajukannya, dalam tahun 1907 pemerintah memberikan tanah-tanah konsesi pertanian/perkebunan seluas 16.700 Ha, sedangkan konsesi untuk membuka hutan sebanyak 21 buah yang tersebar seluruh Aceh (Langhout, 1923 : 90). Untuk memperkenalkan

cara-cara perkebunan yang modern, sebagai contoh pemerintah mendirikan sebuah perkebunan karet pemerintah di Langsa (Aceh Timur).

Pada awalnya perkembangan perusahaan perkebunan swasta ini berkaitan erat dengan situasi keamanan pada masa itu. Di daerah-daerah yang relatif telah aman, usaha-usaha ini dapat berjalan lancar. Sedangkan pada daerah-daerah yang belum aman tidak dapat dilaksanakan. Daerah yang paling banyak dibuka untuk usaha ini adalah daerah pantai timur Aceh. Oleh karena itu di wilayah tersebut terdapat perusahaan-perusahaan perkebunan besar seperti : a. *De Bayan Sumatra Rubber Maatschappij*. Didirikan pada bulan Mei 1911 dengan modal f. 1000.000, luas 1700 Ha; b. *Naamloze Vennootschap Langsar Landsyndicaat*. Didirikan pada bulan Agustus 1910 dengan modal f. 500.000, luas 5.460 Ha; c. *Langsar Sumatra Rubber Maatschappij*. Didirikan pada bulan 1910 dengan modal f. 500.000, luas 5.460 Ha; d. *Langsar Sumatra Rubber Maatschappij*. Didirikan pada bulan 1910 dengan modal f. 1.500.000; e. *Rubber Cultuur Maatschappij Soengey Raya*. Didirikan pada bulan Oktober 1909 dengan modal f. 2.000.000, luas 1418 Ha; f. *Batang Ara Cultuur Mij*. Didirikan pada bulan Januari 1911, dengan modal sebanyak f. 500.000; g. *Soengey Lipoet Cultuur Maatschappij*. Didirikan pada bulan Pebruari 1908, dengan modal f. 750.000, luas 1.500 Ha; h. *Tamiang Rubber Estates Limited*. Didirikan pada bulan September 1909, dengan modal f. 120.000, luas 4.752 Ha (Rusdi Sufi, 1991 : 113)

Pada tahun 1923 terdapat sekitar 20 perkebunan, 12 diantaranya adalah kebun karet, 7 kebun kelapa sawit dan satu kebun kelapa. Selain itu terdapat juga sebuah perkebunan milik Perancis dan Belgia, *Soc Fin (Societe Financiere des Caoutchoucs)*, lokasinya di daerah Tamiang dekat perbatasan dengan Sumatera Timur. Perkebunan ini mulai dibuka pada bulan Pebruari 1908, luas 30 Ha, dan pada tahun 1922 telah berkembang menjadi 5.751 Ha, dengan jumlah pekerja sebanyak 3.600 orang. Selain diperuntukkan untuk penanaman karet, perkebunan ini juga untuk penanaman kopi dan kelapa sawit (Rusdi Sufi, 1991 : 114).

Di wilayah pantai Barat juga didirikan beberapa perkebunan karet dan kelapa sawit. Di daerah Meulaboh dan sekitarnya pada tahun 1934

terdapat 40.000 batang karet yang telah disadap getahnya (Smeets, 1934: 9 Mei 1934 : 245). Usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah ini dilaksanakan oleh *NV. Handelscreeniging Amsterdam dan Societe Financiere des Caoutschoucs*. Pada tahun 1937 areal perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut meliputi 11.325 Ha, dengan produksi 8.833 ton (Jongejans, 1937 : 188).

Setelah daerah Gayo berhasil ditaklukkan pada tahun 1908, beberapa perusahaan swasta kecil dan menengah mulai melakukan penanaman kopi di daerah itu. Lokasi penanaman kopi yang terkenal di daerah ini adalah lampahan dengan areal tanah yang ditanami lebih kurang 100 Ha, dan jumlah produksi sebanyak 75 ton pertahun. Produksi ini terus meningkat menjadi 225 ton. Pada tahun 1937 produksi perkebunan daerah Gayo meningkat menjadi 589 ton dari lusa areal 2.400 Ha (Ismail, 1994 : 15). Daerah Alas yang tanahnya juga cocok untuk membuka perkebunan kopi telah dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan dengan menanamkan kopi robusta. Hasil kopi dari seluruh Aceh terutama dipergunakan untuk konsumsi daerah Sumatera dan selebihnya diekspor ke Eropa. Selain kopi di daerah Gayo juga diusahakan pohon tusam dengan luas areal mencapai 70.000 Ha.

Pada akhir tahun 1939 di seluruh Aceh terdapat sebanyak 133 buah usaha perkebunan budidaya, dengan luas masing-masing 200 Ha. Luas areal tanah yang ditanami menurut jenis diantaranya, karet 34.060 Ha., kelapa sawit 11.325 Ha., kopi 2.745., teh 850., dan pohon tusam 70.000 Ha.

Ditemukan sumber minyak bumi di wilayah pantai Timur dan pantai Utara Aceh menyebabkan daerah-daerah itu dibuka untuk kegiatan pertambangan. Pemboran pertama dimulai di daerah Peureulak pada tahun 1900 dan pada tahun 1903 masing-masing di daerah Langsa, Peudawa, Idi, Julok Rayek dan Cunda (Jongejans, 1937:201). Oleh karena itu di daerah daerah tersebut muncul beberapa maskapai perminyakan seperti *Holand Peureulak Maatschappij*, *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), *Peureulak Petroleum Maatschappij* (PPM), *Petroleum Mij Zuid Peureulak* dan *Nederland Koningklijk*,

Petroleum Maatschappij (NKPM). Diantara maskapai yang paling banyak melakukan kegiatan adalah *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)*. Maskapai ini mendapat konsesi terbanyak meliputi beberapa petak wilayah, yaitu petak Aceh Timur, Petak Tamiang, Petak Aceh Utara, Petak Jambo Aye. Konsesi ini diperoleh dari Gubernur Jenderal pada tahun 1927. Karena majunya usaha usaha yang dilakukan BPM, pada bulan September 1930 mendapat lagi tambahan konsesi yang diberikan oleh Gubernur Aceh dan daerah-daerah takluknya (Ismail, 1991 : 143).

Penunjukan daerah konsesi BPM seperti yang tersebut di atas terutama Petak Temiang membawa keuntungan yang besar karena daerah itu merupakan pusat minyak bumi dengan sumur Rantau yang merupakan sumur paling produktif di seluruh kepulauan Indonesia dengan produksi rata-rata perhari 1.700 ton (Jongejan, 1937 : 121).

Meskipun banyak izin yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda kepada berbagai perusahaan untuk melakukan pertambangan minyak, ternyata Rantau inilah yang amat memberikan hasil yang memuaskan. Keberhasilan itu juga didasarkan pada kenyataan bahwa jika sumur minyak lain di Indonesia kedalaman penggalian paling kurang harus mencapai 600 meter, baru dapat menghasilkan minyak, sedangkan di Rantau hanya pada kedalaman 350 meter, sudah dapat diproduksi sebagaimana mestinya (KH de Boer. Bestuurs Memorie Teven Memorie van Overgave van Tamiang. 1 Nopember 1933).

Ada pun jumlah produksi minyak BPM di daerah Tamiang dan Langsa pada tahun 1929 sebanyak 61.698 M3; dan pada tahun 1933 sebanyak 727.267 M3. Semua minyak yang dihasilkan ini, baik dari Peureulak, Langsa maupun Tamiang selanjutnya dialirkan ke tempat penyulingan di Pangkalan Brandan (wilayah Sumatra Timur) (Boersma, 1925 : 201).

Sehubungan dengan pembukaan Aceh sebagai salah satu daerah penanaman modal swasta Barat, M. Gade Ismail mengemukakan, bahwa persoalan tenaga kerja menjadi hal utama yang penting untuk dipersiapkan. Sejalan dengan politik pasifikasi, Pemerintah Hindia Belanda berusaha

agar pembukaan daerah Aceh untuk penanaman modal swasta Barat dapat dipergunakan untuk menunjang maksud tersebut. Van Dalen sebagai gubernur sipil dan militer untuk Aceh berkeinginan agar penduduk setempat dapat dijadikan tenaga kerja pada perkebunan besar. Dengan demikian ia berpendapat bahwa penduduk akan memperoleh kesempatan kerja pada berbagai perusahaan perkebunan besar (Ismail, 1991 : 206).

Keinginan Pemerintah Hindia Belanda untuk memakai penduduk setempat sebagai tenaga kerja ternyata tidak berhasil, karena penduduk yang relatif jarang di daerah ini dan mereka mempunyai sumber pendapatan yang cukup dari sektor pertanian setempat. Dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh sebagai buruh pada perkebunan, pendapatan penduduk dari sektor pertanian setempat masih jauh lebih besar. Ada pun muatan sektor pertanian lokal terdiri dari tanaman lada, padi, pinang, kelapa dan karet. Dengan demikian penduduk tidak perlu menggantungkan diri pada kesempatan kerja yang disediakan oleh penanaman modal swasta Barat (Ismail, 1994:18). Selain dari hal tersebut di atas, penduduk setempat juga memandang rendah bekerja sebagai buruh kontrak. Karena itu dapat dipahami apabila sedikit sekali orang-orang Aceh yang bekerja pada perusahaan perkebunan (Ismail, 1994 : 19).

Dari uraian di atas terlihat bahwa penduduk setempat memberikan respon negatif terhadap sektor asing, sehingga kegiatan perusahaan-perusahaan swasta Barat tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan ekonomi penduduk lokal. Masing-masing sektor berjalan secara sendiri-sendiri dan hampir tidak ada pengaruh antara satu sektor dengan sektor yang lain. Kenyataan ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh J.H. Boeke bahwa di negara yang terbelakang ekonominya, terdapat dua sistem ekonomi yang bertendensi hidup berdampingan secara permanen. Suatu sistem ekonomi setempat yang tradisional dimana kegiatan-kegiatan ekonomi didorong oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat, kehidupan keagamaan. Di samping itu ada sistem ekonomi asing yang umumnya dikenal sebagai sistem ekonomi kapitalis modern (Boeke dan Burger,

1973: 74-75).

Tahun 1942 dalam perkembangan pemerintah daerah Aceh merupakan tahun akhir kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda dan permulaan masa baru yaitu masa pendudukan tentara Jepang. Pengalihan kekuasaan itu disamping membawa perubahan besar dalam bidang politik juga menyebabkan perubahan di bidang ekonomi sebagai akibat dari peralihan kekuasaan dan kebijaksanaan ekonomi baru.

Selama pendudukan tentara Jepang, di Aceh terjadi kehancuran dalam susunan ekonomi yang telah terbentuk sebelumnya, terutama dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pegawai-pegawai Eropa yang pada masa kekuasaan Belanda adalah tenaga penggerak perusahaan-perusahaan menjadi tahanan penguasa Jepang. Kegiatan perusahaan tambang minyak bumi dan perkebunan menjadi terhenti, atau berjalan tidak sempurna lagi karena kekurangan tenaga. Semua faktor ini terjadi demikian rupa dan membawa pengaruh kepada kegairahan para petani untuk bersawah, ini membawa akibat merosotnya produksi padi di Aceh, yang pada gilirannya akan menimbulkan bahaya kelaparan (Ali, 1984 : 103).

Pada mulanya Jepang berkeinginan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian daerah Aceh dengan membentuk *Atjeh Shu Seityo* (kepala urusan ekonomi dan lalulintas daerah Aceh) dibawah pimpinan S. Mashubuti. Perangkat lembaga ini mempunyai rencana tinggi untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat Aceh. Beberapa rencana yang menjadi perhatiannya antara lain adalah bidang pengairan, perluasan areal persawahan, kerajinan dan peternakan. Semua rencana ini mempunyai maksud agar rakyat Aceh berswasembada dalam situasi masa perang (Alfian 1982 : 19).

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata rencana yang disusun itu tidak terealisasi. Pengairan dan perluasan sawah yang merupakan unsur utama perekonomian Aceh tidak banyak dibenah. Pemerintah Jepang hanya mengandalkan pengerahan tenaga rakyat bagi perbaikan irigasi. Bahkan para petani amat disibuki oleh tugas kerja rodi atau pun

membuat kubu-kubu pertahanan militer (Ali, 1984 : 51).

Pengeralahan tenaga oleh Jepang terhadap petani membawa implikasi terhadap kehidupan pertanian terutama, sawah di Aceh. Sehingga pengelolaan sawah di Aceh kurang teratur. Kondisi ini bertambah rumit dengan dibentuk badan *Shukai* atau Bagi dan Kumpul (BDK) oleh pemerintah Jepang untuk membeli dan mengutip padi dari sisa produksi petani untuk keperluan suplai militer. Badan tersebut diperkuat dengan peraturan *Sumatera Homensaiko Shikikan* (Panglima Militer Sumatera) bertanggal 25 Pebruari 1944, No. 45 yang menetapkan bahwa, mereka yang enggan menyerahkan produksi padi kepada pemerintah diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun atau denda f. 200.000,-. Dengan demikian tertutuplah kesempatan bagi rakyat untuk menjual bahan-bahan pangan secara sukarela kepada pemerintah Jepang, yang pelaksanaanya di daerah Aceh diserahkan kepada salah satu perusahaan Jepang terbesar bernama *Mitsubishi Shosen Kabu Shikikaisha* (MSK).

Tujuan Jepang semula menjadikan Sumatera sebagai sumber bahan mentah dan lapangan pasar bagi hasil-hasil industrinya tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini bertambah sulit lagi karena terbatasnya sarana transportasi. Pada pertengahan tahun 1943 semua kapal yang masih ada dipergunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Politik Jepang terpaksa mengadakan perubahan besar yang menyeluruh pada tahun 1943 kearah swasembada, mencukupi kebutuhan sendiri bukan saja bagi Sumatera sebagai satu kesatuan, tetapi pada masing-masing propinsi, bahkan pada setiap kabupaten. Perkebunan-perkebunan yang luas yang menjadi tujuan peperangan sama sekali tidak ada manfaatnya, karena tidak dapat berproduksi. Perkebunan-perkebunan terpaksa mengerahkan seluruh usahanya kepada tanaman yang menghasilkan bahan makanan untuk menghidupkan tenaga kerja (Reid, 1987 : 98).

Dari uraian di atas terlihat dengan jelas bahwa, pemerintah pendudukan Jepang lebih menitik beratkan kebijaksanaan ekonominya

kepada kebutuhan perang. Penduduk dipaksa menanam bahan makanan yang wajib diserahkan kepada penguasa Jepang. Penduduk yang pada periode sebelumnya menghasilkan padi untuk kebutuhan sendiri dan untuk dijual kepada perusahaan-perusahaan perkebunan secara bebas berubah menjadi penghasil bahan makanan untuk kebutuhan perang Jepang dengan tingkat harga yang ditetapkan secara ketat.

C. Pedagang Aceh.

Pada awal abad ke-20 Pemerintah Hindia Belanda untuk kesekian kali merubah kebijaksanaan dalam mengamankan Aceh. Karena sampai saat itu mereka belum berhasil menaklukkan Aceh. Untuk itu mereka mencoba melaksanakan suatu kebijaksanaan baru yang disebut politik pasifikasi. Suatu politik yang menunjukkan sikap damai melalui berbagai usaha yang mengacu ke arah itu. Salah satu unsur yang mencukup dalam politik pasifikasi ialah memperbaiki perekonomian rakyat. Usaha perbaikan perekonomian rakyat yang hancur akibat perang yang cukup lama, mulai dipikirkan Pemerintah Hindia Belanda di Aceh sejak Van Heutsz diangkat menjadi gubernur sipil dan militer untuk daerah Aceh, pada tahun 1898. Usaha ini selanjutnya menjadi dasar pengembangan perekonomian daerah Aceh. Tindakan-tindakan itu antara lain pembuatan peta topografi Aceh, pembangunan pelabuhan, jalan raya, jaringan rel kereta Api, dan membuka beberapa kenegerian baru untuk modal-modal swasta Barat (Rusdi Sufi, 1991 : 109).

Para pengganti Van Heustz, dimulai dari Van Daalen sampai dengan H.N.A Swart meneruskan usaha-usaha tersebut. Beberapa kebijaksanaan yang secara khusus ditujukan untuk perbaikan perekonomian rakyat di Aceh antara lain pembangunan irigasi untuk pengairan sawah sejak tahun 1905, memfungsikan *Landbouwwadviser* (petugas penyuluhan pertanian) yang bertugas memberikan penyuluhan pertanian kepada penduduk setempat, mendatangkan orang-orang Jawa untuk mendemonstrasikan cara pengerjaan sawah yang baik, memasukkan jenis-jenis bibit tanaman unggul, membuka kebun-kebun percontohan, dan mendirikan *Volkscredietbank* (bank pinjaman rakyat) (Rusdi Sufi,

1991 : 111).

Usaha pertanian rakyat berhasil dengan baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Akibat dari itu penduduk tetap bertahan pada sektornya sendiri, dan sebagian berkembang menjadi pedagang. Penduduk setempat yang berkembang sebagai pedagang pada waktu itu sebanyak enam orang adalah sebagai berikut :

Pertama, M. Yoesoef. Ia memulai usahanya dengan mengambil kredit tanpa bunga dari *de Groot Atjehche Afdeeling Bank* di Langsa untuk membuka perkebunan lada dan karet di Aceh pada tahun 1919. Usaha tersebut berhasil dengan baik, sehingga perkebunan karetnya pada tahun 1937 berkembang menjadi 40 Ha. Pada akhir tahun 1925 ia memperluas bentuk usahanya sebagai penyandang modal (*Peutuha Pangkai*) tanpa bunga kepada petani yang membutuhkan. Usaha ini mendapat respon positif dari sebagian besar penduduk, sehingga berhasil menyalurkan modal usaha kepada petani. Sebagian besar petani mempergunakan modal usaha tersebut untuk membuka usaha pertanian karet. Para petani meminjam modal diikat dengan suatu perjanjian yang tidak tertulis, yang berisi bahwa para petani harus menjual semua hasil pertanian kepada M. Yoesoef dengan harga yang berlaku di pasaran. Dari hasil penjualan tersebut ia memotong pinjaman modal dan sisanya dikembalikan sepenuhnya kepada petani. Hal ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan produksi usaha petani. Dengan sistem ini ia berhasil memperoleh pemasukan hasil pertanian secara tetap dari para petani wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Semua hasil perkebunan, baik miliknya sendiri maupun yang dibeli dari pertanian rakyat dijual secara langsung kepada *NV. Atjehsche Handel Maatschappij* cabang Langsa (Aceh Timur). Pada tahun 1927 M. Yoesoef membuka tiga unit toko, masing-masing dua unit di Langsa dan satu unit di Banda Aceh. Toko itu terdiri dari toko kain, toko kelontong dan bahan bangunan. Usaha itu mendapat kemajuan yang memuaskan. Barang dagangan toko kelontong dan toko kain pada umumnya menjadi konsumsi masyarakat, sedangkan barang dagangan di toko bahan bangunan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-

perusahaan perkebunan wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Pada tahun 1936, M. Yoesoef berhasil mengorbitkan salah satu putranya yaitu M. Djoened Yoesoef untuk memimpin usaha dagang di Kutaraja. Ia sebagai pemimpin baru, berusaha meningkatkan usaha perdagangan dengan membeli berbagai hasil pertanian rakyat dan hasil hutan dari agen-agen pengumpul dalam wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Usaha ini berkembang dengan baik, sehingga ia mampu memasukkan sebagian komoditi ekspor ke *NV. Atjehsche Handel Maatschappij* (wawancara M. Djoened Yoesoef).

Kedua, Wahi Ibrahim. Ia pada mulanya bekerja sebagai pembantu pada perusahaan kelapa *Uleebalang* Pidie, kemudian karena mempunyai bakat dagang dan kecerdasan, ia dipercayakan sebagai pengelola pengolahan dan penyalur kopra ke perusahaan dagang Belanda. Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan kopra *NV. Atjehsche Handel Maatschappij* cabang Sigli. Ia membuka jaringan pembelian kopra rakyat di seluruh wilayah Pidie.

Kemudian ia membuka tokonya sendiri dan menjadi pedagang pribumi yang berhasil, terutama sekali dalam memasukkan komoditi ekspor ke perusahaan dagang Belanda cabang Sigli, menjadi mandiri pada tahun 1935. Ada pun barang-barang yang diperdagangkan adalah kain, gula dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya wawancara (Cut Sulaiman).

Sehubungan dengan laba yang diperoleh dari hasil perdagangan itu, ia meningkatkan usahanya dengan membuka dua unit toko di Kutaraja dan di Langsa. Di Langsa ia melibatkan diri dalam pembelian karet rakyat, mendirikan kilang pengasapan karet. Usaha ini berlangsung dengan baik hingga Jepang menduduki Aceh pada bulan Maret 1942 wawancara (Cut Sulaiman).

Ketiga, Teuku Sandang. Ia merupakan salah satu keluarga *Uleebalang* yang tertarik dalam bidang dunia usaha. Kegiatan ini dimulai pada akhir abad ke-19, yaitu pada masa krisis pangan akibat berlangsungnya perang Aceh secara terus menerus.

Pada masa itu ia mendapat kepercayaan dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai salah seorang pedagang penyalur beras kepada masyarakat Aceh Besar dan sekitarnya.

Teuku Sandang berhasil mendidik salah satu putranya sebagai pedagang, yaitu Teuku Djohan Meraxa. Ia sejak tahun 1925 telah terjun dalam bidang bisnis keliling. Adapun barang-barang yang diperdagangkan adalah tekstil yang dibeli dari perusahaan grosir Belanda (*Fa. J. Boon Jzn* dan *NV. Borsumi*) wawancara (Teuku M. Daud, 13 - 11- 1994), dan produksi setempat seperti lampu dari kaleng buatan orang Tionghoa. Banyak memperoleh laba dari sini, lalu mendirikan toko di Kutaraja dan Meulaboh. Kemudian pada tahun 1934 mendirikan satu unit toko di Langsa. Sejak itu ia menjadi pedagang menetap dan berhasil memperoleh keuntungan yang besar, sehingga ia termasuk salah satu pedagang yang berpengaruh. Pada tahun 1936, ia merubah toko perwakilan di Medan menjadi toko pusat perdagangannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pertumbuhan usaha dagangnya yang semakin meningkat. Pada waktu itu ia telah menjadi pedagang yang sukses dengan karyawannya sekitar 20 orang yang tersebar di empat lokasi yang tersebut di atas wawancara (Teuku M. Daud).

Teuku Djohan juga melibatkan diri dalam pembelian dan pengolahan karet. Untuk itu ia mendirikan satu unit kilang pengasapan karet di kuala Simpang (Aceh Timur). Sejak saat itu ia mulai mengolah getah menjadi karet sheet. Karet hasil pengolahan tersebut langsung dijual ke perusahaan dagang Belanda yang berkedudukan di Medan. Sedangkan komoditi ekspor dari perwakilan lainnya disalurkan ke perusahaan dagang Belanda setempat. Demikian juga pemasukan berbagai barang ke tokonya, untuk daerah Langsa langsung dimasukkan dari kantor pusat yang berkedudukan di Medan. Sedangkan untuk daerah lain, Kutaraja dan Meulaboh barang-barang dagangan dimasukkan dari perusahaan grosir setempat wawancara (Teuku M. Daud).

Keempat, Muhammad Saman. Pada mulanya ia merupakan salah seorang karyawan toko kepunyaan orang India di Lhokseumawe, yang memperdagangkan produk-produk luar negeri. Kemudian berdasarkan

pengalaman dan larisnya barang-barang impor di pasaran, maka pada tahun 1930 ia pindah ke kota Bireun, dengan membuka satu unit toko yang memperdagangkan bahan keperluan sehari-hari. Barang-barang itu semua dipasok dari perusahaan grosir Belanda yang berkedudukan di Lhokseumawe wawancara (Ismail Saman)

Lajunya perkembangan ekspor komoditi hasil pertanian oleh perusahaan dagang Belanda, menarik perhatian Muhammad Saman untuk meningkatkan usaha perdagangannya sebagai penyalur komoditi ke perusahaan dagang Belanda. Oleh karena itu, ia pada tahun 1934 membuka sebuah toko di Takengon (Aceh Tengah) dan membeli kopi dari hasil perdagangan rakyat. Pembelian kopi ini berlangsung dengan baik karena didukung oleh modal yang mencukupi dan sarana transportasi yang memadai wawancara (Ismail Saman). Sehingga ia pada tahun 1935 berkembang menjadi salah satu pedagang pemasuk komoditi kopi ke perusahaan dagang Belanda cabang Lhokseumawe. Kemudian juga menangani berbagai jenis komoditi dari produksi pertanian dan hasil hutan, terutama sekali dari hasil produksi pertanian di Takengon. Sedangkan untuk memperoleh karet rakyat ia juga membuka perwakilan usaha dagangnya di Langsa. Usaha perdagangan yang sangat menguntungkan itu berlangsung dengan baik hingga tahun 1942 wawancara (Ismail Saman).

Kelima, Muhammad Hasan. Ia merupakan salah seorang pedagang penting dalam usaha dagang M. Djoesof. Oleh karena itu ia mendapat tugas dan hak istimewa untuk mengurus perdagangan dan pemasukan gula ke daerah Aceh. Untuk merealisasi perdagangan gula ia ditempatkan sebagai ketua perwakilan dagang di Medan (Sumatera Timur), yang pada waktu itu sebagai suatu pusat perdagangan terbesar di Sumatera. Suatu kegiatan penting yang ia lakukan di sana adalah membeli gula secara langsung pada perusahaan-perusahaan grosir gula. Pada waktu perdagangan gula di Aceh didominasi oleh pedagang-pedagang Tionghoa. Agar dapat memasuki perdagangan ini, Muhammad Hasan Menetap di Medan pada tahun 1933 untuk mengadakan hubungan dagang dengan perusahaan-perusahaan grosir gula. Usaha tersebut berhasil dengan baik,

sehingga terjadi hubungan secara langsung dengan perusahaan tempat ia bekerja. Sistem ini ditempuh karena gula melalui pedagang perantara membutuhkan waktu dan modal yang lebih tinggi, maka pemasukan secara langsung dari perusahaan pusat dapat memperoleh keuntungan lebih tinggi wawancara (Zainal Abidin). Dengan demikian ia menjadi salah seorang pengecer gula ternama di Aceh, terutama sekali di daerah Aceh Timur dan Aceh Utara. Kondisi tersebut berlangsung stabil hingga tahun 1942 wawancara (Zainal Abidin).

Keenam, Nyak Ben. Pada mulanya ia pemilik warung kopi. Kemudian sesuai dengan keuletannya pada tahun 1932 mulai meningkatkan usaha dagangnya dengan membuka satu unit toko di Kecamatan Geudong sekarang. Untuk memperoleh barang dagangannya, ia berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan grosir kain di Medan, Sumatera Timur. Setelah satu tahun menekuni usaha dagang tersebut ia berhasil memperoleh keuntungan yang memadai. Keuntungan tersebut dijadikan sebagai modal baru untuk membeli berbagai jenis hasil pertanian rakyat dan hasil hutan, seperti karet, kopra, pinang, dan rotan wawancara (Daud Ben).

Komoditi tersebut semua dipasok ke perusahaan dagang Belanda yang berkedudukan di Medan, sehingga sejak tahun 1933 ia telah menjadi sebagai salah satu pedagang pengecer dan pemasuk komoditi ekspor. Dalam perkembangan selanjutnya perdagangan hasil pertanian rakyat bertambah meningkat, maka pada tahun 1935 membuka cabang usahanya di Medan dan memindahkan pusat usaha dagangnya dari Geudong ke Kota Lhokseumawe. Di sini ia mendirikan dua unit toko baru, yaitu toko kain dan toko kelontong wawancara (Daud Ben).

Ketika menggerakkan usaha dagang di Lhokseumawe, ia mendapat tawaran bisnis ternak dari NV. *Atjehsche Handel Maatschappij* cabang Lhokseumawe. Perdagangan ternak ini khusus untuk memenuhi permintaan kebutuhan daging Malaya dan Singapura. Untuk merealisasikan usaha perdagangan tersebut, ia membuka perwakilan dagang di Bireun dan Sigli. Kedua daerah tersebut merupakan daerah

penghasil ternak kerbau liar wawancara (Daud Ben), lihat juga Piekar, 1989:42). Dalam tahun 1936 ia berhasil memasukkan sebanyak 1000 ekor kerbau dan 200 ekor lembu ke perusahaan ekspor impor yang tersebut di atas. Kemudian pada tahun 1937 dan 1938 masing-masing sejumlah 1000 ekor kerbau, sedangkan pada tahun 1939 menurun menjadi 600 ekor kerbau wawancara (Daud Ben).

BAB III

SITUASI PEMERINTAHAN DAN PEDAGANG ACEH PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

A. Pembentukan Pemerintahan

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempergunakan kesempatan itu untuk memproklamkan Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus tidak diketahui ke seluruh pelosok tanah air termasuk daerah Aceh, karena Jepang telah berusaha untuk menghalangi tersebar luasnya berita tersebut.

Menjelang diumumkannya kapitulasi, keadaan di Aceh semakin bertambah genting. Dalam saat-saat yang demikian pemerintah Jepang telah mengambil beberapa langkah kebijakan yang lebih merupakan pengamanan terhadap rakyat umum. Tentara Jepang telah menyita radio-radio penduduk, agar penduduk tidak dapat mengetahui berita-berita kekalahan Jepang dan perkembangan kemajuan sekutu di front Pasifik. Kantor-kantor berita Jepang (Domei) sejak beberapa hari sebelum penyerahan Jepang kepada sekutu diambil alih oleh orang-orang Jepang sendiri dan melarang masuk pegawai-pegawai bangsa Indonesia, agar berita kekalahan Jepang tidak sampai tersiar keluar. Demikian juga dengan mass - media lainnya bahkan satu-satunya surat kabar resmi pada waktu itu di Aceh, yaitu Aceh Sinbun juga diawasi dengan ketat (Alfian, 1982 : 24).

Dengan tindakan itu menyebabkan para pemimpin di daerah Aceh menjadi sulit dalam mengikuti perkembangan politik internasional yang sesungguhnya pada waktu itu. Hal itu juga menyebabkan hampir tidak adanya komunikasi lagi antara pemimpin-pemimpin pergerakan di suatu daerah dengan daerah-daerah lain. Kini yang diketahui pada umumnya hanya siaran-siaran resmi Pemerintah Militer Jepang, yang selalu menganjurkan agar rakyat bersatu dalam menghadapi sekutu, dan sebagai

imbalannya Jepang akan tetap memelihara keamanan di Aceh sampai tiba saatnya bangsa Indonesia menerima kemerdekaan seperti yang telah pernah dijanjikannya (Atjeh Simbun, 1944 : 1) Walaupun demikian pada saat itu terlihat perubahan sikap pada penduduk yang mulai bertindak lebih lunak lagi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 para obsir bangsa Indonesia yang tergabung dalam Gyugun, Heiho dan Hikoya Tokubetsu dikumpulkan oleh Jepang, dan pada saat itu diumumkan bahwa organisasi kemiliteran tersebut dibubarkan dan para anggota pasukan dikembalikan ke kampungnya masing-masing tanpa memberitahukan penyerahan Jepang kepada Sekutu (Biro Sejarah Prima, 1976 : 69). Demikian juga dengan berita kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat dirahasiakan oleh Jepang sehingga terlambat diketahui bangsa Indonesia di daerah daerah seperti halnya di Aceh.

Berita resmi tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia baru diketahui oleh masyarakat Aceh, yaitu setelah kembalinya Mr. T. M Hasan dan Dr. Amir dari Jakarta yang tiba di Medan pada tanggal 29 Agustus 1945. Mr. T. M. Hasan dan Dr. Amir merupakan Wakil Pemerintah Republik Indonesia dari pulau Sumatera yang mendapat perintah dari Presiden Republik Indonesia di Sumatera. Sejak saat itu proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar luas ke seluruh Sumatera, termasuk ke daerah Aceh.

Pada tanggal 27 Agustus 1945 para perwira bekas Gyugun berkumpul di Hotel Sentral Kutaraja. Pertemuan yang tidak resmi diselenggarakan secara tidak umum dan telah mengambil suatu keputusan, yaitu mengirim utusan kepada T. Nyak Arief yang terdiri dari Syamaun Gaharu, T. Hamis Azwar. Utusan tersebut bertujuan untuk memperoleh tanggapan mengenai gagasan mereka. Hal itu mendapat tanggapan positif, yaitu untuk membentuk organisasi yang dapat menampung dan mempersatukan semua bekas Gyugun dan organisasi-organisasi militer lainnya. Kegiatan itu kemudian menjadi dasar timbulnya angkatan bersenjata di Aceh.

Setelah beberapa kali melakukan pembahasan dan musyawarah kemudian diambil suatu keputusan untuk mendirikan Angkatan Pemuda

Indonesia (API) di seluruh Aceh. Pada bulan Oktober 1945 tersusunlah struktur pengurus API di Aceh, yang bermarkas di Kutaraja (Sejarah Militer Kodam, 1972 : 31).

Dengan lahirnya API di Aceh maka telah ada dasar yang kuat untuk berdirinya tentara yang resmi Republik Indonesia. Dalam proses selanjutnya sejak 1 Desember 1945 API menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) dengan komandannya Syamaun Gaharu dan T. Nyak Arief sebagai pelindungnya. Sejak 24 Januari 1946, sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat tanggal 8 Januari 1946 mengenai penggantian nama TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), TKR Aceh menjadi Divisi Sumatera. Dalam penyempurnaan selanjutnya setelah penggantian komandan pada bulan Maret 1946 dari Syamaun Gaharu kepada Husein Yusuf, TRI Aceh (Divisi V Sumatera) dijadikan Divisi Gajah I digabung dengan Divisi Gajah II (Sumatera Timur), dan pada bulan April 1947 menjadi TRI Divisi X Sumatera. Pada waktu terjadi aksi militer Belanda markasnya berkedudukan di Bireun (Aceh Utara) dengan panglima dan kepala stafnya Kolonel Husein Yusuf dan Kolonel H. Sitompul. Kemudian di Aceh dibentuk juga Angkatan Laut Daerah Aceh yang dipimpin oleh Said Usman di Kutaraja (Ali, 1984:209).

Para pemuda yang tidak tergabung ke dalam API, mendirikan organisasi perjuangan rakyat, dengan tujuan yang sama yaitu membela dan mempertahankan proklamasi. Organisasi perjuangan tersebut dipelopori oleh pemuda A. Hasymi. Sejak berita proklamasi diterima, mereka mendirikan sebuah organisasi pemuda yang bernama Barisan Pemuda Indonesia (BPI), kemudian berubah namanya menjadi Pemuda Rakyat Indonesia (PRI), yang setelah tahun 1997 diintegrasikan ke dalam Divisi Rencong dengan pimpinan umum Ali Hasymi (Sejarah Militer Kodam, 1972 : 31).

Barisan Mujahidin yang dalam perkembangannya dimasukkan ke dalam Divisi X Tgk. Chik Paya Bakong, yang dipimpin oleh Tgk. Amir Husen Almujaheed. Selain itu terdapat pula dua resimen Tentara Pelajar, yaitu Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI), dan Resimen Tentara

Pelajar Islam Indonesia (TPII), masing-masing dipimpin oleh Yahya Zamzami dan AK. Yakobi (Alfian, 1978:95).

Sejalan dengan terbentuknya pemerintah Republik Indonesia dan badan perjuangan di daerah Aceh, maka mulailah direncanakan perebutan senjata Jepang secara lebih intensif. Dalam proses perebutan senjata, langkah-langkah yang ditempuh oleh rakyat Aceh umumnya dan badan perjuangan/ketentaraan adalah pada mulanya dengan jalan diplomasi dan intimidasi; bila gagal maka usaha ini diikuti dengan tindakan kekerasan. Dengan demikian terjadi perebutan senjata Jepang selalu terjadi di kota-kota/tempat-tempat tentara Jepang ditempatkan (Talsya, 1979:10).

Dengan bermodalkan sebagian senjata-senjata dari Jepang dan semangat juang yang tinggi, para pemuda di Aceh berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, menghadapi serangan Belanda yang berusaha kembali menjajah Indonesia. Usaha Belanda tersebut dilaksanakannya dengan melakukan agresi ataupun mendirikan negara boneka yang memisahkan diri dengan Indonesia dan bernaung di bawah pemerintah Netherlands Civil Administration (NICA), di bawah pimpinan Dr. AJ. Van Mook. Di Sumatera Timur Belanda berhasil membentuk negara Sumatera Timur, di bawah pimpinan Dr. T. Mansur sebagai wali negara. Sedangkan terhadap rakyat Aceh, usaha Belanda tersebut tidak berhasil karena rakyat Aceh tetap tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia.

Keadaan Indonesia pada waktu itu menurut Presiden Sukarno tinggal sebesar payung lagi, Aceh yang dinamakan daerah modal menjadi perhatian baru di mata Belanda. Belanda menawarkan negara Aceh yang berdiri sendiri dan kemudian akan menjadi bagian dari negara federal yang akan dibentuk. Usaha untuk mempengaruhi pemimpin Aceh ditempuh oleh Belanda melalui perantara Dr. T. Mansur wali negara Sumatera Timur (Ismuha, 1976:75). Tawaran politik dan kekuasaan dari pihak Belanda tidak menggoyahkan kesetiaan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh kepada Republik Indonesia. Hal itu terlihat dari jawabannya, yaitu :

Tidak ada perasaan kedaerahan di Aceh, jadi kami tidak mempunyai niat untuk mendirikan negara Aceh Besar karena kami berjiwa republiken . . .

Kesetiaan rakyat Aceh kepada Republik Indonesia tidak berpura-pura dan tidak pula dibikin-bikin, tapi tulus dan ikhlas, yang timbul dari komitmen yang sejati yang dirasakan dalam hati dan dari perhitungan dan pertimbangan yang kuat. Rakyat Aceh yakin bahwa kemerdekaan sendiri-sendiri, daerah demi daerah, negara demi negara, tidak akan pernah dapat mencapai kemerdekaan abadi

Dengan demikian tawaran Belanda tersebut di atas ditolak total oleh Gubernur Militer Aceh, sehingga daerah Aceh tetap menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, yang sangat dibutuhkan baik dalam perjuangan fisik maupun diplomasi.

Di samping kegiatan para pemuda dan barisan-barisan kelasykaran untuk merealisasi pemerintah Republik Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Ketetapan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 19 Agustus 1945 wilayah Sumatera Utara. Kemudian diangkat Mr. T. M. Hasan sebagai Gubernur dengan berkedudukan di Medan. Sedangkan Aceh ditetapkan sebagai salah satu Keresidenan dalam Propinsi Sumatera Utara, dengan Residennya yang pertama Teuku Nyak Arief dan wakilnya TM. Ali Panglima Polem (Morris, 1990:106).

Sebelum dikeluarkan pengumuman resmi Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, oleh pemimpin rakyat Aceh di daerah Aceh telah diambil berbagai kebijakan dan tindakan guna pembentukan pemerintah di daerahnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa keluarnya pengumuman Gubernur Sumatera tanggal 3 Oktober 1945 itu hanya merupakan pengesahan saja atas kebijaksanaan yang telah diambil di Aceh. Jelas 3 Oktober merupakan tanggal terbentuk dan bergeraknya pemerintah Republik Indonesia yang difinitif di Aceh (Biro Sejarah Prima, 1976:70).

Dalam pada itu Teuku Nyak Arief telah membentuk Komite Nasional Daerah Aceh yang diketuainya sendiri, dibantu oleh Tuanku Mahmud sebagai wakilnya dan beberapa orang staf harian. Pembentukan

itu dimaksudkan untuk membantu Residen dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Untuk mengelola berbagai kegiatan pemerintah di daerah daerah di samping adanya setiap kepala daerah yang menjalankan administrasi pemerintahan dibentuk pula suatu perwakilan daerah yang dinamakan Komite Nasional Daerah. Dalam Komite Nasional Daerah Aceh pada waktu itu telah duduk wakil-wakil rakyat dari berbagai golongan, termasuk wakil golongan Tionghoa, yaitu Goh Mo Wan, dengan menempatkan berbagai wakil golongan masyarakat, maka saluran untuk menyalurkan ide-ide mereka telah tertampung.

Selain dari Komite Nasional Daerah yang diketuai oleh Tuanku Mahmud itu juga dibentuk suatu badan yang disebut Badan Eksikatif yang terdiri dari anggota-anggota Komite Nasional Daerah. Badan Eksikatif yang diketuai Residen merupakan pembantu Residen dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari (Insider, 1950:34).

Residen Teuku Nyak Arief hanya memegang jabatan selama empat bulan, namun gagasan pokok yang diajukan di atas secara relatif berhasil dengan baik. Pada waktu meletakkan jabatan, dasar-dasar yang permanen telah terwujud, sehingga penggantinya akan terus melaksanakan gagasan dari program yang telah dirumuskan serta dibina kearah yang lebih sempurna. Penyempurnaan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut dilaksanakan oleh pengganti Teuku Nyak Arief, yaitu Teuku Daoed Syah.

Pada saat itu kelompok politik di Aceh mempunyai orientasi tertentu. Hal itu terlihat dalam memberikan tanggapan dan penafsiran terhadap proklamasi kemerdekaan. Karena itu konstelasi politik sesudah proklamasi dan selama perang kemerdekaan di Aceh merupakan refleksi dari interaksi yang berlangsung antara masing-masing kelompok tersebut (Hasymi, 1985:153).

Di pihak lain kelompok elit bangsawan yang masih tetap meneruskan tradisi pemerintah lokal seperti yang telah disebutkan di atas, pada mulanya tidak bermaksud membentuk pasukan militer.

Keadaan demikian karena mereka sudah cukup puas dengan membina API yang dibentuk oleh para pemuda bekas Gyugun pada bulan Oktober 1945. Kemungkinan lain karena beranggapan dengan lahirnya lembaga militer resmi itu jaminan keamanan di Aceh akan terpelihara, termasuk jaminan keamanan bagi mereka yang masih tetap berada dalam struktur pemerintah pada waktu itu. Tetapi pembentukan lasykar-lasykar yang merupakan tentara bayangan di samping API menimbulkan perasaan curiga dikalangan sebagian kelompok Uleebalang, terutama di daerah Pidie. Kecurigaan dapat dipahami bila dihubungkan dengan hubungan yang berlangsung antara pemimpin kelasykaran dengan pengurus Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang berkedudukan di Pidie, tambahan lagi kekuatan API yang belum begitu tangguh dalam memperlihatkan hubungan kerja sama yang baik dengan badan badan kelasykaran.

Kecurigaan itu pada tingkat tertentu membawa konflik seperti yang telah terjadi antara Asisten Residen Pidie dengan satuan lasykar BPI pada waktu upacara pengibaran bendera Merah Putih di Sigli, demikian juga halnya dengan peristiwa yang sama antara satuan lasykar BPI dengan Uleebalang Cumbok di Lammeulo.

Kedua insiden tersebut di atas, menimbulkan reaksi luas dalam kalangan ulama dan kelasykaran yang mereka tafsirkan sebagai perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Para Uleebalang di Pidie sebaliknya merasa dirinya terancam oleh reaksi keras pihak elit ulama dan kelasykaran. Pada tahap ini kemungkinan untuk meletus konflik bersenjata semakin terbuka, sementara pemerintah Republik Indonesia belum mampu membendung, berhubung aparatnya masih lemah.

Usaha Belanda mencari sekutu-sekutunya dengan memecah belah kesatuan sesama bangsa Indonesia, di daerah Aceh telah melahirkan suatu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Cumbok, yang digerakkan oleh beberapa Uleebalang yang berdomisili di daerah Lammeulo.

Para Uleebalang diduga mempunyai hubungan yang erat dengan kaum bangsawan di Sumatera Timur yang membentuk Komite van

Ontvangst untuk menyambut kedatangan Belanda (Kementrian Penerangan RI, 1953:63 - 64). Dengan kembali kekuasaan Belanda mereka mengharapkan akan memperoleh kembali kekuasaan seperti pada masa sebelum pendudukan Jepang dahulu. Kedudukan tersebut pada masa Jepang telah banyak beralih ketangan elit ulama yang tergabung di dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Untuk mewujudkan maksud tersebut, mereka membentuk suatu organisasi yang bernama: Markas Uleebalang dan membentuk tentara dengan Barisan Penjaga Keamanan (BPK) di bawah pimpinan Teuku Daud Cumbok, yang terdiri dari tiga kelompok yaitu Barisan Cap Bintang; Barisan Cap Sauh; dan Barisan Cap Tombak (El Ibrahimy, 1986:92).

Sejak bulan Nopember 1945 tentara Uleebalang ini berusaha memperoleh senjata dari tangan Jepang yang masih berada di Sigli, dan melakukan tindakan-tindakan liar, seperti perampasan perampasan, penangkapan-penangkapan, serta pembunuhan-pembunuhan terhadap setiap orang yang menurut mereka memihak kepada ulama.

Atas tindakan yang dijalankan oleh para Uleebalang ini, menimbulkan reaksi spontan dari rakyat. Tidak lama setelah kota Sigli diduduki oleh para Uleebalang, maka kaum ulama dapat pula menggerakkan massa rakyat, yang berasal dari sekitar kota Sigli dengan maksud untuk mencegah jatuhnya senjata Jepang kepada Uleebalang (Amin, 1978:134).

Pertentangan diantara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan lagi. Pemerintah daerah mengirimkan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dari Kutaraja. Pertempuran di Kota Sigli dapat dihindari, tetapi pertempuran di luar kota terus berlangsung dan menjalar ke beberapa daerah lainnya yang menimbulkan korban jiwa. Untuk menghentikan pertempuran ini pada 21 Desember 1945, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemimpin TKR membentuk Markas Besar Rakyat Umum, yang terdiri dari TKR, polisi barisan-barisan perjuangan rakyat dan organisasi-organisasi massa lainnya untuk melawan tindakan kaum Uleebalang (Insider, 1950 : 11-12).

Pemerintah daerah pada tanggal 8 Januari 1946 dalam maklumatnya mengeluarkan pernyataan bahwa kaum Uleebalang yang terpusat di Cumbok dan di tempat-tempat lainnya yang mengangkat senjata dan mengadakan perlawanan terhadap rakyat umum, dinyatakan sebagai pengkhianat dan musuh negara Republik Indonesia. Atas kerja sama pemerintah dengan rakyat kekuatan para Uleebalang di Lammeulo dapat dipatahkan setelah melalui pertumpahan darah (Amin, tanpa tahun penerbitan : 13).

Sejak pertengahan Januari 1946 diangkatlah Teuku Daud Syah sebagai Residen Aceh kedua yang juga merangkap sebagai ketua Komite Nasional Daerah, sedangkan sebagai wakil ketua adalah S.M. Amin.

Pemerintahan yang dijalankan oleh Residen Teuku Daud Syah berjalan sampai bulan Mei 1948 dengan tidak begitu banyak kegiatan, karena sejak Agustus 1947, bentuk pemerintahan di Aceh mengalami perubahan lagi. Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden No. 3/ WKP/SUM/47, tanggal 26 Agustus 1947 ditetapkanlah daerah-daerah Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Tanah Karo menjadi satu Daerah Militer Istimewa dan mengangkat Tgk. Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer di daerah tersebut dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler (Sejarah Militer Kodam, 1972:124). Perubahan bentuk pemerintahan di Aceh ini adalah sejalan dengan usaha untuk menyusun pertahanan yang kokoh dalam usaha mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia dari Agresi Belanda.

Daerah Aceh merupakan salah satu wilayah Republik Indonesia yang tidak dapat diduduki kembali oleh Belanda dalam masa perang kemerdekaan, sedangkan daerah lain pada umumnya telah dapat dikuasai Belanda setelah agresi pertama dan kedua.

Masyarakat Aceh menghadapi agresi Belanda dengan kebulatan tekad dan persatuan yang teguh untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan. Segala perselisihan paham yang telah ada sebelumnya diantara kedua golongan masyarakat, seolah-olah padam sama sekali, setiap perhatian dan pikiran ditujukan kearah membina pertahanan

negara. Karena itu seluruh daerah Aceh diliputi oleh suasana perang (Amin, 1978:41).-

Pembentukan daerah Aceh sebagai Daerah Militer Istimewa telah berhasil menghentikan usaha Belanda. Sebenarnya setelah pembentukan Daerah Militer Istimewa, bentuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengalami perubahan lagi, berdasarkan undang-undang pokok tentang Pemerintah Daerah, yaitu Undang-undang No. 22/1948 dan Undang-undang tentang Pemerintahan No. 10 tahun 1948, yang menetapkan bahwa daerah Sumatera dibagi menjadi 3 propinsi, yaitu Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah, dan Propinsi Sumatera Selatan.

Propinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli. Berhubung keadaan belum terjamin keamanannya, maka ketetapan tersebut. Segala pertanggung jawaban pemerintah sipil dan militer dibebankan kepada Gubernur Militer. Sedangkan Gubernur Sumatera Utara hanyalah merupakan Komisaris Daerah yang bertugas untuk mengadakan pengawasan dan memberi tuntunan terhadap jalannya pemerintah. Kekuasaan yang diberikan kepada Gubernur Militer ini diperkuat lagi berdasarkan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), No. 21/Pem/PDRI, tanggal 16 Mei 1948 dan keputusan No. 22/Pem/PDRI, tanggal 17 Mei 1949, yang melimpahkan kekuasaan sipil dan militer ketangan Gubernur Militer (Ali, 1984:328, lihat juga Talsya, buku III, 1990 : 104).

Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera, adalah berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1948 yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan wakil presiden Muhammad Hatta. Pada saat terjadi agresi militer Belanda II yang memberi mandat kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera dengan berkedudukan di Bukit Tinggi. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1949 tentang kedudukan dan kekuasaan wakil Perdana Menteri yang berkedudukan di Sumatera, tertanggal 30 September 1949 diangkatlah Mr. Syarifuddin Prawiranegara Wakil Perdana Menteri, guna melancarkan roda

pemerintahan. Pusat pemerintahan di Sumatera ini dipindahkan ke Kutaraja sejak Bukit Tinggi jatuh ke tangan Belanda pada agresi ke dua (Insider, 1950:52).

Pada masa pemerintahan Wakil Perdana Menteri ini, bentuk pemerintahan di Sumatera Utara dan Aceh mengalami perubahan lagi. Berdasarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah Nomor : 8/Des/WKPM tahun 1949, Propinsi Sumatera Utara dipecah menjadi dua propinsi yaitu : Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Timur yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1950 (Amin, buku I, tanpa angka tahun : 279).

Sebagai Gubernur Aceh diangkat Tgk. M. Daud Beureueh.

Pembagian Propinsi Sumatera Utara, atas propinsi Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur telah menimbulkan masalah dari berbagai pihak. Untuk mengatasi masalah Propinsi Aceh, Pemerintah mengeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tanggal 14 Agustus 1950, yang memutuskan mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tahun 1949, tentang pembentukan Propinsi Aceh sebagaimana tersebut di atas, dan menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur (Talsya, 1990:29). Pada tanggal 23 Januari 1951 dilaksanakan serah terima jabatan Gubernur Aceh dari Tgk. Muhammad Daud Beureueh kepada Perdana Menteri Muhammad Natsir.

Dengan terlaksananya penyerahan jabatan dan tanggung jawab yang tersebut di atas, maka kesulitan yang dihadapi Pemerintah Pusat dalam masalah penggabungan daerah Aceh ke dalam Propinsi Sumatera Utara telah dapat diatasi. Dengan demikian PP. No. 21 tahun 1950 tentang pembentukan 10 Daerah Propinsi dapat dijalankan. Daerah Aceh sejak saat itu kembali menjadi salah satu Keresidenan dalam Propinsi Sumatera Utara. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan ekses yang lebih besar lagi, seperti terbukti dengan terjadinya Peristiwa Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indone-

sia (DI/TII) (Sjamsuddin, 1990:84-102).

B. Keadaan Sosial Ekonomi

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah mengalami berbagai masalah. Salah satunya adalah bidang sosial ekonomi masyarakat. Pendudukan Jepang berakhir dengan meninggalkan bangsa Indonesia dalam kemiskinan. Hal ini muncul akibat pemerasan dan tekanan-tekanan yang dilaksanakan Jepang selama menduduki Indonesia. Jepang tidak memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk memproduksi dengan sempurna. Hampir seluruh rakyat Indonesia diwajibkan kerja rodi (romusa) pada proyek-proyek pembangunan Jepang, sehingga sebagian besar lapangan produksi terbengkalai, seperti areal pertanian. Kemiskinan rakyat yang ditinggalkan Jepang ini, bertambah rumit lagi dengan kembalinya para tawanan dan bekas romusa ke kota-kota tanpa pekerjaan. Lapangan kerja di awal kemerdekaan sempit sekali. Di samping itu sebagian besar penduduk terlibat dalam usaha mencegah masuknya kembali Belanda, dengan berangkat ke Medan Area menyebabkan berkurangnya tenaga yang produktif di bidang pertanian (Alfian, 1982: 17-18).

Dalam masa Revolusi Fisik ini, di daerah Aceh dibanjiri pula oleh para pengungsi dari Sumatera Timur. Aceh Timur sebagai daerah batas dengan Sumatera Timur menjadi tempat utama penampungan para pengungsi, kemudian baru disalurkan keseluruh daerah Aceh. Para pengungsi diperlakukan seperti keluarga sendiri dengan memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan seperti perumahan, bahan pangan, dan lahan pertanian. Sedangkan mereka yang mempunyai keahlian khusus ataupun sebagai pegawai negeri, langsung direkrut dan ditempatkan pada instansi pemerintah dan swasta (Hussein, 1984:417). Sama halnya dengan sektor setempat, sektor asing juga mengalami staknasi pada awal kemerdekaan. Banyak perkebunan besar tidak berkembang sebagaimana mestinya pada masa pendudukan Jepang. Pada masa itu juga terjadi pengurangan areal perkebunan karena penduduk yang bekerja sebagai buruh-buruh perkebunan menanam bahan makanan

pada perkebunan-perkebunan sendiri.

Pada awal kemerdekaan keadaan perkebunan itu tidak sepenuhnya dapat dioperasikan secara optimal. Karena itu hasil yang diperoleh pun menjadi tidak maksimal pula. Walaupun demikian hasil dari perkebunan ini terutama karet menjadi sumber pemasukan utama daerah Aceh (Alfian, 1982:136), seperti hasil sewa tanah perkebunan di Aceh Timur pada tahun 1947 mendapat pemasukan sebanyak f. 19.800,- (ARNAS. DEP. ACEH. DOC. 1945 - 1949 No. 12).

Menghadapi keadaan perekonomian rakyat yang hancur itu, pemerintah daerah di Aceh berusaha meningkatkan produksi pertanian, terutama dengan memperluas areal persawahan. Tanah-tanah yang kosong diusahakan kembali untuk dijadikan sawah, kebun, dan ladang. Sehingga daerah Aceh pada waktu itu dapat meningkatkan produksi pertanian, dan untuk menutupi kekurangan bahan pangan di daerah tersebut. Usaha-usaha lain yang ditempuh Pemerintah Daerah Aceh yaitu dengan pengaturan pembawaan barang-barang perniagaan keluarga Aceh. Pengaturan ini diatur dengan Peraturan Daerah Aceh No. 1 N.K. tanggal 21 Januari 1946, Berdasarkan peraturan itu bahan-bahan makanan seperti padi, beras dan kebutuhan pokok lainnya dilarang dibawa ke luar Aceh (ARNAS DEP. ACEH. DOC. 1945 - 1949 No. 7).

Pada bulan Oktober 1946 Residen Aceh T.M. Daud Syah juga mengeluarkan maklumat yang melarang penduduk atau para pedagang di Aceh menumpuk barang-barang makanan pokok di gudang-gudang. Barang-barang tersebut harus diperdagangkan secara terbuka. Maklumat ini dimaksudkan untuk menghindari para spekulasi mengambil keuntungan besar dalam masa yang sulit itu (ARNAS DEP. ACEH. DOC. 1945 - 1949 NO. 7). Peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Aceh, sehingga antara pedagang dan pemerintah sama-sama menguntungkan. Selain dari itu kebutuhan hidup sehari-hari tersedia dengan stabil, dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Pengaturan mengenai pelarangan membawa barang-barang makanan yang ditetapkan pada tahun 1946 mengalami beberapa perubahan

pada tahun 1947; yaitu dengan ketetapan tanggal 21 Juli 1947. Perubahan itu mengenai diperbolehnya ternak dari Aceh dimasukkan ke Sumatera Timur (ARNAS. DEP. ACEH. DOC. 1946-1949 No. 8).

Di samping itu untuk mengatasi kekurangan barang-barang impor akibat blokade Belanda diusahakan mengadakan perdagangan ke daerah Semenanjung Melayu dengan menembus blokade Belanda. Dalam usaha itu besar sekali jasa Mayor Jonh lie dari Angkatan laut Republik Indonesia dan para pedagang Aceh (ARNAS DEP ACEH DOC. 1946-1949 No. 8).

Untuk memajukan perdagangan dengan luar negeri Pemerintah Aceh mengeluarkan ketentuan tentang perdagangan dengan luar negeri yang memperhatikan keseimbangan ekonomi rakyat dan memberikan keuntungan kepada pemerintah (Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953:532).

Dalam bidang keuangan, hingga tahun 1946 Pemerintah belum memiliki mata uang sendiri, dan sebagai alat pembayar masih mempergunakan uang Jepang. Oleh Belanda mata uang palsu dicetak dengan sebanyak-banyaknya dan disebar dalam masyarakat, sehingga menimbulkan inflasi. Untuk kelancaran transaksi ekonomi dan untuk mengatasi kesulitan keuangan tersebut di atas pada akhir tahun 1946, telah mendorong pemerintah untuk mencetak uang sebagai alat pembeli yang sah. Untuk daerah Sumatera Utara uang yang berlaku adalah Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (ORIPS). Selain dari itu juga didirikan bank-bank untuk mengatur peredaran uang (Amin, 1978:107). Di daerah Aceh pada tanggal 11 Maret 1946 didirikan Bank Dagang Nasional Indonesia cabang Kutaraja. Perkembangan nilai uang dalam wilayah Propinsi Sumatera, masing-masing setelah mencetak uang yang berlaku untuk daerahnya menurun. Sehingga barang-barang keperluan sehari-hari sulit diperoleh di pasar. Berhubung Pemerintah Daerah dalam wilayah Sumatera masing-masing telah mencetak uang, maka uang yang tersebar pada waktu itu adalah : Oeang Republik Indonesia Kabupaten Asahan (ORIKA), Oeang Republik Indonesia Sumatera Timur (ORIST),

Oeang Republik Indonesia Tapanuli (ORITAP), dan Oeang Republik Indonesia Bagian Aceh (ORIBA) (Natasuwarna, KITLV:1-1086 - N I:18).

Pencetakan uang tersebut telah disetujui oleh Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh dalam nilai Rp. 2,50,- Rp. 1,- dan Rp. 0,50,- uang yang dicetak pada percetakan negara itu diawasi oleh sebuah badan yang terdiri dari M. Isa (Kepala Kepolisian Daerah Aceh) sebagai ketua dan anggotanya terdiri dari Komandan Divisi Rencong, yaitu Nyak Neh, Komandan Divisi Tgk. Chik Di Tiro yaitu Cek Mat Rahmani dan Direktur Bank Pesindo, yaitu Sarono. Sejak Proklamasi kemerdekaan sampai dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, di daerah Aceh telah beredar mata uang yaitu, Uang Jepang, Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (URIPS), dan Uang Republik Indonesia Baru (URIBA). Sedangkan uang yang dicetak Oleh Pemerintah Pusat tidak beredar di daerah Aceh (Talsya, buku II, 1990:171).

Situasi ekonomi dalam revolusi fisik mengalami berbagai kesukaran. Pemerintah Pusat tidak dapat berbuat banyak akibat agresi Belanda berbagai usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi tidak mengalami perubahan kearah kebaikan yang berarti. Belanda semakin kuat usahanya untuk menguasai kembali Indonesia, termasuk Ibu Kota Negara Yogyakarta. Pada masa revolusi fisik Pemerintah Pusat mengalami berbagai kesulitan, sehingga Ibu Kota Negara Republik Indonesia terpaksa dipindahkan ke Bukit Tinggi (Sumatera Barat). Kemudian satu-satunya daerah yang belum dikuasai oleh Belanda adalah daerah Aceh. Karena itu aktivitas ekonomi tetap berjalan dan tidak mengalami kemerosotan yang berarti. Kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masih berjalan normal seperti kegiatan perdagangan, pertanian, pertambangan dan aktivitas ekonomi lainnya. Sehingga kehidupan ekonomi masyarakat selain dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, juga dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh daerah-daerah lain sesuai dengan tuntutan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.

C. Perkembangan Pedagang Aceh

Tumbuh dan berkembangnya Pedagang Aceh pada masa perang kemerdekaan dimungkinkan oleh keadaan pada masa itu, seperti orang yang dulunya bekerja sama dengan Belanda telah memiliki pengalaman dalam berusaha. Walaupun sebagian besar orang Aceh ikut serta dalam peperangan melawan penjajah, namun masih ada sebagian kecil terus berdagang, kembali ke perkebunan lada dan karet.

Dalam masa kemerdekaan telah timbul kesadaran bahwa perekonomian pada umumnya dan perdagangan pada khususnya sebaiknya dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Untuk itu dalam bidang perdagangan telah tumbuh beberapa perusahaan, yang terdiri dari NV. INDOCOLIM (Indonesia Company Limited), NV. PERMAI (Perdagangan Masyarakat Indonesia), NV. Meraxa Trading Company, Firma Puspa, NV. PIM (Perdagangan Indonesia Muda), PT. PERSIG (Persatuan Saudagar Geudong) dan PT. ARCO (Aceh Rubber Company) wawancara (Zainal Abidin), Perusahaan-perusahaan tersebut berkembang menjadi perusahaan ekspor impor, sehingga pada tahun sekitar 1940-an - 1950-an perdagangan dibidang ekspor dan impor 85 % berada di tangan pengusaha Aceh. Oleh karena itu sebagian besar produksi perkebunan pemerintah dan pertanian rakyat, serta kebutuhan barang-barang impor ditangani oleh Pedagang Aceh. Para pengusaha pada umumnya tidak mempunyai modal usaha, khususnya dalam bidang keuangan.

Karena itu untuk menguasai ataupun untuk mendapatkan komoditi ekspor hanya mengandalkan kepercayaan pemerintah dan rakyat dengan menjunjung tinggi sifat dan sikap jujur wawancara (M. Djoened Yoesoef). Kondisi tersebut berjalan stabil selama perang kemerdekaan, sehingga antara pemerintah dengan pengusaha terjadi suatu kerja sama yang cukup erat. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa, secara organisatoris pada saat itu para pengusaha Aceh telah berkembang dengan memiliki organisasi yang memadai, dengan bentuknya masih bersifat belum komersil murni (pure commercial), masih setengah bercorak politis guna mendukung perjuangan bangsa pada umumnya.

Setelah perang kemerdekaan para pengusaha Aceh masih tetap berperan dalam dinamika perekonomian daerah Aceh. Hal ini tercipta dengan adanya suatu kerja sama yang erat antara penguasa dan pengusaha melalui kebijaksanaan lesensi pemerintah dalam rangka melindungi dan mengembangkan pengusaha pribumi diawal pertumbuhannya.

Berkembangnya para pedagang Aceh pada masa perang kemerdekaan didukung oleh beberapa faktor. Pertama faktor keamanan dan kebijaksanaan pemerintah. Setelah agresi militer pertama dan kedua, Aceh adalah daerah yang masih bebas dari pendudukan kembali Belanda, kecuali Sabang karenanya menjadi tumpuan harapan untuk dapat memberi dukungan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam meneruskan cita-cita revolusi. Keadaan itu karena Aceh mempunyai potensi ekonomi dan militer yang dapat membantu negara Republik Indonesia dari rongrongan Belanda yang memaksa diri untuk menguasai Indonesia (Morris, 1983:151).

Kondisi ini juga dikemukakan oleh surat kabar *The Streit Echo* dan *The Time of Malaya* terbitan Penang, Malaya, seperti dikutip oleh surat kabar *Semangat Merdeka*, dari hasil wawancara dengan Liong Jau Hiong, Ketua Gabungan Perkumpulan Tionghoa Perantau (GPTP) Daerah Aceh yang sedang berada di Pulau Penang. Ia mengemukakan bahwa Daerah Aceh dengan jumlah penduduk 1.200.000 orang yang terdiri dari orang-orang Aceh dan orang-orang Indonesia lainnya, orang Tionghoa, India dan Arab menjalankan penghidupan dalam suasana yang aman dan saling pengertian. Ketika harga barang makan meningkat tinggi di tempat-tempat lain, di Aceh keadaannya melimpah ruah dan juga murah (Talsya, 1990 : 87).

Pemerintah di daerah ini berjalan dengan lancar sejak berpindah ke tangan republik Indonesia dan tidak ada perselisihan antara orang Tionghoa dengan orang Aceh dan lain-lainnya, perdagangan normal dan tidak sulit.

Pada waktu itu Pemerintah Pusat tunduk kepada rakyat Aceh dan membiarkan mereka memiliki otonomi yang demikian besar. Hal itu sesuai dengan kenyataan bahwa Pemerintah Pusat tidak mempunyai

kemampuan untuk menjalankan kontrol yang nyata di daerah itu dalam situasi 1945 - 1949, sementara rakyat Aceh benar-benar bebas dari pengaruh pendudukan Belanda. Kenyataan bahwa, Aceh luput dari pendudukan Belanda dalam dua aksi militer pada tahun 1947 dan 1948, sementara daerah lain termasuk ibu kota Republik Indonesia telah dikuasi Belanda, merupakan modal penting bagi pemimpin-pemimpin Republik. Dengan demikian Aceh selain menjadi markas operasi militer Republik di Sumatera, juga berfungsi sebagai sumber keuangan yang penting bagi pemerintah pusat, terutama untuk kegiatan-kegiatan di luar negeri. Berbagai kegiatan Republik di luar negeri dibiayai oleh perdagangan Aceh dengan Malaya dan melalui penjualan obligasi nasional yang sangat berhasil di Aceh (Morris, 1983 : 106-107).

Otonomi Aceh juga melayani kepentingan Pemerintah Pusat pada masa perang kemerdekaan, karena Aceh selalu memperlihatkan loyalitas dalam mendukung setiap peristiwa, sehubungan dengan kesetiaan ini, menjadi keuntungan Pemerintah Pusat untuk mempertahankan kekuasaan politik Aceh yang kuat dan bersatu, tanpa mempersoalkan siapa yang menguasai. Dengan demikian Pemerintah Pusat harus mengizinkan pemimpin-pemimpin setempat untuk mengatasi masalah mereka dengan cara mereka sendiri (Morris, 1983:107).

Khususnya dalam bidang ekonomi, Dewan Perwakilan Aceh telah mengusulkan usulan-usulan yang mengacu berkembangnya Pedagang-pedagang di Aceh. Hal ini dapat kita lihat dalam Verslag Rapat Pleno Dewan Perwakilan Aceh tanggal 30 Desember 1946, No. 6. Anggota Dewan mengusulkan "supaya pemerintah mengubah undang-undang yang memudahkan berdirinya NV dan IMA". Usulan tersebut diterima sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Aceh, karena sesuai dengan kebutuhan daerah Aceh untuk memajukan kegiatan perdagangan yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan perjuangan yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Selain dari itu undang-undang Hindia Belanda, yang berlaku dahulu dan pada zaman pendudukan Jepang terdapat syarat-syarat yang memberatkan orang-orang pribumi untuk mendirikan NV (Dewan Perwakilan Aceh, 1947:27-28).

Usulan tersebut di atas diperluas lagi dengan usulan No. 36 dan No. 37 tanggal 31 Desember 1946. Usulan No. 36 mengemukakan agar pemerintah mengirim ahli-ahli ke Malaya untuk menyelidiki ekonomi di sana. Usul ini berkenaan dengan masalah ekonomi. Sejak dahulu Malaya, Penang, dan Singapura merupakan pasar komoditi ekspor dan impor daerah Aceh. Hubungan dagang antara daerah Aceh dengan Malaya didukung oleh sarana transportasi yang memadai, karena di daerah ini tersedia motor boat dan tongkang, baik yang dimiliki oleh orang-orang Tionghoa maupun yang dimiliki oleh orang pribumi (Dewan Perwakilan Aceh, 1947:29).

Berdasarkan letak pasar perdagangan Aceh di tanah Malaya maka perlu sekali Badan Ekonomi di Sumatera mengirimkan ahli-ahli untuk menyelidiki hubungan perdagangan di Malaya. Dalam hal ini pertama sekali harus didirikan suatu konsulat supaya dapat memperhatikan keadaan pasaran yang sangat perlu untuk memajukan keadaan perekonomian. Selain Malaya sebagai pusat pemasaran, usul ini juga didorong oleh suatu kenyataan yang sedang berlangsung. Menurut pengamatan Dewan Perwakilan Aceh bahwa, barang-barang yang telah berhasil diekspor ke Malaya tidak setimpal dengan barang-barang yang diimpor ke Aceh. Dengan demikian daerah Aceh tidak mendapat keuntungan yang adil dalam perdagangan tersebut, sedangkan hal itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan daerah. Berdasarkan kenyataan tersebut usulan ini diterima sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Aceh (Dewan Perwakilan Aceh, 1947:28).

Adapun usulan No. 37 mengemukakan : agar ekspor dan impor diatur oleh Pemerintah Propinsi, supaya kemakmuran ekonomi diatur dengan cara baru dan membawa aliran baru" (Dewan Perwakilan Aceh, 1947:89). Usulan ini mengharap agar dibentuk suatu peraturan yang mengatur perniagaan dengan luar negeri. Terutama sekali Pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan supaya ekspor impor tidak hanya dijalankan oleh sekelompok kecil orang saja, tetapi harus dijalankan oleh semua orang yang mempunyai modal, pengalaman ataupun kemampuan untuk berdagang. Dengan demikian untuk kesempatan ini akan dapat

dipergunakan oleh masyarakat luas dan sekaligus akan memberikan keuntungan kepada pemerintah. Kemudian berdasarkan usulan tersebut, Kepala kemakmuran Aceh menetapkan, ekspor dan impor dipegang oleh pemerintah dengan perbandingan kapital 50% untuk pemerintah dan 50% untuk pedagang swasta (Dewan Perwakilan Aceh, 1947:69).

Dalam perkembangan selanjutnya, di daerah Aceh mengalami beberapa masalah ekonomi seperti, beredarnya uang palsu, kesenjangan produksi dengan uang yang beredar, naiknya harga barang setiap hari, berkurangnya impor barang-barang yang dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah itu dilakukan beberapa tindakan, antara lain pembentukan suatu badan yang diketuai oleh Anggota Badan Eksekutif, Teungku Muhammad Nur El Ibrahimy yang ditugaskan untuk berusaha mempertinggi produksi dalam negeri dan impor barang-barang yang diperlukan dari luar negeri wawancara (M. Nur El Ibrahimy). Kebijakan ini mendorong para pedagang untuk meningkatkan aktivitas perdagangannya baik perdagangan lokal maupun perdagangan luar negeri. Disamping itu juga munculnya pedagang-pedagang baru.

Selain dari beberapa kebijakan di atas kekosongan yang ditinggalkan oleh kapitalis Eropa, juga mendorong berkembangnya pedagang-pedagang di Aceh. Dalam hal ini para pedagang besar Aceh dengan cepat memanfaatkan posisi kosong tersebut sehingga terjadi perubahan yang amat jelas kita lihat, adalah menyangkut dengan pelaku-pelaku dalam perdagangan internasional. Bila sebelum kemerdekaan pedagang-pedagang besar dikuasai oleh kapitalis-kapitalis Eropa, posisi tersebut diganti oleh sektor swasta pribumi dan sektor pemerintah. Usaha swasta pribumi didirikan dan dikelola oleh organisasi tertentu, seperti Petraco dan Gasida, atau dibangun oleh pengusaha-pengusaha tertentu, seperti NV. Indocolim, NV. Permai, Fa. Puspa, NV. PIM, NV. Persig wawancara (M. Nur El Ibrahimy).

Usaha Pemerintah ditandai dengan berdirinya *Aceh Trading Company* (ATC). Perusahaan ini bertujuan untuk mempermudah tugas-tugas pengadaan barang-barang yang berasal dari daerah Aceh yang kemudian dijual ke luar negeri. ATC sebenarnya adalah bagian dari CTC (*Central*

Trading Company) yang berpusat di Bukit Tinggi, suatu perusahaan yang bertugas mensuplay perlengkapan tentara di Sumatera wawancara (M. Nur El Ibrahimy).

Kedua, potensi daerah. Daerah Aceh pada masa perang kemerdekaan mempunyai sejumlah potensi ekonomi yang menunjang berkembangnya para pedagang. Potensi ini pada umumnya bersumber pada sektor perkebunan, baik milik pemerintah maupun usaha pertanian rakyat. Produksi perkebunan merupakan suatu komoditi ekspor yang bernilai tinggi pada masa itu. Sumber devisa ini banyak terdapat di Kabupaten Aceh Timur (perkebunan karet, kelapa sawit dan kopra); Kabupaten Aceh Tengah (Perkebunan kopi, tusam, dan teh); Kabupaten Aceh Barat (perkebunan karet, kelapa); Kabupaten Pidie (perkebunan kopi dan kelapa); Kabupaten Aceh Besar (perkebunan kelapa), sedangkan perkebunan pinang rakyat terdapat di seluruh daerah Aceh (Amin, tanpa angka tahun : 108).

Pada masa pendudukan Jepang hasil perkebunan tersebut, terutama sekali karet dan minyak kelapa sawit tidak diganggu oleh Jepang dan sebagian besar digudangkan di pusat-pusat perkebunan masing-masing. Oleh karena itu daerah Aceh Timur yang mempunyai areal perkebunan karet dan kelapa sawit yang cukup luas, pada masa perang kemerdekaan mempunyai stok karet yang siap untuk diekspor dalam jumlah yang cukup banyak. Stok karet tersebut merupakan produksi perkebunan selama pendudukan Jepang yang digudangkan dan belum sempat diekspor (Hussein, 1984:85).

Potensi ini ditunjang oleh letak geografis yang memudahkan untuk mengekspor berbagai jenis barang ke Pulau Penang, Malaya. Daerah Aceh mempunyai tepi pantai yang berawa-rawa, sehingga dapat dipergunakan sebagai basis penerobosan blokade Angkatan Laut Belanda di Selat Malaka. Disamping jarak tempuh pelayaran antara Aceh dan Pulau Penang yang relatif singkat.

Selain dari pada itu, daerah Aceh mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik, dalam hal ini khususnya dalam bidang perniagaan.

Walaupun sebagian besar ikut serta dalam peperangan melawan Belanda, tetapi masih ada sebagian kecil yang terus berdagang dan berkebun. Mereka ini pada umumnya mendidik anak-anaknya ataupun orang-orang kepercayaannya untuk menjadi pedagang ataupun meneruskan usaha keluarga. Pada masa Perang kemerdekaan 1945-1949 mereka tersebut yang telah berperan pada masa Pemerintah Hindia Belanda dan pada masa pendudukan Jepang tampil sebagai pelaku-pelaku ekonomi dengan mendirikan beberapa perseroan wawancara (Djafar Hanafiah).

Di samping beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, faktor luar juga sangat mendorong berkembangnya para pengusaha Aceh. Adapun yang berhubungan dengan hal itu, adalah adanya kunjungan kapal dagang M.S Rasa, kepunyaan The Straits Steamship Company Ltd Penang ke Aceh Timur. Kapal ini berlabuh di Kuala Langsa pada tanggal 14 Mei 1947. Seorang Inggris bernama Ranson mengadakan pembicaraan dengan pedagang dan pihak berwajib setempat mengenai maksudnya untuk mengadakan hubungan yang luas dalam bidang perdagangan antara maskapai "The Straits Steamship Company Ltd dengan Republik Indonesia.

Kunjungan atase perdagangan Inggris tersebut disambut secara resmi oleh pemimpin Republik Indonesia di Langsa, Aceh Timur. Maksud dan tujuan kedatangan mereka seperti tersebut di atas didukung sepenuhnya. Kemudian pada tanggal 15 Mei kapal ini melanjutkan kunjungannya ke Aceh Utara dan berlabuh di pelabuhan Lhokseumawe dengan memasang bendera merah putih. Mereka diterima oleh Komandan Divisi X Kolonel Husen Joesoef dan berhasil melakukan pembicaraan, bahwa maksud kedatangan M.S. Rasa ialah untuk merintis dan mengatur perhubungan dagang daerah ini (Talsya, 1990:87).

Kemudian pada 9 Juni 1947, kapal dagang Inggris yaitu Empire Seahelti memasuki pelabuhan Lhokseumawe. Kapten Kapal, Atkinson dalam pertemuan dengan wakil pemerintah di Lhokseumawe menjelaskan bahwa kedatangannya untuk meninjau keadaan perdagangan di daerah ini. Selanjutnya Atkinson melanjutkan pelayaran ke pelabuhan Uleélheu,

dalam rangka untuk menjumpai Residen Aceh di Kutaraja, untuk membicarakan peningkatan ekspor dan impor barang-barang Aceh ke luar negeri dan barang-barang luar negeri ke Aceh.

Menurut Atkinson, perdagangan yang berlangsung selama ini masih dalam volume yang sangat terbatas, sedangkan kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan secara optimal sangat terbuka, seperti tersedianya perkebunan dalam kondisi yang produktif dengan areal relatif luas. Harga komoditi cukup baik, pusat pemasaran di Pulau Penang Malaya yang relatif dekat, sedangkan blokade Angkatan Laut Belanda di Selat Malaka dapat diatasi dengan berbagai cara.

Dengan demikian Atkinson tidak terlalu memperhitungkan bahaya akibat ketatnya blokade Angkatan Laut Belanda. Hal ini karena ia sangat mengakui kemampuan strategis penerobosan para pengusaha untuk menghindari ancaman tersebut.

D. Profil Pedagang Aceh.

1. M. Djoened Yoesoef: NV. Indocolim (Indonesia Company Limited).

M. Djoened Yoesoef lahir pada tanggal 7 April 1917 di Kutaraja, dari suatu keluarga yang bergerak baik dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Ayahnya bernama M. Yoesoef, sejak tahun 1919 telah bermigrasi ke Idi, daerah ini merupakan salah satu wilayah penghasil lada dan karet di Aceh Timur. Di tempat tersebut ia mendirikan ataupun membuka usaha pertanian lada dan karet wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Untuk merealisasikan usaha pertanian tersebut, ia mengambil kredit tanpa bunga dari *De Groot Atjehsche Afdeeling Bank* di Langsa. Bank ini telah didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1913 dan mendapat sambutan yang cukup baik dari sebagian besar masyarakat Aceh Timur pada waktu itu (Langhout, 1923:171). Pertanian lada berhasil dengan baik, hal ini berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam memajukan pertanian rakyat di daerah

Aceh pada umumnya (Jongejans, 1937:187) Kemudian M. Yoesoef memperluas usaha pertaniannya dengan membuka kebun karet seluas 10 Ha. Usaha ini berhasil dengan baik, sehingga luas perkebunan karetnya sampai pada tahun 1937 mencapai 30 Ha wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Pada akhir tahun 1925, ia mulai menggerakkan usahanya sebagai *Petuha Pangkai* (penyandang modal) tanpa bunga kepada petani yang membutuhkan. Usaha ini mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat, sehingga ia berhasil menyalurkan modal usaha kepada petani. Adapun petani yang memperoleh modal pada saat itu berjumlah 100 orang yang bergerak dalam berbagai jenis pertanian, tetapi sebagian besar dari mereka membudidayakan tanaman karet wawancara (M. Djoened Yoesoef). Para petani dalam kenyataannya lebih senang mendapatkan modal usaha dari M. Yoesoef bila dibandingkan dengan kredit yang disediakan oleh bank pemerintah yang tersebut di atas. Ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama, sama-sama menyalurkan pinjaman modal tanpa bunga, kedua masih ada sikap anti Belanda para petani itu sendiri wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Apabila diperhatikan dari usaha yang dijalankan oleh M. Yoesoef dalam membantu usaha pertanian rakyat, ternyata wawasan para petani dalam dunia usaha awam sekali. Hal ini terbukti bahwa, M. Yoesoef sendiri untuk memajukan usahanya mengambil kredit dari Bank pemerintah. Uang kredit tersebut selain dipergunakan untuk kepentingan usaha pertanian sendiri, juga disalurkan kepada para petani yang membutuhkan.

Dalam penyaluran modal usaha kepada petani, M. Yoesoef menetapkan suatu perjanjian tidak tertulis kepada petani yaitu, para petani harus menjual semua hasil pertanian kepada M. Yoesoef dengan harga sesuai yang berlaku di pasaran. Dari hasil penjualan tersebut ia akan memotong modal ataupun pinjaman yang telah diberikan dan sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada petani yang bersangkutan. Dengan sistem ini ia berhasil memperoleh pemasukan hasil pertanian secara tetap dari para petani wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Pada mulanya hasil pertanian yang dikumpulkan dari para petani dan dari usaha perkebunannya sendiri dijual kepada pedagang Tionghoa yang ada di Langsa. Dalam perkembangan selanjutnya M. Yoesoef mengadakan hubungan dagang secara langsung dengan NV. Atjehsche Handel Maatschappij cabang Langsa (Aceh Timur). Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan swasta Belanda yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor. Pada 1927 M. Yoesoef membuka tiga unit toko, masing-masing di Langsa dua unit dan di Banda Aceh satu unit. Toko itu terdiri dari toko kain, toko kelontong dan bahan bangunan. Usaha ini mendapat kemajuan yang memuaskan, karena di samping ia sebagai penyandang modal pertanian rakyat, yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat, sehingga meningkatkan daya beli. Barang dagangan di toko kelontong dan toko kain pada umumnya menjadi konsumsi masyarakat, sedangkan barang dagangan di toko bahan bangunan pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan perkebunan dan instansi pemerintah wawancara (M. Djoened Yoesoef).

M. Djoened Yoesoef setelah menyelesaikan pendidikan di Holand Inlandsche School (HIS) pada tahun 1934, ia ikut membantu orang tuanya terutama pada toko yang berkedudukan di Kutaraja. Kemudian pada tahun 1936 ia diberi tanggung jawab untuk memimpin usaha perdagangan di Kutaraja. Sejak itu ia mulai meningkatkan dengan membeli berbagai hasil pertanian rakyat dan hasil hutan dari agen-agen pengumpul dalam wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Usaha ini berkembang dengan baik, sehingga mampu memasukkan sebagian besar komoditi ekspor ke perusahaan dagang Belanda, NV. Atjehsche Handel Maatschappij. wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Ketika Jepang mendarat di Aceh kegiatan perdagangan M. Djoened Yoesoef mulai merosot dan pada akhirnya bangkrut. Keadaan ini menimpa usahanya karena pada waktu itu pemerintah Pendudukan Jepang mengambil sebagian besar barang dagangannya untuk perang Asia Timur Raya wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya setelah Jepang

keluar dari Aceh pada bulan Desember 1945, M. Djoened Yoesoef menggerakkan kembali usaha perdagangannya. Usaha ini dimulai dengan mengutamakan karet dan kopra sebagai komoditi utama. Komoditi ini lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan komoditi lain, karena di wilayah Aceh Besar dan daerah sekitarnya terdapat perkebunan kelapa yang cukup luas. Pada masa Pendudukan Jepang baik perkebunan kelapa rakyat maupun perkebunan kelapa swasta seluruhnya ditinggalkan oleh pemiliknya dan terbengkalai, namun demikian sebagian produksinya masih cukup baik wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Pembelian kopra ditempuh melalui suatu perjanjian dan kepercayaan dengan masyarakat. Ia membuat suatu perjanjian secara lisan kepada pemilik-pemilik kopra bahwa harga kopra akan dibayar setelah diekspor ke Pulau Penang. Perjanjian itu diterima dengan sepenuhnya oleh masyarakat. Sikap masyarakat kepada pedagang seperti itu muncul disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adalah kondisi ekonomi Aceh sepeninggalan Jepang dalam keadaan kacau, sehingga tidak memungkinkan para pedagang memberi hasil pertanian rakyat secara tunai; Aktivitas perniagaan bertujuan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta para petani merasa lebih baik mengolah hasil pertanian dan menyerahkan kepada pedagang, dari pada membiarkan terbengkalai tanpa harapan untuk memperoleh keuntungan.

Pada bulan Mei 1946 mulai mengadakan perdagangan secara langsung dengan perusahaan-perusahaan dagang di Pulau Penang. Komoditi tersebut diekspor melalui pelabuhan Uleelheu. Ia sendiri ikut langsung membawa komoditi ekspor tersebut ke Pulau Penang. Barang-barang tersebut diterima oleh pimpinan perusahaan dagang Cordova Trading Company. Kemudian dijual dan membeli barang-barang yang dibutuhkan di daerah Aceh seperti kain, senjata yang amat dibutuhkan. Barang-barang yang akan diimpor tersebut dibeli pada beberapa perusahaan dagang di Pulau Penang, yaitu Seng Huat Bros & Co, Siwe Guan & co, dan Thai Hin & Co wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Kemudian dalam tahun itu juga secara berturut-turut pada bulan

Juli mengekspor 350 ton karet, 300 ton kopra, 290 ton Pinang; September 400 ton karet, 200 ton kopra, 175 ton pinang; Desember 475 ton karet, 100 ton kopra, dan 150 ton Pinang wawancara (M. Djoened Yoesoef). Perdagangan ekspor impor ini berjalan dengan lancar, tetapi setelah Belanda menguasai perairan Selat Malaka perdagangan ini mengalami kesulitan. Walaupun demikian M. Djoened Yoesoef tetap melaksanakan ekspor impor dengan menembus blokade Angkatan Laut Belanda hingga tahun 1950.

Pada tanggal 14 Mei 1947, M. Djoened Yoesoef mendirikan Perseroan Serikat Dagang Indonesia dengan nama NV. INDOCOLIM (*Indonesia Commerce limited*). Badan ini bergerak dalam bidang perdagangan dalam dan luar negeri yang meliputi berbagai jenis barang. Dalam acara peresmian perusahaan niaga itu ikut hadir antara lain Gubernur Muda Sumatera, Residen Aceh, Residen Inspektur d/p Gubernur Sumatera dan para Kepala Jawatan wawancara (M. Djoened Yoesoef, Lihat juga Talsya, 1990:79).

Residen Aceh menyampaikan pesan-pesan kepada perusahaan niaga tersebut dengan harapan bahwa, Indocolim dapat berkembang dengan baik dan dalam berbagai kegiatannya supaya memperhatikan benar-benar kegiatan perjuangan yang sedang berlangsung. Selain dari itu juga harus mampu menyediakan kebutuhan masyarakat, baik bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari, maupun kebutuhan kelengkapan hidup lainnya. Jika hal tersebut dapat dipenuhi, maka serikat dagang ini benar-benar bermanfaat bagi perjuangan Indonesia.

Pesan Residen itu mendapat tanggapan serius dari direktur Indocolim, M. Djoened Yoesoef, ia mengemukakan bahwa organisasi dagang ini didirikan bertujuan untuk membantu perjuangan kemerdekaan yang sedang berlangsung di seluruh tanah air wawancara (M. Djoened Yoesoef, lihat juga Talsya, 1990:80).

Kemudian untuk memperluas dan memperkuat usaha perniagaannya, pada bulan Juni 1947, dibuka kantor perwakilan di Langsa (Aceh Timur), Meulaboh (Aceh Barat), Lhokseumawe (Aceh

Utara), dan di Medan serta di luar negeri yaitu, di Pulau Penang dan Singapura.

Perusahaan dagang ini mulai mengadakan ekspor perdana pada bulan Agustus 1947. Karena itu M. Djoened Yoesoef mengirimkan karyawannya ke Pulau Penang dan Singapura untuk mendirikan kantor perwakilannya. Dengan demikian biaya umum pertransaksi akan lebih kecil wawancara (M. Djoened Yoesoef).

2. Wahi Ibrahim : NV. PERMAI (Perdagangan Masyarakat Indonesia).

Wahi Ibrahim lahir pada tahun 1917 dari sebuah keluarga miskin di Kecamatan Pidie. Orangtuanya bernama Ibrahim bekerja sebagai petani penggarap di desanya. Wahi Ibrahim sejak kecil telah ikut membantu ayahnya sebagai petani penggarap untuk menambah penghasilan keluarga. Keadaan keluarga yang miskin mengakibatkan Wahi Ibrahim tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan formal, sehingga ia tidak bisa membaca dan menulis wawancara (Cut Sulaiman).

Pada umur 13 tahun ia mulai bekerja pada keluarga *Uleebalang*. Pada keluarga itu ia ditugaskan sebagai anggota keamanan di perkebunan kelapa. Selama dua tahun bekerja ia memperhatikan bahwa hasil perkebunan dijual secara langsung kepada pedagang, sehingga ia menyarankan kepada pemilik perkebunan agar produksi perkebunan diolah menjadi kopra dan langsung disalurkan ke perusahaan ekspor impor Belanda cabang Sigli. Saran tersebut diterima oleh Teuku Abdullah, pemilik perkebunan wawancara (Cut Sulaiman).

Sejak saat itu ia ditugaskan sebagai pengelola-pengelolaan kopra dan penyalur ke perusahaan dagang Belanda. Dari usaha ini Teuku Abdullah berkembang menjadi sebagai salah seorang pedagang kopra, sedangkan Wahi Ibrahim menjadi karyawan penting dalam usaha dagang ini. Pada perkembangan selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan kopra NV. *Atjehsche Handel Maatschappij* cabang Sigli, ia membuka jaringan pembelian kopra rakyat di seluruh wilayah Pidie. Akibat nyata dari usaha tersebut sebagian besar dari hasil pertanian kelapa rakyat di Pidie berada

dalam kekuasaan usaha perdagangannya.

Kemudian ia membuka tokonya sendiri dan menjadi pedagang pribumi yang berhasil, terutama sekali dalam memasukkan komoditi ekspor ke perusahaan dagang Belanda cabang Sigli. Ia menjadi mandiri pada tahun 1933. Dalam dua tahun kemudian tokonya menjadi besar, ramai dan terkenal di wilayah Pidie. Adapun barang-barang yang diperdagangkan adalah kain, gula dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya wawancara (Cut Sulaiman).

Sehubungan dengan laba yang diperoleh dari hasil perdagangan itu, ia meningkatkan usahanya dengan membuka sebuah toko di Kutaraja dan di Langsa (Aceh Timur). Di Langsa ia melibatkan diri dalam pembelian karet rakyat, mendirikan pabrik pengasapan karet. Usaha ini berlangsung dengan baik hingga Jepang menduduki Aceh pada bulan Maret 1942.

Pada masa pendudukan Jepang, dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 usaha perniagaannya mengalami kemunduran secara pesat, karena hilangnya daya beli masyarakat dan semua potensi daerah Aceh dipergunakan untuk kepentingan perang pemerintah Pendudukan Jepang. Walaupun demikian pada masa itu ia memperoleh kesempatan dari pemerintah untuk mengadakan hubungan perdagangan dengan Malaya. Oleh karena itu ia berhasil mendirikan perwakilan dagang di Pulau Penang pada masa tersebut, tepatnya pada bulan Agustus 1943. Dalam perkembangan selanjutnya perwakilan ini memegang peranan penting untuk mensukseskan perdagangan Aceh dengan Pulau Penang wawancara (Cut Sulaiman).

Pada akhir pemerintahan Pendudukan Jepang, Wahi Ibrahim membeli karet milik perkebunan Jepang dengan harga yang cukup murah. Selama pendudukan Jepang harga karet di Aceh sangat merosot, sehingga sebagian besar perkebunan pemerintah tidak memproduksi secara optimal, dan perkebunan rakyat pada umumnya diterbengkalakan.

Wahi Ibrahim sebagai seorang yang berbakat dagang

memperkirakan keadaan perdagangan yang sedang merosot tidak berlangsung lama. Karena itu ia membeli karet dengan sebanyak-banyaknya. Pada akhir tahun 1945 ia telah berhasil menggudangkan karet sebanyak 1000 ton. Selain dari itu ia juga sadar bahwa dimasa yang akan datang, Pulau Penang dan Singapura akan menjadi kembali sebagai pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara, terutama sekali Pulau Penang sebagai tempat yang paling dekat untuk mengeksport produksi perkebunan dari Aceh. Berdasarkan perkiraan tersebut, ia membuka perwakilan dagangnya di Pulau Penang dan Singapura wawancara (Cut Sulaiman).

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada awal tahun 1946, ia berhasil mengeksport karet sebanyak 1000 ton melalui pelabuhan Langsa ke Pulau Penang. Komoditi tersebut semuanya ditukar dengan berbagai barang kebutuhan daerah Aceh, yang sangat penting sekali pada waktu itu adalah kain dan senjata, disamping kebutuhan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan. Kemudian dalam tahun itu juga secara berturut-turut, pada bulan Mei berhasil mengeksport sebanyak 250 ton karet, 8 ton kopra, 100 ton pinang; Agustus 50 ton karet, 75 ton kopra, 8 ton pinang; dan pada bulan Nopember 60 ton karet, 10 ton kopra dan 5 ton pinang wawancara (Cut Sulaiman).

Pada bulan Agustus 1947 usaha perdagangan Wahi Ibrahim diresmikan sebagai perusahaan berbadan hukum dengan nama NV. PERMAI (Perdagangan Masyarakat Indonesia). Dalam perusahaan ini terdapat lima orang pemegang sero terbesar yaitu, Wahi Ibrahim, Teuku Manyak, M. Yakop, Ibrahim, dan A.M Ali. Sejak saat itu Wahi Ibrahim bersama tiga orang karyawannya pindah ke Pulau Penang dan menjadi Presiden Direktur NV. Permai cabang Pulau Penang. Di situ ia merekrut menejer-menejer setempat, terutama sekali orang-orang Malaya keturunan India. Ia tahu benar apa yang dapat diperoleh dengan uang dan mempergunakan uang itu untuk memperkerjakan orang-orang yang berkompeten dan membangkitkan loyalitas mereka. Pada tahun 1948, ia memperluas jaringan perdagangannya dengan membuka perwakilannya di Singapura, melalui perwakilan ini ia banyak memasukkan perlengkapan

senjata, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari daerah Aceh pada waktu itu wawancara (Cut Sulaiman).

Sepeninggalan Wahi Ibrahim, NV Permai di Aceh dipimpin oleh A.M. Ali. Sesuai dengan permintaan pasar di Pulau Penang dan Singapura, A.M Ali meningkatkan jumlah pembelian komoditi dari berbagai macam hasil pertanian dan hutan seperti karet, kopra, pinang, minyak kelapa sawit, rotan. Permintaan komoditi tersebut dapat dipenuhi dengan memuaskan, karena selain perusahaan ini mempunyai perwakilan di daerah-daerah pusat perkebunan, juga produksi pertanian rakyat telah mulai membaik. Komoditi tersebut dengan menembus blokade Angkatan Laut Belanda di perairan Selat Malaka diekspor ke Pulau Penang. Cara perdagangan seperti ini sangat berbahaya untuk keselamatan jiwa dan harta para pedagang, karena selalu ada kemungkinan dihancurkan oleh Angkatan Laut Belanda. Bahaya seperti ini dialami NV. Permai pada bulan Juni 1949, semua barang-barang impor dari pulau Penang dan Singapura ditangkap dan disita oleh Belanda wawancara (Cut Sulaiman).

Kerugian yang menimpa perusahaan dagang tersebut tidak menghancurkan semangat dan aktifitas para pemimpinnya, karena itu Wali Ibrahim dan teman-temannya dengan tekun melanjutkan usaha ekspor impor hingga tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan ia juga ikut aktif dalam dunia perdagangan Aceh dengan Pulau Penang dan Singapura, bahkan sampai ke India dan Australia. Pada akhirnya ia menetap di Malaysia dengan membuka perusahaan perdagangan dan perkebunan.

3. Teuku Djohan : Meraxa Trading Company.

Teuku Djohan lahir pada tahun 1905 dari keluarga *Uleebalang* Meraxa Kutaraja. Ayahnya bernama Teuku Sandang bekerja sebagai pedagang beras di Kutaraja. Uaha itu merupakan usaha perniagaan keluarga.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Aceh merupakan salah satu daerah pengimpor beras. Kondisi ini sesuai dengan keadaan politik menjelang akhir abad ke-19 yaitu, penaklukan Aceh oleh Belanda,

keadaan pertanian rakyat mengalami kemunduran, karena peperangan melawan Belanda berlangsung secara terusmenerus dan melibatkan sejumlah besar penduduk Aceh. Dalam keadaan demikian, rakyat terpaksa mengabaikan usaha pertanian, akibatnya produksi padi di Aceh hancur total. Sedangkan sebelumnya daerah ini mempunyai nilai surplus beras yang besar (Anderson, 1971:162 - 166).

Kondisi ekonomi tersebut mendorong sebagian kecil orang Aceh yang berbakat dagang untuk membuka usaha perdagangan beras. Salah satunya adalah Teuku Sandang. Ia mendapat kepercayaan dari pemerintah Hindia Belanda sebagai salah seorang pedagang penyalur beras kepada masyarakat Aceh Besar dan sekitarnya. Setelah ia meninggal pada tahun 1925, usaha ini diambil alih oleh adiknya, yaitu Teuku Hasan. Pada tahun 1942 usaha dagang ini mengalami kerugian dalam jumlah yang cukup besar, karena semua barang dagangannya disita oleh Jepang. Penyitaan itu didasarkan pada dua alasan, yaitu usaha perniagaan Teuku Sandang merupakan pendistribusi perusahaan dagang Belanda, dan beras merupakan kebutuhan pokok militer Jepang yang harus di amankan wawancara (Teuku M. Daud).

Teuku Djohan sejak mengikuti pendidikan di *Holandsche School* (HIS) telah aktif membantu orang tuanya berdagang beras. Namun setelah ia menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1925 memisahkan diri dengan usaha dagang orang tuanya, dan terjun ke bidang bisnis keliling. Ia mengambil tekstil dari perusahaan grosir Belanda (Fa. J. Boon Jzn dan NV. Borsumy) wawancara (Teuku M. Daud, Lihat juga Jongejans, 1937:121). dan produk-produk setempat seperti lampu dari kaleng buatan orang Tionghoa setempat. Banyak memperoleh laba dari usaha ini lalu ia mendirikan toko di Kutaraja dan Meulaboh, kemudian pada tahun 1934 mendirikan lagi toko di Langsa dan di Medan. Sejak itu ia menjadi pedagang menetap dan berhasil memperoleh laba yang besar, sehingga ia termasuk sebagai seorang pedagang yang berpengaruh. Pada tahun 1936, ia merubah status toko perwakilan Medan menjadi sebagai pusat usaha perdagangannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pertumbuhan usaha dagangannya yang semakin meningkat. Pada waktu itu

ia telah menjadi pedagang yang sukses dengan karyawan sekitar 20 orang yang tersebar di empat lokasi tersebut di atas wawancara (Teuku M. Daud).

Teuku Djohan adalah sebagai inovator dalam lingkungan usaha dagang keluarganya sendiri. Ia memulai usaha sebagai pedagang kain, tetapi tidak seperti orang tuanya (Teuku Sandang) yang hanya berpegang pada satu jenis barang dagangan, yaitu beras. Ia mau berdagang setiap barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membeli semua hasil pertanian rakyat wawancara (Teuku M. Daud).

Dalam menangani pembelian dan pengolahan karet rakyat ia membangun satu kilang pengasapan karet di Kuala Simpang (Aceh Timur). Sejak itu ia mulai mengolah getah menjadi karet seet. Karet hasil pengolahan itu, melalui kantor pusat perusahaannya yang berkedudukan di Medan, langsung dijual ke perusahaan dagang Belanda. Sedangkan komoditi dari perwakilan lainnya disalurkan ke perusahaan dagang Belanda setempat. Demikian juga pemasukan berbagai jenis barang ke tokonya, untuk daerah Langsa langsung dimasukkan dari kantor pusat Medan, sedangkan untuk daerah lain, Kutaraja dan Meulaboh barang-barang dimasukkan dari perusahaan-perusahaan grosir setempat. Aktivitas yang gemilang ini terhenti ketika pemerintah Pendudukan Jepang berkuasa di Aceh pada tahun 1942 wawancara (Teuku M. Daud).

Dalam kondisi yang tidak menguntungkan selama pendudukan Jepang, Teuku Djohan mendapat kesempatan untuk membuka perwakilan dagang di Pulau Penang. Hal ini juga sangat berkaitan dengan kepentingan Jepang itu sendiri. Walaupun demikian ia menyadari bahwa perwakilannya di Pulau Penang akan menguntungkan dan memperlancar hubungan perdagangan dengan luar negeri pada masa-masa yang akan datang. Perkiraan dan harapan itu menjadi suatu kenyataan setelah Jepang kalah dalam perang dunia kedua wawancara (Teuku M. Daud).

Setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya setelah Jepang meninggalkan Aceh pada bulan Desember 1945, Teuku Djohan mulai berusaha menggerakkan kembali usaha perniagaannya, yang kemudian

pada tahun 1947 di kenal dengan nama NV. Meraxa Company, dengan modal sebanyak 500 ton getah yang luput dari gangguan Jepang. Kekuatan sebanyak itu menurut perhitungan ia sendiri masih sangat lemah untuk menjalankan perniagaan yang pernah jaya pada masa pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu keluarganya memberikan semua kekayaan yang dapat dibelanjakan untuk modal usaha, tetapi ini pun tidak cukup. Dengan demikian ia memutuskan untuk mendapat pinjaman karet sebanyak 100 ton. Kebijakan ini sangat membantu sekali, sehingga modal yang tersisa pada perusahaannya dapat dipergunakan sepenuhnya untuk membeli komoditi pertanian rakyat, terutama sekali karet, kopra dan pinang wawancara (Teuku M. Daud).

Pada awal tahun 1946, ia mengekspor karet sebanyak 600 ton ke Pulau Penang (Malaya), karet tersebut terdiri dari 500 ton kepunyaan sendiri dan 100 ton pinjaman dari perusahaan perkebunan pemerintah. Komoditi itu semua diekspor melalui pelabuhan Langsa. Adapun sarana pengangkutan yang tersedia pada waktu itu untuk menyeberangi selat malaka adalah speed boat dan tongkang. Kemudian dalam tahun itu juga ia mengadakan ekspor dan impor ke Pulau Penang secara berturut-turut sebagai berikut : pada bulan Mei 300 ton karet, 30 ton pinang, 50 ton kopra; Agustus 200 ton karet, 40 ton kopra, 15 ton pinang; Desember 150 ton karet, 25 ton kopra, dan 12 ton pinang wawancara (Teuku M. Daud).

Selama tahun 1946 perdagangan ekspor impor berlangsung dengan baik, tetapi setelah agresi Belanda baik pertama maupun kedua, perdagangan Aceh dengan Pulau Penang mengalami kesulitan dan sangat berbahaya karena ketatnya blokade Angkatan Laut Belanda di perairan Selat Malaka. Barang-barang dari Aceh semuanya ditukar dengan berbagai jenis barang untuk kebutuhan perjuangan, seperti senjata, mobil, alat-alat perkantoran, dan kebutuhan sehari-hari lainnya wawancara (Teuku M. Daud).

Dalam perkembangan selanjutnya sejak tahun 1950, Teuku Djohan meningkatkan lagi usahanya baik dalam perdagangan lokal maupun perdagangan luar negeri. Pada masa itu ia terjun dalam perdagangan

barter antara Aceh dengan Pulau Penang dan Singapura. Usaha ini berjalan dengan baik hingga tahun 1961. Setelah perdagangan barter dihentikan, perusahaan ini mulai melakukan aktivitas secara mandiri dengan mempergunakan sarana-sarana ekonomi yang tersedia pada waktu itu.

4. Muhammad Saman : Firma Puspa.

Dalam tahun 1980, seorang yang bernama Muhammad Saman membuka sebuah toko di Bireuen untuk berusaha menjual barang-barang dagangan yang diimpor oleh perusahaan Belanda. Ia dilahirkan di desa Juli pada tahun 1911. Desa Juli terletak di perbatasan antara Aceh Utara dengan Aceh Tengah sekarang ini. Ayahnya bernama Saman seorang petani kelapa yang tergolong kaya pada waktu itu. Ia mencita-citakan setelah anaknya menyelesaikan di sekolah rakyat, akan dilanjutkan kesuatu pesantren untuk mempelajari ilmu agama dengan harapan nantinya akan menjadi seorang ahli agama wawancara (Ismail Saman).

Muhammad Saman menolak keinginan orang tuanya tersebut terhadap dirinya. Oleh karena itu setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat, ketika itu berumur 13 tahun, ia meninggalkan desa kelahirannya menuju ke kota Lhokseumawe untuk manggang disuatu toko yang memperdagangkan produk luar negeri. Karena melihat peluang besar dalam perdagangan barang-barang impor ini, pada tahun 1930, ia pindah ke kota Bireuen. Pada tempat baru itu ia menyewa sebuah rumah dengan sejumlah modal yang telah ditabung dan ditambah dengan pinjaman dari orang tuanya guna membuka toko. Toko ini diberi nama Puspa, suatu nama populer yang berdagang barang-barang impor pada waktu itu wawancara (Ismail Saman).

Muhammad Saman menjadi pedagang yang berhasil, pada tahun 1932, ia sudah mempunyai uang yang cukup untuk membeli sebuah rumah dan mempergunakan sebagian darinya untuk toko. Pada waktu itu ia berdagang barang-barang kebutuhan rumah tangga, yang dibeli dari perusahaan grosir Belanda yang berkedudukan di Lhokseumawe wawancara (Ismail Saman).

Lajunya perkembangan ekspor komoditi hasil pertanian oleh perusahaan dagang Belanda, menarik perhatian Muhammad Saman untuk meningkatkan usaha perdagangannya sebagai penyalur komoditi ke perusahaan dagang Belanda. Karena itu ia pada tahun 1934 membuka sebuah toko di Takengon (Aceh Tengah) dan membeli kopi dari hasil pertanian rakyat. Pembelian kopi ini berlangsung dengan baik karena didukung oleh modal yang cukup dan sarana transportasi yang memadai.

Sebelum daerah Gayo ditundukkan oleh Belanda, daerah ini masih merupakan sebagai salah satu daerah terisolir, karena tidak adanya sarana komunikasi yang memadai. Setelah Belanda menguasai daerah itu pada tahun 1908 diusahakan agar tidak terisolir lagi. Karena itu pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah jalan yang dapat membuka dan menghubungkan daerah ini dengan daerah-daerah lainnya di tepi pantai. Panjang jalan yang dibangun sekitar 120 km, mulai dari kota Bireuen (Aceh Utara) hingga kota Takengon (Gayo Aceh Tengah). Dalam tahun 1914 pembangunan jalan ini selesai dengan menghabiskan biaya satu setengah juta gulden.

Muhammad Hasan termasuk salah seorang yang mempergunakan sarana komunikasi ini dalam usaha perniagaannya, sehingga ia pada tahun 1935 berkembang sebagai pedagang pemasuk komoditi ekspor (kopi) ke perusahaan dagang Belanda cabang Aceh Utara. Kemudian menangani berbagai jenis barang dari hasil pertanian dan hasil hutan, terutama sekali dari produksi pertanian di Takengon. Sedangkan untuk memperoleh karet ia membuka perwakilan dagang di Langsa, di sini ia berhasil membeli karet rakyat dan hasil pertanian lainnya (C.L. De Gayoweg, 1915:228).

Dengan demikian sejak tahun 1935, ia telah berhasil berkembang sebagai pedagang pengecer barang-barang impor dan juga sebagai pedagang pembeli, serta pemasuk komoditi ekspor ke *NV Atjehsche Handel Maatschappij* cabang Lhokseumawe. Perdagangan yang sangat menguntungkan itu berlangsung dengan stabil hingga tahun 1942.

Pada masa pendudukan Jepang, usaha perdagangan ini mengalami

kemerosotan, hal ini sama dengan keadaan yang dialami oleh pengusaha-pengusaha lainnya. Komoditi kopi sebagai mata barang utamanya menjadi sasaran kebutuhan angkatan perang Jepang. Stok kopi harus dijual kepada pemerintah Pendudukan Jepang dengan harga yang sangat murah. Transaksi perdagangan itu hanya berlaku di atas kertas, sedangkan realisasi pembayaran tidak pernah ada wawancara (Ismail Saman).

Adapun barang-barang perniagaan yang tidak diganggu oleh Jepang adalah karet. Oleh karena itu stok karet hingga Jepang keluar dari Aceh masih dalam keadaan utuh. Karet ini menjadi modal dasar perusahaan ini ketika menggerakkan kembali usaha perniagaannya pada masa perang kemerdekaan wawancara (Ismail Saman).

Pada awal tahun 1946 Muhammad Saman mengadakan ekspor perdana ke Pulau Penang, usaha ini berlangsung dengan lancar, karena di pulau penang telah ada perusahaan orang Aceh untuk menampung dan membeli barang-barang yang akan diimpor ke Aceh. Kemudian usaha ini dilanjutkan pada bulan April dengan mengeksport 200 ton getah, 150 ton kopra, 50 ton pinang; Juli 100 ton karet, 45 ton kopra, 10 ton pinang; Nopember 40 ton karet, 25 ton kopra, dan 75 ton pinang.

Pada bulan September 1947, usaha dagang Muhammad Saman diresmikan menjadi perusahaan dagang yang berbadan hukum yang bernama Fa. Puspa. Sejak itu aktivitas ekspor impor bertambah tinggi dan terorganisir dengan baik, kegiatan ini berlangsung hingga tahun 1950 wawancara (Ismail Saman).

Setelah pengakuan kedaulatan, Muhammad Saman ikut aktif mempergunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti perdagangan barter pada masa itu. Perusahaan ini mengalami kemajuan yang cukup baik. Kemudian setelah keamanan Aceh pulih kembali pada tahun 1961, perdagangan barter dihentikan. Gagasan berdiri di atas kaki sendiri mulai digerakkan. Perusahaan ini telah melakukan berbagai usaha perdagangan. Namun demikian dengan berbagai kendala yang dihadapi pada akhir tahun 1970-an mengalami kemerosotan dan pada akhirnya menjadi sebagai pedagang kecil dengan

satu toko kelontong di kota Lhokseumawe wawancara (Ismail Saman).

5. Muhammad Hasan : NV. PIM (Perdagangan Indonesia Muda).

Seperti halnya banyak kelompok pengusaha lainnya, Aktivitas NV : PIM sudah dimulai jauh sebelum pendirian resminya pada bulan Oktober 1947. Pendiri PIM merupakan orang yang paling terpelajar diantara para pendiri perusahaan-perusahaan dagang di daerah Aceh pada waktu itu. Tidak seperti lainnya ia memperoleh pendidikan menengah. Pada tahun 1925 ia memasuki MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), yang pada waktu itu satu-satunya sekolah menengah yang merupakan lembaga pendidikan tertinggi di daerah Aceh. Beberapa tahun kemudian setelah lulus, ia bergabung dengan usaha dagang M. Yoesoef, yang kemudian dibawah pimpinan anaknya, M. Djoened Yoesoef pada masa perang kemerdekaan di kenal dengan nama NV. Indocolim, yang telah merintis hubungan perdagangan dengan perusahaan dagang Belanda di Aceh. Satu faktor yang penting dalam keputusannya untuk bergabung dengan usaha dagang M. Yoesoef tadi adalah keinginannya untuk mengikuti jejak seorang ternama, Yaitu M. Yoesoef (Orang tua M. Djoened Yoesoef) yang telah melakukan perdagangan langsung dengan perusahaan ekspor impor Belanda wawancara (Zainal Abidin).

Tidak lama setelah bergabung dengan M. Yoesoef, ia dikirim ke Medan (Sumatera Timur) yang pada waktu itu sebagai suatu pusat perdagangan terbesar di Sumatera. Suatu kegiatan penting yang ia lakukan di sana ialah membeli gula secara langsung pada perusahaan-perusahaan grosir gula. Sampai pada waktu itu perdagangan gula di Aceh didominasi oleh pedagang-pedagang Tionghoa. Agar dapat memasuki bidang perdagangan ini, Muhammad Hasan menetap di Medan pada tahun 1933 untuk mengadakan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan grosir gula. Usaha tersebut berhasil dengan baik, sehingga terjadi hubungan dagang secara langsung dengan perusahaan dagang tempat ia bekerja. Sistem ini di tempuh karena gula melalui pedagang

perantara membutuhkan waktu dan modal yang lebih tinggi, maka pemasukan secara langsung dari perusahaan pusat menguntungkan besar sekali wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Akibat nyata dari usaha tersebut ia menjadi salah seorang pengecer gula ternama di Aceh, terutama sekali di daerah Aeh Timur dan Aceh Utara. Kondisi tersebut berjalan dengan stabil dan menguntungkan hingga tahun 1942 wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Meskipun usaha Muhammad Hasan sudah demikian, tetapi usaha perniagaan M. Djoened Yoesoef bangkrut setelah Jepang menduduki Aceh. Keadaan seperti ini juga dialami oleh pedagang-pedagang lainnya di Aceh pada waktu itu. Ketika hal ini terjadi Muhammad Hasan memutuskan untuk mendirikan usaha dagang sendiri. Pada tahun 1944, ia mendirikan suatu usaha dagang yang bernama PIM, dengan tempat pusatnya di Kutaraja dan tidak lama kemudian membuka cabang usaha di Langsa wawancara (Zainal Abidin).

Dalam kurun waktu tahun 1944 - 1945 ia mengalihkan perdagangannya kekomoditi karet. Pada waktu itu perniagaan karet di Aceh dalam keadaan lesu. Karena kondisi seperti ini banyak stok karet para pedagang dan rakyat tidak diganggu oleh Jepang. Dalam kondisi tersebut ia muncul sebagai salah seorang pedagang yang berani melakukan tindakan spekulasi. Tindakan utamanya pada waktu itu membeli karet, baik karet rakyat maupun karet dari beberapa pedagang di Langsa. Selama setahun penuh ia berhasil membeli karet sebanyak 300 ton dengan satu harapan pasaran karet dalam waktu yang relatif dekat akan normal kembali wawancara (Zainal Abidin).

Tindakan spekulasi itu menjadi suatu kenyataan yang berharga setelah Jepang kalah dengan sekutu dalam perang dunia kedua. Sejak saat itu Muhammad Hasan mulai memfokuskan perhatiannya pada perdagangan ekspor impor. Untuk itu ia pada bulan April 1946 melakukan ekspor perdana sebanyak 300 ton karet ke Pulau Penang. Kemudian dalam tahun itu juga dilanjutkan secara berturut-turut sebagai berikut : Pada bulan Juni 250 Ton Karet, 50 kopra, 35 ton pinang; Agustus 150 ton

karet, 50 ton kopra, 35 ton pinang; Nopember 350 ton karet, 20 ton kopra, 15 ton pinang. Dalam perkembangan selanjutnya, selama tahun 1947 ia berhasil mengadakan perdagangan ekspor impor ke Pulau Penang sebanyak tujuh kali, sedangkan dalam tahun 1948 dan 1949 masing-masing sebanyak enam kali. Kemudian pada tahun 1950 meningkat menjadi sembilan kali ekspor impor wawancara (Zainal Abidin).

Semua komoditi yang tersebut di atas, ditukar dengan kebutuhan daerah Aceh baik untuk kepentingan sipil maupun militer. Kegiatan ekspor dan impor ditempuh melalui penembusan blokade Angkatan Laut Belanda di Selat Malaka. Kegiatan ini sangat berbahaya sekali, karena selalu ada kemungkinan ditangkap dan dihancurkan oleh Belanda yang memblokir Selat Malaka. Walaupun demikian Muhammad Hasan dengan jiwa besar terus melakukan ekspor impor antara Aceh dengan Pulau Penang dan Singapura sampai dengan pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia wawancara (Zainal Abidin).

6. Nyak Ben : PT. PERSIG (Persatuan Saudagar Geudong).

Nyak Ben termasuk salah seorang perintis pembentukan usaha dagang di Aceh pada masa perang kemerdekaan. Ia dilahirkan di desa Geudong pada tahun 1914. Ayahnya bernama M. Ben bekerja sebagai pedagang lada. Sejak berumur 10 tahun nyak Ben telah aktif membantu usaha dagang ayahnya yang berpusat di pasar Geudong Aceh Utara. Ketika berumur 13 tahun ia pindah ke desa Blangme, desa ini merupakan salah satu desa dalam kecamatan Samudera sekarang. Di tempat baru tersebut ia membuka warung kopi. Usaha ini berjalan dengan baik dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan di daerah tersebut mempunyai potensi ekonomi yang cukup baik. Pertama sekali berpenduduk padat, pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Kedua di daerah ini terdapat tempat pendaratan ikan dan satu dermaga pembantu bongkar muat barang-barang perusahaan dagang Belanda. Akibatnya desa Blangme banyak dikunjungi oleh para pedagang, sehingga menjadi salah satu tempat yang ramai di Aceh Utara pada waktu itu wawancara (Daud Ben)

Selama berdagang di daerah itu, ia berhasil memperoleh keuntungan

dalam jumlah yang cukup besar. Selain dari itu ia juga memperoleh kenalan dari berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat ini nantinya dijadikan sebagai penyandang modal dalam mengembangkan usaha perdagangan selanjutnya.

Pada tahun 1932 ia mulai meningkatkan usaha dagangnya dengan membuka sebuah toko di kota kelahirannya, yaitu Geudong. Untuk mendapat barang dagangannya, ia berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan grosir kain di Medan (Sumatera Timur). Setelah satu tahun menekuni usaha dagang tersebut, ia berhasil memperoleh keuntungan yang memadai. Keuntungan tersebut dijadikan sebagai modal baru untuk membeli berbagai jenis komoditi ekspor dari pertanian rakyat dan hasil hutan, seperti karet, kopra, pinang dan rotan wawancara (Daud Ben).

Komoditi tersebut semua disalurkan ke perusahaan dagang Belanda yang berkedudukan di Medan, sehingga sejak tahun 1933, ia telah menjadi sebagai salah satu pedagang pengecer dan pemasuk berbagai komoditi ekspor. Dalam perkembangan selanjutnya perdagangan hasil pertanian rakyat bertambah meningkat, maka pada tahun 1935 membuka cabang usahanya di Medan dan memindahkan pusat usaha dagangnya dari kota Geudong ke kota Lhokseumawe. Di sini ia membuka dua unit toko baru, yaitu toko kain dan toko kelontong wawancara (Daud Ben).

Ketika menggerakkan usaha dagang di Lhokseumawe, ia mendapat tawaran bisnis ternak dari NV: Atjehsche Handel Maatschappij cabang Lhokseumawe. Perdagangan ternak ini khususnya untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan daging Malaya dan Singapura. Untuk merealisasi usaha perdagangan tersebut, ia membuka perwakilan dagang di Bireun dan Sigli. Kedua daerah tersebut merupakan daerah penghasil kerbau liar wawancara (Daud Ben). Dalam tahun 1936 ia berhasil memasukkan sebanyak 1000 ekor kerbau dan 200 ekor lembu ke perusahaan yang tersebut di atas. Pada tahun 1937 dan 1938 masing-masing berjumlah 800 ekor kerbau 100 ekor sapi. Komoditi itu semuanya diekspor melalui pelabuhan Lhokseumawe, oleh karena itu ternak yang berasal dari Sigli harus digiring melalui jalan darat ke Lhokseumawe,

berhubung jarak yang ditempuh mencapai 120 km, maka untuk sekali penggiringan membutuhkan waktu selama 15 hari wawancara (Daud Ben, lihat juga Seri informasi Aceh Tahun XII No. 1, 1989:42).

Usaha dagang ini berlangsung hingga Jepang menduduki Aceh pada tahun 1942. Pada masa ini usaha dagang mengalami kemunduran. Hal ini sama seperti yang dialami oleh para pedagang lainnya. Walaupun demikian semangat dagangnya tetap bertahan. Karena itu selalu mencoba mempergunakan kesempatan untuk menggerakkan usaha dagang walaupun dalam kondisi yang sangat berbahaya. Pada bulan Maret 1946 Nyak Ben mendapat izin dari pemerintah untuk mengekspor karet sebanyak 350 ton ke Pulau Penang. Usaha ini berhasil dengan baik, kemudian dalam tahun itu ia juga melanjutkan usahanya dengan mengekspor berbagai jenis barang-barang secara berturut-turut ke tempat yang sama, yaitu pada bulan Mei sebanyak 150 ton karet, 20 ton kopra, 5 ton pinang; Juli 17 ton karet, 9 ton kopra, 5 ton pinang; Oktober 15 ton karet 7 ton kopra 3 ton pinang; Desember 9 ton karet, 10 ton kopra dan 19 ton pinang wawancara (Daud Ben).

Pada tahun 1947, usaha dagang ini diresmikan menjadi suatu perseroan yang berbadan hukum dengan nama NV. PERSIG (Persatuan Saudagar Geudong), kemudian pada tahun 1952 berubah menjadi PT. Persig. Perusahaan ini dapat mengumpulkan modal dalam jumlah besar dengan cara menarik sumbangan pada masyarakat Geudong, dan setiap penyumbang diberikan sero dengan hak suara dalam usaha yang direncanakan itu sesuai dengan jumlah sumbangan yang diberikan. Adapun jumlah masyarakat pembeli sero berjumlah 700 orang. Usaha pembeli sero ini mendapat sambutan baik dari masyarakat Geudong, karena Nyak Ben ini telah dikenal oleh masyarakat luas sejak ia membuka warung kopi, seperti yang telah dikemukakan di atas wawancara (Gani Ben).

Setelah perusahaan ini menjadi perseroan berbadan hukum, aktivitasnya semakin terorganisir, baik dalam bidang perdagangan lokal maupun perdagangan luar negeri. Pada tahun 1947 ia berhasil mengadakan

ekspor impor sebanyak 5 kali, sedangkan pada tahun 1949 ekspor sebanyak 7 kali dan impor sebanyak 6 kali, karena dalam tahun itu barang-barang impornya berhasil ditangkap oleh Angkatan Laut Belanda sebanyak satu kali. Kemudian pada tahun 1950 perdagangan ekspor impor meningkat menjadi 10 kali wawancara (Gani Ben).

Barang-barang yang berhasil diekspor ke Pulau Penang dan Singapura semuanya ditukar dengan kebutuhan daerah Aceh, baik untuk kepentingan militer maupun sipil. Sistem seperti ini ditempuh hingga pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Setelah tahun 1950 PT. Persig ikut mempergunakan kesempatan dan fasilitas perdagangan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga mengaktifkan kembali cabang-cabang perwakilannya yang telah terbentuk pada masa revolusi kemerdekaan dan membentuk perwakilan yang baru di Sabang dan Banda Aceh wawancara (Gani Ben).

7. Ismail Usman : PT. ARCO (Aceh Rubber Company)

Ismail Usman lahir pada tahun 1917 di desa Simpang Ulim Aceh Timur. Ayahnya bernama Usman dan berstatus *Teungku*. Semenjak berumur 15 tahun Ismail Usman meninggalkan desa kelahirannya dan menetap di kota Langsa. Di tempat ini ia membuka toko roti. Untuk memperoleh roti yang diperdagangkan, ia berhubungan langsung dengan pemilik pabrik roti Tionghoa yang ada di kota Langsa. Toko ini berkembang menjadi usaha grosiran roti untuk kawasan Aceh Timur. Roti merupakan salah satu jenis makanan yang paling laris pada waktu itu. Hal ini berkaitan erat dengan jumlah penduduk dan perkembangan perusahaan perkebunan wawancara (Tgk. Ismail Usman).

Usaha grosiran roti memperoleh laba besar, sehingga pada tahun 1936 ia mempergunakan keuntungan itu untuk mengembangkan usaha dagangannya dengan menanamkan modal dalam pembelian komoditi ekspor. Sejak itu ia mulai membeli berbagai jenis hasil pertanian rakyat seperti karet, kopra dan pinang. Usaha dagang ini hanya terbatas sebagai usaha dagang perantara atau pun sebagai agen. Oleh karena itu semua komoditi ekspor disalurkan kepada pedagang Tionghoa yang ada di

Langsa wawancara (Tgk. Ismail Usman). Walaupun demikian ia tetap memperoleh keuntungan yang memadai, sehingga statusnya sebagai pedagang perantara berlangsung hingga tahun 1942.

Selama pendudukan Jepang, Ismail Usman terpaksa harus menghentikan usaha perdagangannya dan bekerja pada pemerintah Pendudukan Jepang. Selama itu ia menjadi anggota *Shukai* atau bagi dan kumpul yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan milik rakyat dan kemudian membagi-bagikannya wawancara (Tgk. Ismail Usman).

Setelah proklamasi kemerdekaan, ia mencoba merintis kembali usaha perdagangannya, tetapi pada waktu itu ia mengalami kesulitan modal. Kesulitan ini dapat diatasi, adapun cara yang ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan kepada Wedana Langsa untuk memperoleh pinjaman karet. Permohonan ini diterima, sehingga ia berhasil mengeluarkan karet dari perkebunan pemerintah sebanyak 350 ton, dan pada bulan April 1946 diekspor ke Pulau Penang melalui pelabuhan Langsa wawancara (Abubakar Madjid).

Kemudian usaha ini dilanjutkan pada bulan Juni, mengekspor sebanyak 225 ton karet, 15 ton kopra, dan 3 ton pinang; Agustus 115 ton karet, 5 ton kopra, dan 7 ton pinang; Nopember 15 ton karet, 8 ton kopra, dan 3,5 ton pinang wawancara (Tgk. Ismail Usman). Perdagangan ekspor impor dalam tahun 1946 itu berjalan dengan baik, karena Belanda pada waktu itu belum memblokade perairan Selat Malaka. Mulai tahun 1947 usaha perdagangan ekspor impor antara Aceh dengan Pulau Penang dan Singapura mengalami kesulitan, walaupun demikian Ismail Usman tetap mengadakan ekspor impor dengan berbagai bahaya yang akan diterima dari Angkatan Laut Belanda. Dari kegiatan itu pada tahun 1947, ia berhasil mengadakan perdagangan ekspor impor ke Pulau Penang dan Singapura sebanyak 6 kali. Pada tahun 1948 sebanyak 7 kali dan pada tahun 1949 menurun menjadi 5 kali, sedangkan pada tahun 1950 meningkat menjadi 9 kali ekspor impor wawancara (Tgk. Ismail Usman, dan Abubakar Madjid).

Pada tahun 1950 usaha dagang Ismail Usman diresmikan menjadi perseroan berbadan hukum, yang bernama PT. ARCO. Perusahaan ini memfokuskan usahanya dalam bidang perkebunan karet dan kelapa sawit di Aceh Timur. Di samping itu ia juga mempergunakan kesempatan ekonomi lainnya yang disediakan oleh pemerintah, seperti perdagangan barter antara Aceh dan Pulau Penang wawancara (Tgk. Ismail Usman).

E. Perdagangan Luar Negeri.

Dalam bidang perdagangan untuk mengatasi barang-barang impor akibat blokade Belanda, telah diusahakan untuk melakukan perniagaan ke daerah Semenanjung Melayu dengan menembus blokade Belanda. Melalui perdagangan ini telah dilakukan pertukaran hasil-hasil perkebunan dan pertambangan yang ada di daerah Aceh dengan Malaya dan Singapura. Para pengusaha dengan perahu motor dan tongkang menyebrangi ke Malaya dan Singapura untuk menjual berbagai jenis komoditi wawancara (Tgk. Ad). Hasil yang akan diperoleh para pengusaha Aceh sangat ditentukan oleh perjuangan yang cukup berat, karena bila dalam penyeberangan ini mereka berhadapan dengan Angkatan Laut Belanda, maka seluruh barang dan nyawanya akan menjadi taruhan. Para pengusaha ini yang ikut dalam percaturan ekonomi nasional pada waktu itu antara lain adalah M. Djoened Yoesoef dari NV. Indocolim, Wahi Ibrahim dari NV. Permai, Muhammad Saman dari Firma Puspa, Teuku Djohan dari NV. Meraxa, Muhammad Hasan dari NV. P I M, Nyak Ben dari PT. Persig, Ismail Usman dari PT. Arco.

Disamping para pengusaha yang tersebut di atas, dua tokoh lain yang juga ikut aktif dalam perdagangan luar negeri, terutama dengan daerah-daerah di Semenanjung Melayu, yaitu John Lie dan Usman Adami. Kedua mereka ini termasuk personal Angkatan Laut dan Angkatan Darat Republik Indonesia. Jonh lie dengan perahu motornya yang diberi nama *The Out Law* bertugas menembus blokade Angkatan Laut Belanda (Lie, 1982:30) Usman Adami bertugas menyediakan barang-barang hasil perkebunan tanaman besar dan tanaman rakyat seperti karet, kopra dan pinang untuk diangkut oleh Jonh Lie ke Semenanjung Melayu. Di sana barang-barang ini dijual dan selanjutnya dari penjualan tersebut dibelikan

barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk dan militer di Aceh. Barang-barang tersebut setibanya di Aceh diserahkan kepada Usman Adami, Kepala Jawatan Keuangan dan Perlengkapan Divisi Militer (Yakobi, 1992:251).

Dari sejak awal kemerdekaan hingga dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, perdagangan antara Aceh dengan Pulau Penang, Port Swettenham dan Singapura dilakukan dengan cara itu.

Adapun volume perdagangan antara Aceh dengan Semenanjung Melayu dapat dijabarkan sebagai berikut, berdasarkan olahan dan sumber wawancara dengan para pengusaha dan juga berdasarkan catatan-catatan yang fragmentaris. Perkiraan kasar dapat ditunjukkan pada tabel satu ini, ialah mengenai ekspor karet Aceh ke Pulau Penang pada tahun 1946 - 1950.

Tabel 1
Ekspor Karet Aceh ke Pulau Penang
1946 - 1950

Tahun	Ekspor (ton)
1946	5.755
1947	18.314
1948	19.028
1949	4.255
1950	32.530

Sumber : **Economic offices, Penang, Report on the entreport trade of Penang, April 1951.** Khususnya untuk jumlah ekspor tahun 1946 merupakan olahan dari hasil wawancara dengan pelaku-pelaku ekonomi pada awal kemerdekaan.

Ekspor pada tahun 1946 menunjukkan jumlah yang masih relatif kecil karena dipengaruhi oleh kondisi yang belum menentu sepeninggalan pendudukan Jepang, dan aktivitas perdagangan baru dimulai secara nyata pada bulan Juni 1946. Jadi aktivitas perdagangan dalam tahun itu hanya berlangsung selama enam bulan. Sedangkan ekspor tahun 1949 menunjukkan penurunan yang drastis oleh karena ketatnya kontrol Belanda di daerah-daerah penghasil karet yang berdekatan dengan daerah yang telah berada di bawah kekuasaannya. Sementara itu pada tahun 1950 ketika kontrol itu tidak ada lagi dan juga karena harga karet meningkat tinggi, angka ekspor pada tahun itu menunjukkan peningkatan yang besar.

Sementara itu ekspor kopra Aceh ke Pulau Penang dapat ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2
Ekspor Kopra Aceh ke Pulau Penang
1947 - 1950

Tahun	Ekspor (ton)
1946	1.287
1947	2.084
1948	10.230
1949	12.838
1950	14.259

Sumber : **Memorandum Submitted by the Penang Atjeh Traders Association to the Penang Working Committee of duties dete 5 - 7 - 1950.** Khususnya untuk angka ekspor tahun 1946 merupakan olahan dari sumber wawancara dengan para pengusaha awal kemerdekaan.

Ekspor tahun 1946 menunjukkan angka yang masih relatif rendah, karena dipengaruhi oleh kondisi seperti yang telah dikemukakan pada tabel 1. Sedangkan ekspor kopra pada tahun 1947 hanya mengalami sedikit peningkatan, hal ini tidak sesuai dengan produksi kopra Aceh pada waktu itu yang mencapai ribuan ton. Kondisi ini terjadi karena komoditi kopra pada waktu itu berada di bawah pengawasan *International Emergency Food Control* (IEFC). Selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 1948 kopra memiliki nilai yang cukup tinggi di Pulau Penang, sehingga ekspor dari Aceh juga mengalami peningkatan.

Angka ekspor kopra dari Aceh ke Pulau Penang menunjukkan keadaan yang cukup stabil. Hal ini terjadi karena permintaan kilang minyak makan yang ada di Pulau Penang cukup konstan.

Di samping karet dan kopra, komoditi ekspor lainnya dari Aceh dalam jumlah besar adalah pinang. Dalam tabel tiga ditunjukkan besarnya ekspor komoditi itu selama tahun 1947 - 1950.

Tabel 3
Ekspor Pinang Aceh ke Pulau Penang
1947 - 1950

Tahun	Ekspor (ton)
1946	1.055,5
1947	15.986
1948	14.202
1949	19.648
1950	16.650

Sumber : **Economic offices, Penang, Report on the enterport trade of Penang, April 1951.** Mengenai jumlah angka ekspor tahun 1946 merupakan hasil olahan dari sumber wawancara dengan pengusaha Aceh pada awal kemerdekaan.

Bagaimanapun volume ekspor barang-barang dari Aceh ke Pulau Penang dipengaruhi oleh harga rata-rata yang berlaku di sana. Harga rata-rata masing-masing barang tersebut dijabarkan dalam tabel 4.

Tabel 4

Harga Rata Rata Karet, Kopra dan Pinang
Di Pulau Penang 1947 - 1950 diukur
Dalam Straits Dolar

Tahun	Karet Pond/sen	Kopra/Pikul	Pinang/pikul
1947	37.31	21.09	23.61
1948	42.15	33.55	21.61
1949	38.19	30.45	20.96
1950	108.18	37.74	23.73

Sumber : Monthly Statistical Bulletin, Federation of Malaya, 1947 - 1951, dan Penang Chamber of Commerce.

Mengenai barang impor Aceh dari Pulau Penang dapat dikemukakan di sini, yaitu impor tekstil pada tahun 1947; 1948; 1949; dan 1950, masing-masing sebanyak 6.000.860 yard, 8.073.955 yard, 4.352.000 yard, dan 25.281.085 yard (Kee, tanpa angka tahun : 12). Mobil Jeep pada tahun 1947; 1948; 1949 dan 1950 masing-masing sebanyak 10 unit, 7 unit, 12 unit, dan 27 unit. Impor ban mobil dalam tahun yang sama masing-masing sebanyak 20 pasang, 22 pasang dan 26 pasang. Selain dari itu para pengusaha juga memasukkan senjata, amunisi, alat pemancar radio, alat perkantoran, obat-obatan, makanan dan kebutuhan sehari-hari wawancara (M. Djoened Yoesoef).

Pemasukan senjata oleh para pengusaha ke daerah Aceh, merupakan tujuan utama untuk memenuhi keperluan perjuangan. Akan tetapi barang tersebut termasuk dalam daftar larangan impor daerah kekuasaan Inggris.

Oleh karena itu para pengusaha harus bekerja keras dan berusaha untuk menghindari hukum setempat yang sangat keras. Salah satu cara yang ditempuh untuk merealisasi impor senjata, yaitu para pedagang tidak memuat senjata di pelabuhan-pelabuhan daerah kekuasaan Inggris, tetapi ditengah laut di daerah kawasan internasional. Setelah pengusaha mengadakan suatu perundingan dan perjanjian mengenai hari tertentu dan jam tertentu, para pengusaha menerima senjata-senjata maupun amunisi dari tongkang-tongkang yang memuat dan mengantar senjata ke speedboat para pengusaha. Dengan demikian terjadilah pemindahan barang-barang tersebut dari tongkang ke Speedboat yang dilakukan pada malam hari dan pada saat ombak tinggi, sehingga aman dari patroli Angkatan Laut Inggris wawancara (M. Djafar Hanafiah).

BAB IV

KONTRIBUSI KELOMPOK PEDAGANG DALAM REVOLUSI KEMERDEKAAN DI ACEH

Usaha bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan ekonomi. Faktor ekonomi di samping faktor-faktor lain, berperan sangat penting bagi para pejuang untuk melawan penjajah Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Dapat dikatakan bahwa setelah proklamasi kemerdekaan, kondisi ekonomi, politik dan keamanan masih belum stabil. Oleh karena itu pemerintah mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan. Kesulitan ini bertambah lagi akibat berbagai gangguan dan tekanan yang dilakukan oleh Sekutu dan Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia.

Khususnya dalam sektor ekonomi, pada awal kemerdekaan Indonesia sangat memprihatinkan. Inflasi menimpa negara Indonesia yang baru memproklamkan kemerdekaannya. Sumber inflasi itu selain akibat dari peperangan yang dikobarkan oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya, juga beredarnya mata uang rupiah Jepang yang cukup banyak dikalangan masyarakat yang diperkirakan mencapai 4 miliar. Jumlah ini bertambah besar lagi setelah Sekutu berhasil menduduki kota-kota besar di Indonesia dengan menguasai beberapa Bank. Selain itu ditambah lagi dengan diedarkannya mata uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk tujuan operasi dalam usaha mengembalikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia (Nutosusanto. 1993 : 173).

Kesulitan di atas diakibatkan karena pemerintah Republik Indonesia belum memiliki mata uang pengganti sebagai alat pembeli yang sah. Kas pemerintah kosong, pajak dan biaya masuk lainnya sangat kurang. Sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah. Oleh karena itu untuk sementara pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengeluarkan ketetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah republik Indonesia. Ketiga macam mata uang itu adalah mata uang De Javasche

Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang Jepang.

Pada masa itu pemerintah sangat sulit untuk mengendalikan keuangan karena blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda dalam berbagai sektor. Banyak barang-barang yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor ke luar negeri, demikian juga sebaliknya terhadap barang-barang impor dari luar negeri yang selalu diblokade oleh pihak Belanda.

Situasi ekonomi yang dialami bangsa Indonesia pada umumnya pada awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan perkembangan ekonomi di Aceh. Kesulitan ekonomi pada awal kemerdekaan dapat dilihat pada dua sektor ekonomi, sebagai lanjutan dari perkembangan ekonomi dimasa akhir kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dan masa pendudukan Jepang. Dua sektor ekonomi yang dimaksud adalah sektor asing dan sektor setempat. Munculnya dua sektor ini, yang hidup secara berdampingan di Aceh telah dimulai sejak awal abad ke-20. Di samping ekonomi rakyat setempat yang bergerak dibidang pertanian, terdapat sejumlah perkebunan besar milik swasta Barat yang bergerak dalam perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi.

Beberapa sektor perekonomian seperti perdagangan, perkebunan dan pertambangan merupakan sumber utama pendapat pemerintah yang ikut menunjang kegiatan revolusi dan jalannya roda pemerintahan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya daerah Aceh masih memiliki sumber daya ekonomi yang kuat untuk menunjang jalannya revolusi. Beberapa pengusaha Aceh yang sangat berpengaruh dalam percaturan ekonomi nasional telah memainkan peranannya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah dan pusat. Mereka telah berperan dalam bidang perdagangan antara Aceh, Malaya (sekarang Malaysia), dan Singapura. Dengan adanya perdagangan ini berbagai potensi alam dapat dimanfaatkan dan diekspor ke luar negeri. Selain itu juga tumbuhnya lembaga-lembaga perekonomian di Kutaraja yaitu dengan didirikannya Kantor Pusat Perkebunan Daerah Aceh, dan Badan Kemakmuran pada tahun 1947 wawancara (M. Nur El Ibrahimy), dengan beberapa usaha pembaharuan ekonomi oleh pemerintah dan

swasta telah menunjang kelancaran pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat dan sekaligus telah ikut membantu kelancaran aktivitas para pejuang kita untuk memiliki atau pengadaan fasilitas perang.

Sehubungan dengan kondisi ekonomi pada masa perang kemerdekaan di Aceh seperti yang telah diuraikan di atas, maka pembahasan dalam bab ini akan dipusatkan pada sumbangan ekonomi kelompok pengusaha Aceh kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sumbangan itu baik dipergunakan di daerah Aceh sendiri, Medan Area, maupun untuk kepentingan Pemerintah Pusat.

A. Dukungan Ekonomi Untuk Revolusi di Aceh.

Selama perang kemerdekaan Aceh merupakan salah satu daerah yang masih dapat memberi dukungan ekonomi untuk kelancaran revolusi dalam segala aspek untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat belum sanggup menanggung anggaran belanja bagi daerah-daerah, terutama yang berada di luar pulau Jawa (Amin, tanpa angka tahun : 102). Hal ini disebabkan oleh karena Belanda secara terus menerus melakukan agresinya dalam usahanya untuk menguasai Indonesia. Laut dan darat masih dikuasai oleh Belanda dan masih tidak sanggup dilewati oleh angkatan perang Indonesia akibat terbatasnya sarana perang. Oleh karena itu Aceh terpaksa harus berdiri sendiri dalam hal keuangan negara, dan untuk membiayai perang yang sedang berlangsung di daerah ini dengan Belanda.

Berbagai usaha dalam rangka mengintensifkan perjuangan terus menerus dilakukan. Untuk mendukung jalannya revolusi dan untuk memenuhi kebutuhan peralatan senjata, telah dibuka lima tempat prioritas pembangunan kilang-kilang senjata di daerah Aceh yaitu : Pabrik senjata Lhoknga Aceh Besar, Pabrik senjata Rantau Kuala Simpang Aceh Timur, Pabrik senjata Kota Bakti Pidie, dan pabrik senjata di Macan Kumbang Kutacane Aceh Tenggara (Yakobi, 1992:244).

Pengadaan dan pengadaan logistik merupakan masalah yang rawan. Oleh karena itu apa yang dapat dipakai dan bahan-bahan kebutuhan

lainnya terpaksa harus diseludupkan melalui Selat Malaka yang penuh dengan bahaya, namun para pedagang Aceh - Malaya juga sangat menarik minat dalam bidang ini, dan ternyata tidak sedikit keuntungan yang diperoleh para pedagang. Usaha perdagangan hasil pertanian rakyat dan perkebunan di Aceh, ditambah lagi dengan anjuran ulama untuk membiayai perang kemerdekaan yang dianggap sebagai perang fisabilillah, menyebabkan kebutuhan bahan makanan dan perlengkapan senjata di daerah Aceh cukup terpenuhi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selama perang kemerdekaan di Aceh merupakan daerah yang sangat mandiri dalam bidang ekonomi pangan, senjata, dan berbagai kebutuhan lain. Kondisi ini terjadi, karena adanya suatu kerja sama yang baik antara para pedagang dengan penguasa. Hal ini ditandai dengan munculnya suatu kepercayaan yang luar biasa dari pemerintah kepada pelaku-pelaku ekonomi pada waktu itu, untuk memberi konsensi-konsensi komoditi ekspor untuk diperdagangkan di Pulau Penang dan Singapura. Kepercayaan pemerintah tersebut merupakan suatu tantangan patriotik bagi pengusaha Aceh pada waktu itu yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan untuk kepentingan perang kemerdekaan. Akibat nyata dari itu, maka berkembanglah pelaku-pelaku ekonomi yang berjiwa perjuangan dan tidak bersifat bisnis murni. Mereka pada umumnya berorientasi politik untuk mempertahankan kemerdekaan.

B. Dukungan Ekonomi Untuk Perang Medan Area.

Blokade Belanda yang ketat harus diakui telah menyulitkan berkembangnya perekonomian bangsa Indonesia. Sumatera Timur pada tanggal 15 Nopember 1946 telah terjadi pengalihan kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu (Yakobi, 1992:245) Sehingga para pejuang di daerah itu mengalami kesulitan ekonomi dan kekuatan persenjataan. Oleh karena itu pada tanggal 16 Desember 1946, Aceh telah mengirimkan bantuan senjata berat berupa meriam dan sejumlah para pejuang untuk terjun di front Medan Area. Pengiriman senjata ini dimungkinkan karena pada saat itu memiliki kilang-kilang senjata yang terpusat di lima daerah yang telah disebutkan di atas. Pada akhir tahun 1946, para pejuang Aceh

mulai membanjiri Medan Area. Untuk maksud tersebut perlu ditunjang oleh penyediaan bahan makanan dan persenjataan yang cukup, ini semua dimaksud untuk kelancaran perjuangan. Pengadaan dan penyaluran bahan logistik itu dilakukan dengan cara penyeludupan pada malam hari agar terhindar dari serangan tentara Belanda. Berkat jasa John Lie dan pengusaha-pengusaha Aceh mengakibatkan dapat dipenuhi kebutuhan logistik bagi daerah Aceh dan Sumatera Timur. Demikian para pengusaha telah berperan aktif dalam pengadaan suku cadang dan senjata-senjata baru. Suku cadang senjata pada masa itu sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bengkel-bengkel senjata, dalam usaha memperbaiki senjata-senjata peninggalan Belanda dan Jepang yang telah rusak. Selain itu juga untuk merakit senjata-senjata baru yang sangat dibutuhkan dalam melawan agresi Belanda. Dengan demikian perakitan dan perbaikan senjata berhasil direalisasi dengan memuaskan, sehingga kebutuhan senjata untuk angkatan perang Indonesia di Aceh dan Sumatera Timur secara relatif dapat dipenuhi.

Upaya lain yang dilakukan dalam usaha membantu perang Medan Area adalah keikhlasan hati para prajurit dan pejuang Aceh membawa perbekalan yang terjun ke Medan Area. Mereka membawa uang, bahan makanan, perlengkapan senjata dan berbagai bahan logistik lainnya. Bahkan ada diantara mereka yang sengaja menjadi pemasuk barang-barang tersebut yang diambil dari daerah Aceh sambil berjuang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi kesulitan bahan pangan dan ekonomi demi tercapainya cita-cita perjuangan.

C. Dukungan Ekonomi Untuk Membiayai Pemerintah Pusat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Indonesia Merdeka, khususnya dalam masa revolusi fisik pemerintah Pusat mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perang dan perundingan yang berlarut-larut, sehingga kemerosotan ekonomi mencapai puncak yang sangat memprihatinkan.

Agresi yang dilancarkan Belanda telah menghancurkan seluruh wilayah Indonesia, semua daerah telah dikuasai kembali, kecuali daerah

Aceh yang dengan gigih dipertahankannya. Oleh karena itu Pemerintah Pusat tidak sanggup untuk mengurus daerah-daerah dalam hal keuangan. Pemerintah daerah terpaksa harus mengurus daerahnya masing-masing, termasuk Aceh harus mengusahakan sendiri keuangan dan berbagai keperluan lainnya.

Kenyataan ini memang benar seperti yang dikemukakan oleh S. M. Amin, bahwa sungguh benar daerah Aceh adalah satu-satunya daerah yang dalam masa perjuangan kemerdekaan tidak pernah dikuasai musuh dan tidak memperoleh perbelanjaan dari pusat. Namun pada saat-saat genting, semua daerah telah diduduki dan dikuasai kembali oleh musuh. Sebaliknya daerah Aceh pernah membiayai pemerintah Pusat di Yogyakarta (Amin, tanpa angka tahun : 103).

Dalam usaha untuk memenuhi kepentingan revolusi Republik Indonesia, rakyat Aceh pada umumnya dan para pedagang khususnya telah banyak menyumbang untuk Pemerintah Pusat di Yogyakarta. Pada tahun 1949 pemerintah daerah Aceh mengeluarkan biaya kepada Pemerintah Pusat Yogyakarta sebesar S\$. 500.000,- (lima ratus Straits Dollar) dengan perincian, untuk membiayai perwakilan di luar negeri (Mr. Maramis) S\$ 100.000,- untuk Indonesia Office Singapura S\$ 50.000,- untuk angkatan perang S\$ 250.000,- dan untuk pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta sebanyak S\$ 100.000,- wawancara (M. Noer El Ibrahimy).

Sehubungan dengan keadaan Indonesia masih dalam kekuasaan penjajahan Belanda dan sulitnya komunikasi antar pulau di Indonesia, serta hubungan dengan luar negeri, dan hubungan dengan peningkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Udara, maka pemerintah mengintruksikan kepada semua Residen dalam wilayah Republik Indonesia, supaya membentuk suatu panitia (Dakota Fonds) dalam rangka mengumpulkan biaya untuk pembelian pesawat udara Dakota (Polem, 1955:34). Untuk daerah Aceh Presiden Sukarno pada tanggal 16-6-1948, bertempat di Aceh Hotel dan di depan pengusaha-pengusaha terkemuka mengucapkan pidato singkat sebagai berikut :

Saudagar-saudagar adalah tonggak ekonomi kita dan sebab itu bantulah usaha dan rancangan Pemerintah Pusat untuk kebaikan perekonomian kita. Alangkah baiknya apabila kaum saudagar berusaha menyelenggarakan perhubungan-perhubungan antara satu pulau dengan pulau yang lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain, karena hal ini terasa oleh saya dalam perjalanan ini betapa sukarnya perhubungan itu. Antara satu kota dengan kota yang lain saja telah diceraikan oleh rimba raya yang memisahkan kota-kota tersebut dengan jarak beratus-ratus kilometer.

Sebab itu saya anjurkan, sebelum kita memperkuat dan memperbaiki jalan-jalan mobil dan kereta api atau pun perhubungan di laut, sekarang kita usahakan membuka hubungan lalulintas di udara.

Disini saya anjurkan supaya kaum saudagar akan membeli kapal udara sebaiknya Dakota dan saya tidak berkeberatan tuan-tuan akan memberikan namanya sendiri untuk pesawat terbang tersebut.

Di daerah-daerah yang saya kunjungi, telah disanggupi oleh daerah tersebut untuk membeli kapal terbang di daerahnya. Kapal terbang itu dapat dipergunakan oleh saudagar-saudagar guna keperluannya juga.

Yang sebaik-baiknya seluruh daerah mengumpulkan uang dan sekaligus membeli pesawat-pesawat tersebut dari Amerika, yaitu pesawat-pesawat baru yang terjamin, yang mana pembelian ini akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat sendiri yang mempunyai ahli-ahlinya yang cukup, supaya kita jangan terkicuh dan mendapat barang-barang yang usang, afgekeurd, yang mestinya telah masuk ke kuburan pesawat-pesawat udara.

Satu Dakota harganya hanya 25 kilogram emas. Kepada saudara-saudara yang sekarang menyanggupi untuk memasukkan uangnya dalam pembelian kapal udara untuk daerah ini, dan bagi yang terbanyak menyerahkan uang tersebut hari ini akan diizinkan untuk terbang di udara di atas Kutaraja dengan pesawat kita di Lhoknga (Semangat Merdeka, 13-7-1948).

Berdasarkan uraian dari pidato singkat Presiden di atas, terlihat bahwa presiden Sukarno menantang jiwa patriotik para pedagang Aceh untuk meneruskan memperjuangkan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Sukarno meminta kepada pengusaha-pengusaha Aceh untuk menyumbangkan dua pesawat yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran perjuangan. Dalam suatu pertemuan lanjutan, yaitu pertemuan untuk makan bersama antara Presiden beserta rombongan dengan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh), Presiden menanyakan kepada GASIDA apakah mereka sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang Dakota yang seharga 120.000 Dolar Malaya atau sekitar 25 kg emas. Menjelang akhir pertemuan itu, Presiden mengatakan, bahwa beliau tidak akan mau makan sebelum mendapat jawaban dari GASIDA : ya ataupun tidak. Atas pertanyaan tersebut ketua GASIDA M. Djoened Yoesoef, Haji Zainuddin dan sesepuh GASIDA lainnya yang hadir dalam pertemuan itu, mengisyaratkan kepada T. M. Ali Panglima Polem (selaku juru bicara) bahwa mereka menyanggupi terhadap maksud Presiden tersebut. Kemudian GASIDA membentuk suatu panitia pelaksana pembelian pesawat terbang, yang diketuai oleh T. M. Ali Panglima Polem (Polim, 1955:35).

Dalam tempo dua hari, panitia telah berhasil mengumpulkan uang sebanyak 140.000 Dolar Malaysia dan 20 kg emas untuk pembelian pesawat tersebut. Kemudian disusul lagi sebanyak 120.000 Dolar Malaysia, sehingga berjumlah M\$ 120.000,- cukup untuk membeli dua buah pesawat terbang Dakota berikut motor pengganti dan onderdil (Manyak, 1975 : 5 - 8) Proses pembelian itu memakan waktu selama tiga bulan dan berhasil dibawa ketanah air pada akhir bulan Oktober 1948 dengan nomor register RI - 001 (Abidin, 1990:161).

Pada bulan Agustus 1948, T. M. Ali Panglima Polem selaku ketua pembelian pesawat tersebut, menerima sebuah surat dari Residen Aceh beserta telegram yang bertanggal 23 Agustus 1948, No. 3470/KSU/1948 dan No. 3461/KSU/48, yang dikirim oleh Ops. Ud. Sujono, Kepala Staf Angkatan Udara Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi. Isi telegram tersebut menyebutkan bahwa cek sebesar 120.000 dan 140.000 M\$ telah

diterima, yang tersebut terakhir di terima pada waktu kunjungan Presiden ke sana, kedua cek tersebut telah diteruskan ke KSAU-RI (Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia di Yogya, KSAU Kom. Ud. Suryadarma mengucapkan banyak terima kasih kepada rakyat Aceh atas bantuan itu. (Polim, 1955:32) Kedua pesawat yang dibeli dengan uang saudagar Aceh itu, masing-masing diberi nama Seulawah I dan Seulawah II. Pesawat-pesawat ini selain digunakan untuk hubungan dalam negeri, juga digunakan untuk route kota-kota Birma dan India, dalam rangka mengumpulkan dana untuk pembiayaan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Sehubungan dengan aktivitas itu, Amran zamzami mengemukakan bahwa pesawat itu sangat membantu pemerintah pusat dalam menembus blokade Belanda dan mengatasi kesulitan ekonomi. Pada mulanya Pesawat RI-001 Seulawah mengambil jalur penerbangan Jawa dan Sumatra, mengangkut pemimpin republik dan berbagai keperluan lainnya yang berkaitan dengan perjuangan. Setelah itu diambil jalur ke Calcutta, India. Kemudian Pemerintah Republik Indonesia memutuskan agar pesawat itu dioperasikan di Rangoon, Birma. Pengoperasian pesawat komersil itu dimulai pada tanggal 26 Januari 1949 dan sejak tanggal itu RI-001 Seulawah terdaftar sebagai Indonesia Airways (Zamzami, 1990 : 333).

Dengan bantuan yang diberikan masyarakat Aceh pada umumnya dan para pengusaha khususnya kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia, itu menunjukkan bahwa rakyat Aceh mampu menjadi pendukung Republik Indonesia sejak awal lahirnya karena potensi ekonomi yang dimilikinya.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam bab terakhir ini, akan dicoba disimpulkan kembali apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, daerah Aceh sama sekali bebas dari pendudukan kembali penjajahan Belanda, baik pada masa agresi pertama maupun pada agresi kedua. Oleh karena itu pemerintah daerah Aceh telah dapat menyelenggarakan administrasi dan organisasi pemerintahan secara baik, membentuk Angkatan Bersenjata dan menyatukan seluruh kelompok bersenjata dalam suatu kesatuan T. N. I yang lengkap dengan persenjataannya, serta membiayai perjuangan sendiri dalam masa yang begitu sulit.

Dalam bidang perbelanjaan negara, pemerintah berusaha mempergunakan potensi-potensi ekonomi daerah yang ada dan membuat peraturan-peraturan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah mengambil alih dan memproduksi kembali perkebunan-perkebunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, serta membuka hubungan perdagangan dengan Pulau Penang, Malaya dan Singapura.

Adapun para pengusaha yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor pada masa itu adalah M. Djoened Yoesoef dari NV. INDOCOLIM (*Indonesia Company Limited*), Wahi Ibrahim dari NV. PERMAI (Perdagangan Masyarakat Indonesia), Teuku Djohan dari NV. Meuraxa Trading Company, Muhammad Saman dari Firma PUSPA, Muhammad Hasan dari NV PIM (Perdagangan Indonesia Muda), Nyak Ben dari PT. PERSIG (Persatuan Saudagar Geudong) dan Ismail Usman dari PT ARCO (*Aceh Rubber Company*).

Para pengusaha tersebut di atas sebagian besar berasal dari kelas masyarakat biasa dan sebagian kecil berasal dari golongan bangsawan.

Keberadaannya sebagai kelompok pengusaha telah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini sesuai dengan program politik Pasifikasi yang dijalankan untuk mengamankan daerah Aceh melalui peningkatan taraf hidup penduduk. Oleh karena itu para pengusaha Aceh diberi modal usaha dan kesempatan untuk membuka berbagai usaha terutama sekali untuk membuka perkebunan dan perdagangan.

Para pengusaha Aceh dalam perang kemerdekaan dapat berkembang dan berkiprah baik dalam perdagangan lokal maupun dalam perdagangan internasional disebabkan oleh beberapa faktor. (1) Faktor keamanan dan kebijakan pemerintah. Daerah Aceh merupakan salah satu daerah pada masa perang kemerdekaan tidak pernah diduduki musuh, tidak pernah dikuasai musuh, dan tidak pernah memperoleh perbelanjaan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Aceh, melalui Dewan Perwakilan Aceh membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada usulan-usulan anggota Dewan dalam Verslag Rapat Pleno Dewan Perwakilan Aceh tanggal 30 Desember 1946, Anggota Dewan mengusulkan agar pemerintah mempermudah syarat-syarat untuk mendirikan perseroan berbadan hukum. Usulan ini diperluas lagi dengan usulan No. 36 dan No. 37 tanggal 1 Desember 1946. Usulan No. 36 memuat agar pemerintah mengadakan studi kelayakan khususnya dalam bidang perdagangan ke Malaya, sehingga hubungan perdagangan antara Aceh dengan Malaya dapat berlangsung dengan baik dan saling menguntungkan. Sedangkan usulan No. 37 menitik beratkan pada pemerataan kesempatan kepada semua orang yang mampu melaksanakan perdagangan. Dengan demikian peluang yang tersedia untuk menjadi pedagang tidak menjadi monopoli suatu golongan, tetapi terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Sehubungan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Kepala Badan Kemakmuran Aceh menetapkan bahwa ekspor impor dipegang oleh pemerintah dengan perbandingan modal 50% untuk pemerintah dan 50% untuk pengusaha swasta. Kebijakan ini sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung, yaitu kevakuman dalam bidang perdagangan akibat ditinggalkan oleh kapitalis-kapitalis Eropa. Oleh

karena itu pedagang-pedagang besar Aceh dengan mudah dapat memanfaatkan posisi-posisi kosong yang ditinggalkan oleh para kapitalis-kapitalis Eropa. (2) Faktor Potensi Daerah. Adapun yang menjadi sumber devisa utama dari potensi daerah, yaitu perkebunan karet, kelapa sawit, teh, kopi, pinus dan kopra. Sumber devisa ini banyak terdapat di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Pidie dan Aceh Besar.

Pada mulanya perkebunan-perkebunan tersebut diusahakan oleh perusahaan-perusahaan asing dan pemerintah Belanda sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia perkebunan ini yang di masa pendudukan Jepang dikerjakan oleh Jepang, diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan meningkatkan produksi untuk diekspor ke Malaya.

Selain perkebunan sebagai sumber devisa, topografis dan sumber daya manusia daerah Aceh sangat berpengaruh dalam perkembangan pengusaha-pengusaha pribumi pada masa itu. Kondisi geografis daerah Aceh yang mempunyai kawasan pantai berawa-rawa telah memungkinkan para pengusaha membangun basis penerobosan blokade Angkatan Laut Belanda di perairan Selat Malaka. Sedangkan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, sebagai pelaku-pelaku ekonomi untuk merealisasikan perdagangan dapat dipacu dengan cepat, karena masih ada sebagian masyarakat Aceh yang berpengalaman dalam bidang usaha ataupun perdagangan baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa pendudukan Jepang. Jadi mereka ini merupakan salah satu golongan dalam stratifikasi masyarakat Aceh (golongan pedagang) yang telah berpengalaman dalam bidang perdagangan, sehingga menjadi sebagai cikal bakal pengusaha-pengusaha Aceh pada masa perang kemerdekaan.

Kemudian berkembangnya pengusaha-pengusaha pribumi, juga tidak terlepas dari faktor luar yang secara langsung telah mempengaruhi ataupun mendorong peningkatan ekspor dan impor antara Aceh dengan Malaya. Adapun yang berkenaan dengan faktor ini, yaitu adanya kunjungan kapal-kapal dagang asing ke Aceh dengan membawa misi-misi perdagangan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan, bahwa berkembang dan berperannya pedagang-pedagang pribumi di Aceh pada masa perang kemerdekaan 1945 - 1949 dalam bidang perdagangan ekspor dan impor dikarenakan adanya suatu kerja sama yang baik antara penguasa dan pengusaha melalui kebijakan lesensi pemerintah dalam rangka melindungi dan mengembangkan pengusaha pribumi diawal pertumbuhannya. Pedagang-pedagang yang berkembang dalam kurun waktu itu seluruhnya dilandasi oleh etika perjuangan yang tinggi, sehingga perusahaan-perusahaan dagang yang mereka miliki tidak bersifat komersil-murni (*pure commercial*), tetapi masih bersifat politis guna mendukung perjuangan bangsa pada umumnya.

Berkaitan dengan perkembangan para pengusaha Aceh dalam masa perang kemerdekaan, maka aktivitas mereka dalam bidang perdagangan berhubungan erat dengan berbagai kepentingan perjuangan yang sedang berlangsung di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kontribusi para pedagang Aceh dalam perang kemerdekaan sebagai berikut : **Pertama**, untuk merealisasi perdagangan luar negeri. Dalam bidang ini para pedagang Aceh telah berhasil melaksanakan program pemerintah untuk mengatasi kebutuhan akan barang-barang impor dengan menembus blokade Angkatan laut Belanda di perairan Selat Malaka. Dengan demikian mereka telah berhasil merealisasikan ekspor dan impor antara Aceh dengan Pulau Penang, Malaya, dan Singapura. Perdagangan ini dilakukan selain didorong oleh keinginan untuk mencari keuntungan, juga didorong oleh semangat perjuangan kemerdekaan yang tinggi, sehingga para pengusaha berani mempertaruhkan harta dan nyawanya dari ancaman Angkatan Laut Belanda. **Kedua**, untuk mendukung ekonomi revolusi di Aceh. Dari hasil perdagangan ekspor impor, para pengusaha telah berhasil memasukkan berbagai barang kebutuhan daerah Aceh baik untuk kepentingan sipil maupun militer. **Ketiga**, untuk mendukung ekonomi perang Medan Area. Kebutuhan logistik dan persenjataan daerah Aceh secara relatif pada masa itu sangat memadai, sebagian besar telah dipergunakan untuk kepentingan perjuangan di Sumatera Timur khususnya dalam perang

Medan Area. **Empat**, untuk membiayai Pemerintah Pusat. Dalam hal ini para pengusaha telah berhasil membantu Pemerintah Daerah Aceh untuk menyediakan sejumlah dana untuk disumbangkan kepada Pemerintah Pusat Yogyakarta, dan untuk pembelian dua buah pesawat terbang jenis Dakota.

DAFTAR PUSTAKA

I. SUMBER ARSIP.

Arsip Nasional R.I. Depot Banda Aceh : Dokumentasi Residen Atjeh Tahun 1945 - 1949. No. 12, 7, 8.

Dewan Perwakilan Atjeh, Stenografisch Verslag Rapat Pleno (28/12-46 sampai 1/1-47). Koetaradja ; 1 Maret 1947.

Missive Gubernur Jenderal Hindia Belanda Menteri Jajahan Tgl. 4 Juni 1873. ARA : min. Van Kol. Vb. 24 Juli 1873. B. 21.

Boe, K.H. de (Controleur)

Mvo onderafdeling Langsa 1 Nopember 1933, 70 halaman.

Gunther, Th. O.B. (controleur)

Mvo onderafdeling Tamiang, 1933, 341 halaman.

Philips, A.H. (gouverneur).

Mvo gouvernement Atjeh, 1932, 103 halaman.

Smeets, A. Th. (controleur)

Mvo onderafdeling Meulaboh. 1934.

Economic Offices Penang, Report on the Entrepot Trade of Penang, 1951.

II. ARTIKEL.

Natasuarna, H. *The Indonesia Revolution and the Paper Money Issued During that Period (1945 - 1950)*. Tanpa penerbitan angka tahun penerbitan (KITLV : I - 1086 - N I).

Reid, Anthony, "Trade and the Problem of Royal Power in Atjeh Tree Stages, c. 1550 - 1700", *MMBRAS*. Vol. 6, 1975.

III. BUKU.

- Anderson, John, *Acheen and the Ports on the North and East Coasts of Sumatra*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1971.
- Amin, S.M. *Sekitar Peristiwa Berdarah di Aceh*. Jakarta : NV. Soeroengan, tanpa angka tahun.
- *Kenang Kenangan Dari Masa Lampau* Jakarta : Pradnya Paramita.
- Alfian Teuku Ibrahim. *Revolusi Kemerdekaan di Aceh (1945 - 1949)*. Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1982.
- Admosudirdjo, Pradjudi. *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Abad XIX*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1984.
- Ali, Abdullah, *Sejarah Perjuangan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan 1945 - 1949*. Banda Aceh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1984.
- Broersma, R. *Atjeh Als Land voor Handel en Bedrij*. Utrecht : Gebrs Cohen, 1925.
- Biro Sejarah Prima. *Medan Area Mengisi Proklamasi*. Jilid I, Medan : Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1976.
- Colins, Randoll. *Conflict Sociology : Towards an Explanatory Science*. New York : Academic Press, Inc. 1975.
- Djamil, M. Joenoes. *Riwayat Barisan F (Fujiwarakikan), Seri Informasi Aceh, Th. I, No. I*. Banda Aceh : Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh, 1987.
- Eisenstadt, S. N. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
- Eijbergen, van. *Atjeh up to Date*. Tijdschrift Voor Het Binnenlandsch Bestuur. Batavia : G. Kolff & Co, 1914.

Eric Eugene, Morris. *Islam and Politics in Aceh : A Study of Center-Periphery Relation in Indonesia*. An Arbor : University Microfilms International, 1983.

Gonggrijp, J.R.C. *Overzicht van de Economische Ontwikkeling van Atjeh Sedet De Pacificatie*. Den Haag : van Stoeckum & Zoon, 1944.

Geertz, Clifford. *Raja dan penjaja*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1989.

Hussein, Abdullah, *Peristiwa*. Kuala Lumpur : Pustaka Antara.

———. *Sebuah Perjalanan*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia, 1984.

Hasymi, A. *Semangat Merdeka*. Jakarta : Bulan Bintang, 1985.

Insider. *Atjeh Sepintas Lalu*. Jakarta: Fa. Archapada, 1950.

Ismuha. *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta : Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional - LIPI, 1976.

Ismail, Muhammad Gade. *Aceh's Dual Economy During the Late Colonial Periode*. Amsterdam, The Netherlands : Academy Colloquium Historical Foundations of a National in Indonesia, 1890s - 1990s, 1994.

———. *Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni : Perkembangan Sosial Ekonomi di daerah Batas Aceh Timur, 1840 - 1942*. Disertasi PhD. Leiden : Rijksuniversiteit, 1991.

Jongejans, J. *Land en Volk van Atjeh en Nu*. Holandsche Drukkerij, 1937.

Kreemer, J. *Atjeh*. Jilid 2. Leiden : E.J Brill, 1932.

Kementrian Penerangan RI. *Republik Indonesia : Propinsi Sumatera Utara*. Jakarta, 1953.

———. *Keterangan dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureuh*. Djakarta, 1953.

- Kee, Ong Poh. *Trade of Penang With Atjeh Graduation Exercises Economic (honour 1955-1956)*. Singapore : University of Malaya.
- Langen van, K.F.H. *De intrichting van het Atjessche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat*.
- Langhout, J. *Economische Staatkunde in Atjeh*. Den Haag : W.P. Vanstockum & Zoon, 1923.
- Laporan Politik Gubernur dan Daerah Takluknya selama Pertengahan Pertama tahun 1928. *Seri Informasi Aceh, Th. VI. No. I*, 1928. Banda Aceh: Pusat Informasi dan Dokumentasi Aceh, 1982.
- Lie, John. *Kenang-Kenangan (Sweet Memory) Singapore, Labuhan Bilik, Port Swettenham, Memory Pribadi John Lie*. 1982, tidak diterbitkan.
- Lombard, Denys. *Kerajaan Aceh*. Jakarta : Balai Pustaka, 1991.
- Morris, Eric. "Revolusi Sosial dan Pandangan Islam" dalam Auderey R. Kahin. *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. Jakarta : Grafiti, 1990.
- Marsden, William. *The History of Sumatera*. Oxford Univesity Press, 1975.
- Manyak, H.T. *Kenang Kenangan Penyelesaian Tugas Dalam Perjuangan Kemerdekaan RI, 1946 - 1948*. Catatan Pribadi H.T. Manyak, Banda Aceh, 1975, tidak diterbitkan.
- Nutosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka, 1983.
- Panitia Penerbitan Boekoe Peringatan. *Satoe Tahoen NRI di Sumatera (17-8-1945 - 17-8-1946)*. Medan : Pemerintah Poesat Sumatera, 1946.
- Piekaar, A.J. *Atjeh en De Oorlog met Japan*. The Hague : Van Hoeve, 1949.

Polem, Teuku Muhammad Ali Panglima. *Memoir (Tjataan) T.I Panglima Polem Kutaraja* : Alhambra, 1972.

Reid, Anthony. *The Contest for Nort Sumatera, Atjeh, the Netherlands and Britain 1858 - 1898*. Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1969.

—————. *Perjuangan Rakyat, Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*. Jakarta : Sinar Harapan, 1987.

Seksi Penerangan/Dokumentasi Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh. *Modal Revolusi 45*. Kutaraja, 1960.

Siegel, James T. *The Rope of God*. London : University of California Press, 1969.

Sejarah Militer Kodam - I/Iskandar Muda. *Dwi Windu Kodam I / Iskandar Muda*. Kutaraja : Kodam I / Iskandar Muda, 1972.

Sulaiman, Irchami. "Pengusaha Cina dan Pengusaha Aceh di Kota Banda Aceh", dalam Dorodjatun Kuncoro Jakti. *Perdagangan Pengusaha Cina, Perilaku Pasar*. Jakarta : PT. Pustaka Grafika Kita, 1988.

Sufi, Rusdi. "Sultan Iskandar Muda", *Dari Sini Ia Bersemi*. Banda Aceh: Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1981.

—————. "Pasifikasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Aceh". dalam Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. *Seminar Sejarah Nasional IV : Sub Tema Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah Tradisional Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1991.

Talsya, T.A. *Sejarah dan Dokumen - Dokumen Pemberontakan Aceh*. Kutaraja : Kusuma, tanpa angka tahun.

—————. *Batu Karang di Tengah Lautan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1945 - 1946*. Buku I. Banda Aceh : Lembaga Sejarah Aceh, 1990.

—————. *Modal Perjuangan Kemerdekaan (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1947 - 1948* Buku II. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990.

—————. *Sekali Republiken Tetap Republikein (Perjuangan Kemerdekaan Di Aceh) 1949*. Buku III. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh, 1990.

Usman, Nya' Gade. *Sekitar Pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia (API) di Aceh*. Banda Aceh : Kanwil P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Daerah Aceh, 1976.

Yakobi, A.K. *Aceh Daerah Modal : Long March Ke Medan Area*. Jakarta: Yayasan Seulahwah RI - 001, 1992.

Zanzami, Amran. *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Zainal Abidin, T. *Peranan Rakyat Aceh Dalam Perang Kemerdekaan (1945-1949)*. Jakarta : Beuna, 1990.

IV. Wawancara

Penelitian ini juga menggunakan sumber bahan wawancara sekitar 11 orang informan, yang terdiri dari bekas pengusaha, staf perusahaan, pewaris perusahaan, pegawai Badan Kemakmuran/Kantor Perdagangan, dan Ketua Badan Peningkatan Produksi Dalam Negeri dan impor barang-barang luar negeri. Nama-nama mereka dapat di lihat pada daftar informan.

V. Koran

Deli Courant. Medan, 12 Juni 1933.

Ateh Simbun. Koetaradja, 8 September 1944.

Waspada. Medan, 28 September 1947.

Semangat Merdeka. Koetaradja, 13 Juni 1947.

DAFTAR INFORMAN

1. Ad, Teuku lahir 1920 di Banda Aceh, pedagang. Tempat tinggal Slipi, Jakarta.
2. Abidin, Zainal, Lahir 1927 di Pidie, sekretaris pembantu GASIDA.
3. Ben, Daud, lahir 1920 di Aceh Utara, pedagang dan salah seorang pemegang sero terbesar pada PT. PERSIG. Tempat tinggal Lhokseumawe.
4. Ben, Gani, Lahir 1936 di Aceh Utara, pewaris PT. PERSIG. Tempat tinggal Lhokseumawe.
5. Djoened Yoesoef, H.M Lahir 1917 di Banda Aceh, direktur NV. Indocolim dan ketua GASIDA. Tempat tinggal Banda Aceh.
6. Djafar Hanafiah, H. Lahir 1921, di Banda Aceh, pernah menjadi TRI dengan pangkat Kapten, dan kepala CTC Penang. Tempat tinggal Banda Aceh.
7. Ismail Usman, H, Lahir 1919 di Aceh Timur, bekas Seinedan, dan direktur PT. ARCO.
8. M. Daud, Teuku, Lahir 1921 di Banda Aceh, staf dan adik kandung direktur NV. Meuraxsa Trading Company. Tempat tinggal Banda Aceh.
9. Madjid, Abubakar, Lahir 1917 di Aceh Utara, bekas perwira Sekuriti Divisi X TRI, dan salah seorang pemegang sero terbesar pada PT. ARCO. Tempat tinggal Langsa.

10. **Nur El Ibrahimy, Tkg.M** Lahir 1912 di Aceh Timur, anggota Dewan Pertahanan Daerah Aceh, bekas anggota Parlemen, dan ketua Badan ekspor impor. Tempat tinggal Jakarta.
11. **Sulaiman, Cut,** Lahir 1920 di Banda Aceh, bekas staf dan pewaris PT. PERMAI cabang Banda Aceh. Tempat tinggal Banda Aceh.

DAFTAR SINGKATAN

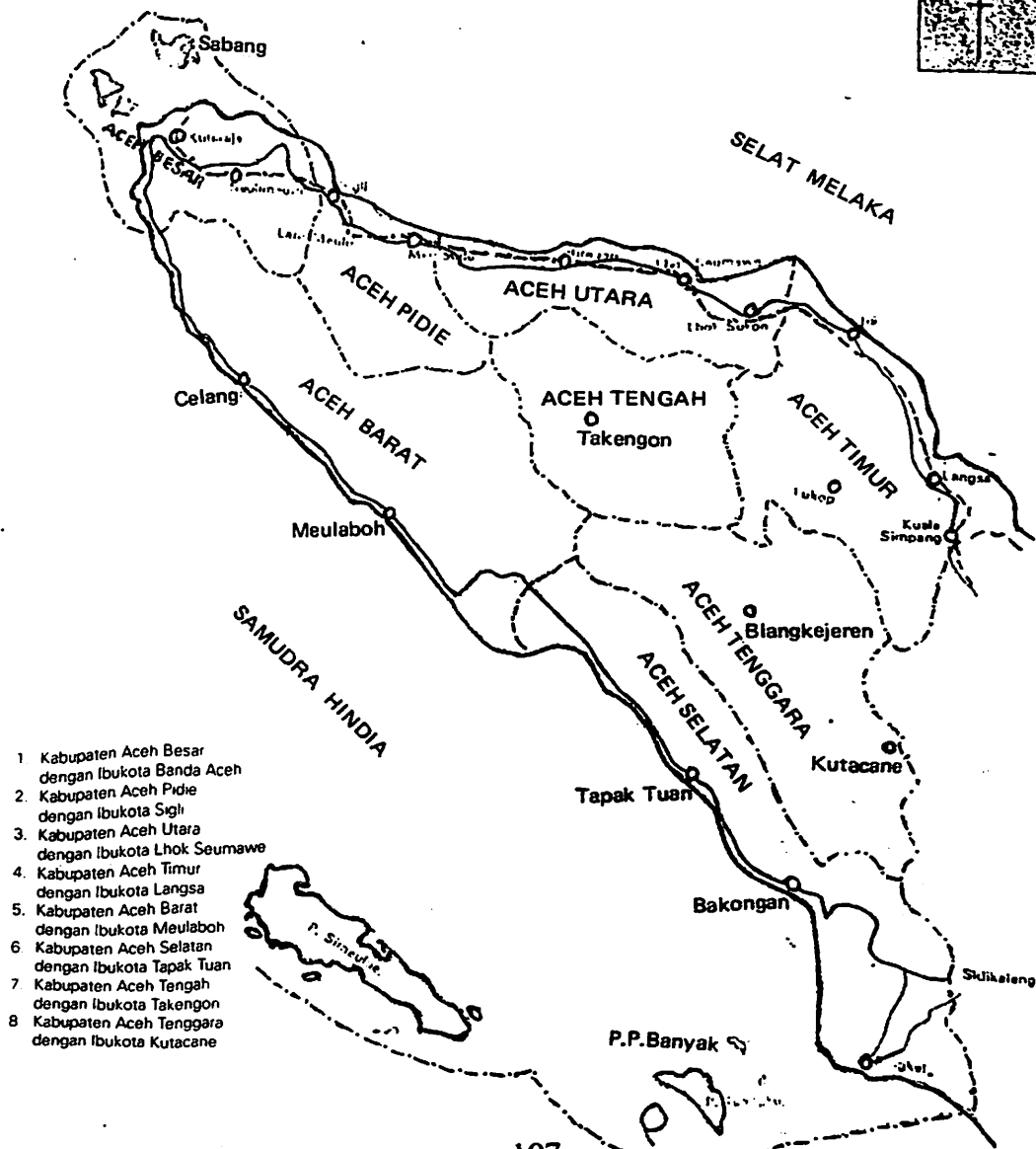
API	Angkatan Pemuda Indonesia
ARCO	Aceh Rubber Company
ATC	Aceh Trading Company
BPM	Bataafsche Petroleum Maatschappij
BPI	Barisan Pemuda Indonesia
GASIDA	Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh
HIS	Holand Inlandsche School
IPI	Ikatan Pemuda Indonesia
INDOCOLIM	Indonesia Company Limited
IEFC	International Emergency Food Control
ISIS	Ikatan Studi Ilmu Sejarah
MULO	Meer Uitgebreit Lager Onderwijs
MMBRAS	Monographs of Malaysian Branch of Royal Asiatic Studies
NKPM	Nederland Koninklijk Petroleum Maatschappij
NICA	Nederland Civil Administration
ORIPS	Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera
ORIKA	Oeang Republik Indonesia Kabupaten Asahan
ORIBA	Oeang Republik Indonesia Bagian Aceh
OK	Orang Kaya
PRI	Pemuda Rakyat Indonesia
PDRI	Pemerintah Darurat Republik Indonesia
PERMAI	Perdagangan Masyarakat Indonesia

PIM	Perdagangan Indonesia Muda.
PERSIG	Persatuan Saudagar Geudong
TBB	Tijdschrift voor het Binnelandsch Bestuur
TKR	Tentara Keselamatan Rakyat
TPRI	Tentara Pelajar Republik Indonesia
TPII	Tentara Pelajar Islam Indonesia.

LAMPIRAN I

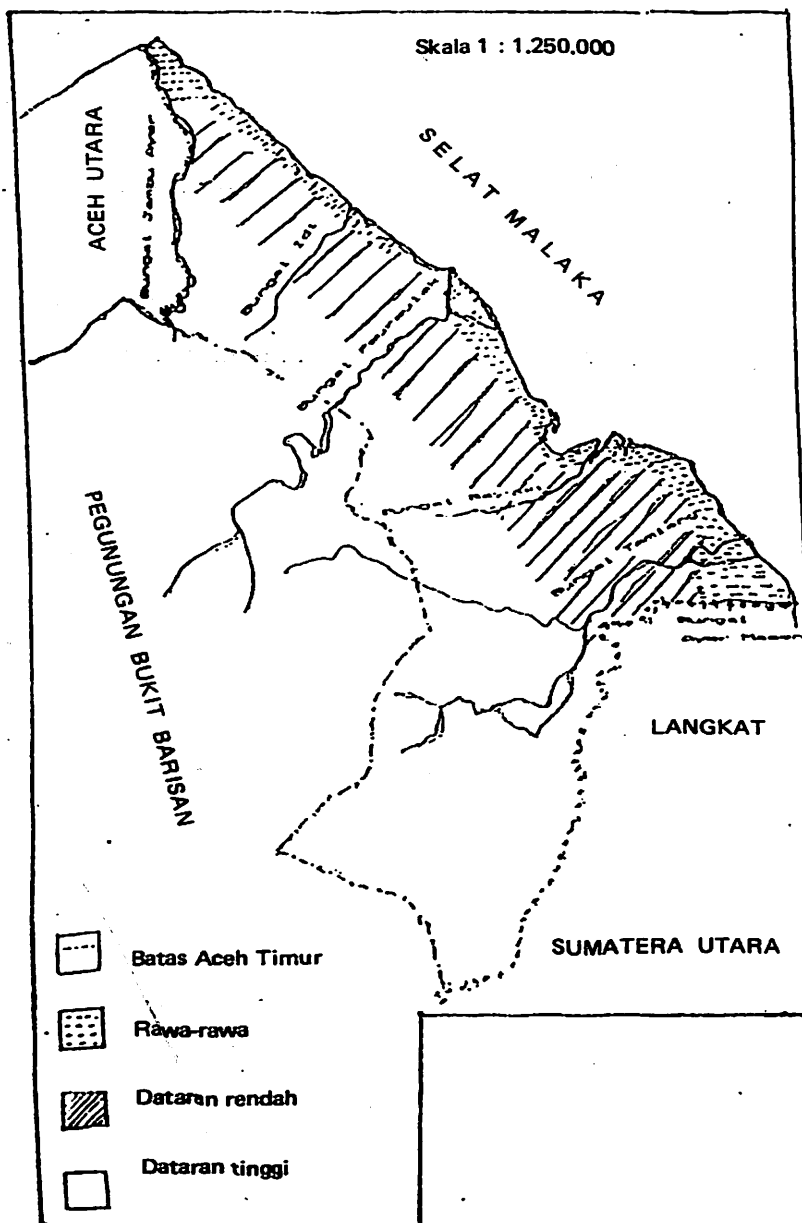
PETA DAERAH ISTIMEWA ACEH DENGAN KABUPATENNYA DEWASA INI

- Batas Kabupaten yang pada zaman Belanda disebut *afdaeling*
- - - - - Jalan kereta api
- Jalan raya

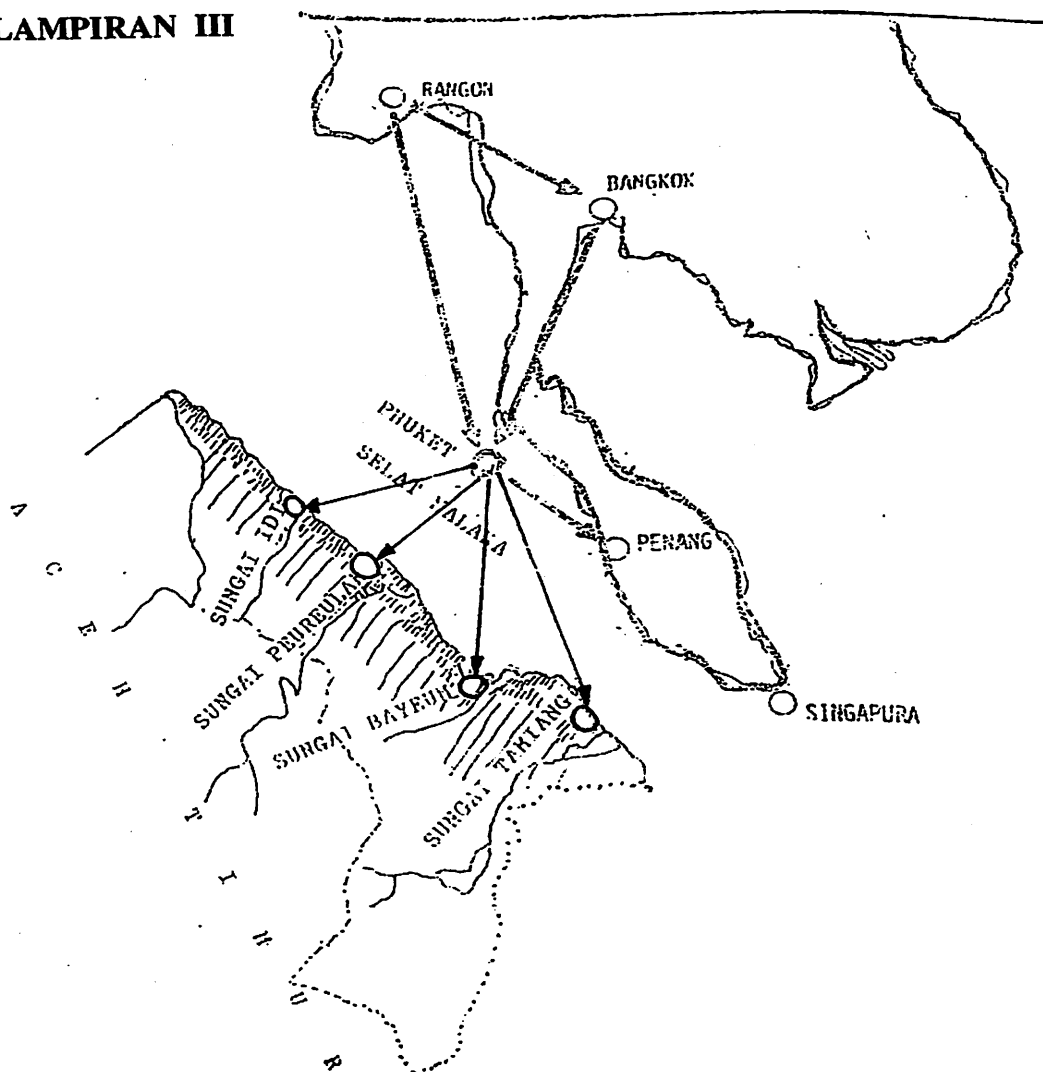


LAMPIRAN II

Topografi Daerah Aceh Timur



LAMPIRAN III



Rute penerobosan blokade
Angkatan Laut Belanda

○ Basis Ekspor Impor

— Rute Ekspor Impor